Menyinambungkan Pemulihan

Laporan Semesteran 2008

Badan Pelaksana
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

ISBN 978-602-8199-20-9

Prakata v
Ucapan Terimakasih vii
Ringkasan Utama 1

URAIAN

Keluaran 16
Prioritas 16
Sumberdaya 18
Pendanaan Pemulihan 19
Pemantapan Operasionalisasi 26
Progres 27
Realisasi Anggaran 29
Prasarana 29
Perumahan dan Pemukiman 31
Ekonomi dan Usaha 32
Sosial-Kemasyarakatan 36
Tata-Kelola 44
Prakarsa 44
Koordinasi 46
Pengelolaan Informasi 58
Pencegahan Penyelewengan 64
Strategi 74
Pembangunan Berbasis-Masyarakat 74
Pembangunan Berbasis-Wilayah 77
Pembangunan Tersinambungkan 81
Pemampuan Kapasitas 83
Alih Pengetahuan 93
Tumbuhnya Perekonomian 95
Pengurangan Risiko Bencana 103
Dampak-Ikutan 110
Sektor Publik 110
Kebijakan Pemerintah 110
Pengelolaan Aset 116
Penyiapan Payung Hukum 123
Sektor Privat 126
Mata Pencaharian 126
Kebutuhan Dasar 141
Perdamaian dan Rekonstruksi 149

LAMPIRAN

Laporan Keuangan Semesteran 2008 153
Daftar Akronim dan Singkatan 177

DAFTAR KOTAK

Kotak 1 : Mutakhiran RANTF 21
Kotak 2 : *Debt Swap* Pemerintah Italia 22
Kotak 3 : Kppn-K Aceh-Nias 25
Kotak 4 : Kantor-Kantor Perwakilan BRR 28
Kotak 5 : Aceh Miliki GKN Baru 30
Kotak 6 : BRR dan Pengembangan UKM 31
Kotak 7 : Pusat Pengembangan Ekspor Aceh 34
Kotak 8 : Wirausaha Masyarakat 36
Kotak 9 : Rehabilitasi Sarana Ibadah 39
Kotak 10 : Pembangunan Sarana Agama dan Pendidikan 40
Kotak 11 : Keterlibatan Mitra Internasional 48
Kotak 12 : Rekomendasi NISM Keempat 51
Kotak 13 : Duduk Perkara Perumahan 55
Kotak 14 : Bermula dari Sepasang Meja-Kursi 56
Kotak 15 : Komitmen Bersih SAK 68
Kotak 16 : Kiprah Fasilitator di Nias 75
Kotak 17 : Kilas-Balik Regionalisasi BRR 79
Kotak 18 : Pemekaran di Aceh Sewindu Terakhir 80
Kotak 19 : Pemekaran di Nias 81
Kotak 20 : Pengendali Proyek 82
Kotak 21 : Program Purnabakti BRR 86
Kotak 22 : SEAN 94
Kotak 23 : TDMRC 105
Kotak 24 : Giliran Kementrian/Lembaga dan Pemda 114
Kotak 25 : Menyelamatkan Arsip Pemulihan 122
Kotak 26 : Potensi Perikanan Laut Aceh 130
Kotak 27 : Keterlibatan *Panglima La'ot Lhok* 132
Kotak 28 : Prospek Kopi Aceh di Pasar Dunia 137
Kotak 29 : Tas Ekspor *made in* Samahani 140
Kotak 30 : Indeks Pembangunan Manusia 141
Kotak 31 : Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Pendidikan 144
Kotak 32 : Anggaran Aceh untuk Pendidikan 145

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Komposisi Pendanaan Pemulihan Aceh-Nias yang sudah Berstatus Komitmen 19
Bagan 2 : Alokasi Pendanaan Pemulihan Berdasarkan Sektor 20
Bagan 3 : Alokasi Anggaran BRR 2008 Berdasarkan Sektor 23
Bagan 4 : Alokasi Anggaran Kantor BRR (Rp trilyun) 27
Bagan 5 : Tampilan Awal Laman ***Front-End*** AGDC sebelum Direnovasi 61
Bagan 6 : Skema Sarana Dukungan Piranti-Keras (***Hardware***) dan Piranti-Lunak (***Software***) di AGDC 63
Bagan 7 : Rencana Kerangka-Waktu PMT Kantor BRR Perwakilan Nias 115
Bagan 8 : Koordinasi Anggaran Penuntasan Pemulihan di Nias pada 2009 115
Bagan 9 : Progres Serah-Terima Aset Pemulihan di Nias (per Mei 2008) 122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Program Penguatan Kelembagaan Daerah 88
Tabel 2 : Tingkat IHK dan Inflasi di 16 Kota Sumatera (dalam persen) 96
Tabel 3 : Inflasi 2006-08 di Dua Kota Besar di Aceh (dalam persen) 97
Tabel 4 : PDRB Aceh Semester Pertama 2008 di Lapangan Usaha (dalam trilyun rupiah) 98
Tabel 5 : Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Semester Pertama 2008 di Lapangan Usaha (dalam persen) 101

PRAKATA

Assalāmu`alaikum wa rahmatullāh wa barakātuh

Bencana di Aceh-Nias, memang telah menghancurkan sebagian besar aset fisik maupun nonfisik. Kedatangannya yang begitu cepat, di luar yang bisa dibayangkan, telah mencoret ribuan nama saudara dan sumberdaya manusia (SDM) terbaik yang kita punyai. Inilah musibah. Namun, bencana jualah yang telah menjadi tenaga pendorong bagi hadirnya kumpulan aset serta tumbuh-kembangnya SDM beraneka kecakapan. Baru, dan segar. Inilah hikmah.

Menyayangkan yang hilang oleh sebab musibah, bukanlah yang kita mau. Memaknai dan mengisi apa yang kita yakini sebagai hikmah, itu yang kita mau. Secara bersama-sama, hikmah itu telah dan tengah kita wujudkan sebagai bukan hanya mengganti-kembali yang telah hilang, melainkan membuatnya menjadi lebih baik dari sediakala.

Betapa banyak yang dulunya dibayangkan pun susah, tapi kini bisa terwujud. Tsunami telah memicu distopnya kemelut konflik bertahun-tahun di Aceh dan memanggil pulang anak bangsanya dari berbagai belahan daerah atau dunia. Aceh bersimbah damai. Tsunami pula yang telah memungkinkan sejumlah pemukiman yang dulu kumuh menjadi tertata apik. Gempa telah membuat Nias dilirik, dibicarakan, serta dipicu dan dipacu rantai ketertinggalannya ke dalam putaran roda akselerasi pembangunan.

Tiga tahun sudah fase rehabilitasi-rekonstruksi kita jalani dengan sungguh-sungguh dan bergegas. Sudah sepatutnya bagi kita sekarang untuk mengetengahkan satu hal: para penyinambung pembangunan-kembali.

Buah pengalaman berharga tentu tak sedikit yang berhasil dipetik oleh SDM setempat setelah terlibat dan bekerja dalam segenap program/proyek Pemulihan. Selain itu, mereka juga difasilitasi pelatihan, lokakarya, magang kerja, advokasi, beasiswa, maupun magang ke luar daerah/negeri. Putra-putri terbaik Aceh-Nias tersebut kini telah menjelma sebagai aset dan investasi yang menjanjikan bagi masa depan. Hal itu, secara tak langsung, sejalan dengan semakin tersiapkannya kemampuan yang kualitasnya, lebih baik ketimbang semula.

Laporan semesteran ini menyajikan gambaran kepada khalayak luas mengenai tiga setengah tahun kegiatan Pemulihan Aceh-Nias. Lebih dari itu, laporan ini

memberikan penekanan pada progres pemampuan kapasitas SDM dan pemerintah daerah setempat, terutama dalam rangka menjawab tantangan penyinambungan pembangunan kelak. Sebagai informasi, hampir semua data yang tersaji dalam laporan ini dihimpun dengan *cut-off* Juni 2008.

Daya tahan (*resilience*) saja, yang memang telah teruji itu, ternyata belum cukup. Ia, jika yang diharapkan adalah kondisi yang lebih baik, harus pula diimbangi dengan kehandalan SDM setempat. Tak diragukan lagi, puluhan trilyun rupiah, puluhan ribu jam kerja, maupun ribuan tenaga yang dicurahkan hingga detik ini, memang amat bermakna. Namun, itu semua akan tidak bermakna apa-apa jika tidak diimbangi dengan upaya sadar dalam membangun kehandalan dan menyiapkan kapasitas penyinambungnya. Jangan menunggu rumah selesai, baru ikut berkiprah. Oleh karena itu, adakah yang lebih baik pada saat ini ketimbang bekerja keras dalam menyiapkan kapasitas dan kecakapan tersebut?

Kecakapan manajerial dan kepemimpinan, serta penguasaan sistem secara lebih baik yang tengah diupayakan saat ini, mulai mendorong kepercayaan atas kemampuan diri sendiri. Kepercayaan diri adalah modal penting untuk meningkatkan semangat berkompetisi dan produktivitas. Semangat berkompetisi dan produktivitas yang tertingkatkan, adalah bahan bakar pokok bagi pembangunan-kembali berjangka panjang. Berbekal itu, atas ridho Allah, apapun kendala dan tantangan yang ada, akan lebih sanggup untuk kita hadapi secara meyakinkan.

Wassalāmu'alaikum wa rahmatullāh wa barakātuh

Banda Aceh, November 2008

Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias

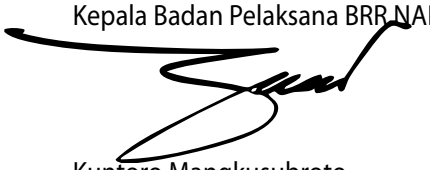

Kuntoro Mangkusubroto

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagaimana amanat undang-undang pembentukannya, BRR sebagai sebuah Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatannya, salah satunya dalam bentuk laporan semesteran. Laporan semesteran 2008 ini disiapkan oleh Tim Penulis BRR atas partisipasi dan kontribusi pelbagai pihak pendukung Pemulihan Aceh-Nias, utamanya dari internal BRR, pada siapa kemajuan yang disajikan berhutang banyak.

Tim Penulis BRR dan penata-letak buku bekerja di bawah selia Pusat Pelaporan dan Hubungan Pemerintah Pusat BRR. Data indikator kemajuan disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi BRR. Kelengkapan data didukung oleh Pusat Pengendalian Program dan Proyek Wilayah BRR, kedeputian sektoral BRR, Kantor-kantor Perwakilan BRR, serta para Mitra Pemulihan.

Sebagian besar foto-foto, diambil oleh fotografer BRR; selebihnya oleh rekan-rekan fotografer dari Mitra Pemulihan. Sebagian informasi didukung ketersediaannya oleh Bidang Pengelolaan Pengetahuan (KNOW) BRR. Laporan keuangan di bagian lampiran disiapkan oleh Pusat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR.

Sudah barang tentu, masih banyak pihak yang perannya tak dapat dikesampingkan namun tak mungkin disebut satu per satu. Atas segenap dukungannya, dihaturkan terimakasih. Tanpa adanya partisipasi dan kontribusi pihak-pihak tersebut, pekerjaan Pemulihan Aceh-Nias, mustahil berada dalam status seperti sekarang ini.

RINGKASAN UTAMA

Dari keseluruhan durasi program Pemulihan Aceh-Nias pascabencana, sepanjang tahun ketiga dan terakhir (April 2008 - April 2009) masa tugas BRR merupakan masa kritis. Padanya, juga merupakan masa-masa krusial dalam mempersiapkan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait sebagai penyinambung pembangunan di atas capaian program Pemulihan. Berkat capaian atau *keluaran* program Pemulihan sebagai hasil upaya *tata-kelola* dengan *strategi* tertentu, kini tak sedikit *dampak-ikutan* yang ada, muncul sebagai modal berharga bagi estafet pembangunan Aceh-Nias.

KELUARAN

Di atas landasan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya, pekerjaan Pemulihan dijalankan. Progresnya, selain dari perspektif sektoral, juga bisa dilihat dari perspektif realisasi anggaran dan operasional.

PRIORITAS

Prioritas Pemulihan Aceh-Nias pada 2008 ada dua, yakni penuntasan proyek dan implementasi program transisi penyinambungan pembangunan. Dalam hal penuntasan program pada 2008, penekanan ditumpukan pada proyek utama 2007 yang belum optimal. Penekanan kegiatan pada awal 2008, diletakkan pada penuntasan proyek strategis atau kritis. Sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 2/2005 pasal 26 ayat 3, bahwa kendati proyek BRR harus tuntas tahun ini namun proses rehabilitasi-rekonstruksi untuk seterusnya menjadi tanggung jawab Pemda dan K/L terkait.

Dalam keseluruhan kegiatan Pemulihan, penguatan Pemda dan pelayanan publik telah menjadi agenda utama lintassektoral. Dampak penguatan itu dalam tiga tahun terakhir, semakin menggembirakan. Hal ini memungkinkan BRR pada 2008 lebih memfokuskan diri pada pendekatan terpadu dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi (monev), serta inventarisasi keluaran Pemulihan. Aset *on-budget*, inventarisasinya sudah dirintis sejak dini. Proses pendataan semakin intensif dengan memasukkan pula aset *off-budget* pada sepanjang paruh pertama 2008.

SUMBERDAYA

Pada 2008, BRR semakin mengintensifkan pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM), antara lain dengan reorganisasi tanggungjawab yang memungkinkan stafnya memfokuskan diri pada kebutuhan utama Pemulihan 2008. Dalam rangka menyediakan dukungan bagi penyelesaian program dan implementasi peralihan, diintensifkan penggeseran fokus sektoral ke wilayah. Sebagai akibatnya, terdapat penambahan kapasitas dan aktivitas di kantor perwakilan BRR untuk meningkatkan peran dan partisipasi Pemda setempat.

Sejumlah Rp67 trilyun (AS$7,4 milyar) sudah dikomitmenkan untuk proses Pemulihan Aceh-Nias. Pendanaan *off-budget* telah mencapai komitmen sekitar Rp35 trilyun; realisasinya sudah sekitar Rp22,85 trilyun. Adapun melalui saluran *on-budget*, baik yang *on-* maupun *off-treasury*, telah tercatat komitmen sekitar Rp32 trilyun; realisasinya sekitar Rp23 trilyun.

Alokasi anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2008 adalah sebesar Rp10,8 trilyun (±AS$1,2 milyar) yang merupakan kombinasi dari dua skema Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA Murni Rp7 trilyun (±AS$778 juta) serta DIPA Luncuran Rp3,8 trilyun. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (Rp6,57 trilyun), Pinjaman Luar Negeri (Rp482,16 milyar), Hibah (Rp3,2 trilyun), serta Rupiah Murni Pendamping (Rp633,77 milyar). Bertambahnya aktivitas regional tercermin dari alokasi anggaran TA 2008. Kantor perwakilan BRR menerima alokasi sebesar 43 persen dari keseluruhan anggaran—bandingkan dengan 2007 yang hanya 31 persen.

PROGRES

Pada tahun ini BRR menangani kurang-lebih 3.000 proyek. Proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor (47,8 persen), BRR sendiri (22 persen), serta kolaborasi (14,5 persen).

Realisasi anggaran pada paruh awal 2008 telah melampaui jumlah pembelanjaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menyiratkan bahwa, adalah penting untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap proyek yang sedang berjalan. Fokus BRR pada 2008 dalam pengembangan regional melalui implementasi dan pengawasan program yang lebih terdesentralisasi, menuai hasil mengembirakan. Per 30 Juni 2008 telah mencapai sekitar 27,66 persen, kendati realisasi program masih di bawah harapan. Pada akhir 2008, keseluruhan proyek diharapkan dapat diselesaikan.

Pemulihan sektor **prasarana** telah menyerap dana hampir 30 persen dari keseluruhan dana Pemulihan Aceh-Nias. Sektor ini penting untuk melancarkan akses ke daerah terpencil dan untuk mendukung percepatan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Ditambah dengan pemahaman sebagai investasi jangka panjang, maka bagi BRR, prasarana menjadi sektor yang strategis.

Pada 2008, sebesar 40,3 persen dari total anggaran sektor ini telah dialokasikan. Fokus pada 2008 mencakup penyelesaian proyek jangka panjang yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya; serta pelaksanaan proyek strategis pada subsektor telekomunikasi, transportasi udara, jalan, gedung pemerintahan, saluran air dan irigasi, serta pengendali banjir. Adapun pelaksanaan program jangka panjang yang telah dirancang, akan diteruskan setelah masa tugas BRR berakhir.

Pada 2008, sekitar 26,3 persen dari anggaran Pemulihan dialokasikan untuk kegiatan bidang **perumahan dan permukiman** yang belum selesai. Sekitar 41,4 persen program perumahan didanai pemerintah melalui APBN dan dilaksanakan oleh BRR. Sisanya, *off-budget*, didanai dan dilaksanakan sendiri oleh Donor/organisasi nonpemerintah (*non-governmental organisation, NGO*). Lebih lanjut, pada awal 2008, program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah diluncurkan. Per Juni 2008, sudah 34.613 kepala keluarga tercatat di bank lokal sebagai para penerima manfaatnya.

Pada 2007, ditetapkan hampir 140.000 unit rumah memerlukan rekonstruksi, 68.000 unit memerlukan rehabilitasi, dan sekitar 650 desa membutuhkan perbaikan prasarana dan sarana dasar (PSD). Kini, pada medio 2008, 110.000-an unit rumah telah dibangun kembali, dan 70.000-an unit rumah telah direhabilitasi. Selain itu, 1.450 desa telah menerima perbaikan PSD—ditambah dengan yang dikerjakan oleh Donor/NGO.

Sektor **ekonomi dan usaha** mendapat alokasi sebesar 11,1 persen dari total pendanaan Pemulihan. Dana tersebut terkonsentrasi pada Pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri kecil dan menengah. Dan pada 2008, pertambahan 5,7 persen dari anggaran tahunan telah dialokasikan untuk menyediakan sarana pendukung bagi Pemulihan sektor tersebut.

Diperkirakan 60.000-an hektare lahan *pertanian* perlu direhabilitasi; dan dengan dukungan dari Donor/NGO, diharapkan hingga akhir 2008, lebih dari 100.000 hektare akan produktif kembali. Penyelesaian sistem irigasi menjadi prioritas tahun ini dengan target 40 kilometer saluran irigasi direhabilitasi dan direkonstruksi. Pada akhir 2008, 180 kilometer jaringan irigasi—30 kilometer lebih dari rencana awal—pengoperasiannya diperkirakan pulih secara penuh. Diadakan pula penambahan 4.000-an unit alat dan mesin pertanian(alsintan) se-Aceh-Nias. Apabila semuanya terpenuhi pada akhir 2008, maka total penyediaan alsintan selama masa Pemulihan mencapai lebih dari 14.000 unit. Sebanyak total 3.600-an hektare lahan perkebunan akan direhabilitasi dan diintensifikasi dalam rangka menjamin bahwa semua lahan pertanian yang dulunya tergenang tsunami akan kembali produktif sebelum tahun 2008 berakhir.

Dalam bidang *peternakan*, sebanyak 36.000-an ekor sapi hilang oleh tsunami. Pada sepanjang tiga tahun Pemulihan, telah lebih dari 33.000 ekor sapi didatangkan dan didistribusikan ke seluruh Aceh-Nias. Pada tahun ini, didatangkan lagi 834 ekor oleh BRR dan 3.900-an ekor oleh Donor/NGO untuk menjamin bahwa seluruh kehilangan yang tercatat sudah terganti sebelum akhir 2008. Sarana baru pasar ternak/hewan akan dibangun juga tahun ini, dan sebanyak 7 pasar daging yang semula direncanakan pada 2005, selesai pada 2007. Guna menjamin kontinyuitas kesehatan ternak, sebuah laboratorium dan pos karantina direncanakan akan selesai dibangun tahun ini.

Pembangunan kembali sektor utama yang terimbas tsunami, industri *perikanan*, luar biasa responsnya. Kebanyakan pekerjaan rekonstruksi utama sektor perikanan rampung pada 2007, termasuk pembangunan pelabuhan perikanan skala kecil, dermaga, dan bongkar-muat, dan ruang pendingin. Lebih dari 5.000 *boat* telah diganti selama fase awal Pemulihan—melebihi asesmen kehilangan sebanyak 4.121 unit. Renovasi dan pencetakan 18.600-an hektare tambak yang rusak akibat tsunami telah membangkitkan kembali mata pencaharian masyarakat pesisir. Dengan penambahan 280-an hektare tambak yang sedang dibangun tahun ini, maka pada akhir 2008, seluruh kerusakan tambak diperkirakan sudah pulih.

Sepanjang 2005-07, dukungan sudah diberikan kepada *usaha* kecil melalui bantuan langsung serta pinjaman yang dapat diperoleh melalui lembaga kredit mikro. Pada akhir 2007, sudah lebih dari 80.000 penerima manfaat telah memperoleh bantuan dari 77.316 yang telah direncanakan. Fokus 2008, diarahkan untuk merangsang industri sekunder melalui dukungan program-program yang menjangkau ke luar melalui *Investor Outreach Office*, Klinik Kemasan dan Merk, *Aceh Micro-Finance*, serta pembangunan gedung sarana promosi kerajinan tangan.

Pemulihan kehidupan masyarakat menjangkaui tujuan fisik dan nonfisik, yang di dalamnya antara lain mencakup **pendidikan, kesehatan, peran perempuan,** serta **agama dan sosial-budaya.** Total sebanyak 21,3 persen—ketiga terbesar setelah prasarana dan perumahan—telah dialokasikan untuk sektor ini.

Pada Pemulihan sektor *pendidikan*, hampir 900 sekolah-baru selesai dibangun pada akhir 2007 berikut sarananya. Tambahan 4 sekolah menengah umum akan rampung tahun ini. Sejumlah 35.000 tenaga pendidik dan anak didik pilihan telah dibeasiswai. Fokus tahun ini diarahkan pada kesinambungan sistem pendidikan melalui penguatan institusi tersier. Pada tahun ini pula, telah diprogramkan pembangunan 3.000-an unit rumah bagi para dosen serta renovasi lingkungan kampus. Pembangunan sekolah internasional juga akan diselesaikan sebelum 2008 berakhir.

Perkembangan signifikan ditorehkan oleh sektor *kesehatan* yang mayoritas pekerjaan utamanya sudah dituntaskan pada 2007. Bidang tersisa yang masih membutuhkan bantuan pada tahun ini adalah pengadaan peralatan, pelatihan, dan sanitasi. Sebanyak 15 unit peralatan medis dibeli tahun ini, yang jika ditotal, berarti akan terdapat 47 unit—melebihi 32 unit dari asesmen kebutuhan semula—yang akan disediakan di rumah sakit (RS) se-Aceh-Nias. Dari sebanyak 156 paket beasiswa kesehatan, telah dikucurkan lebih dari 256 paket; 21 paket pada tahun ini. Sebanyak 18 RS selesai dibangun pada akhir 2007. Pada 2008, ada penambahan 3 RS dan 4 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta pengoperasian kembali 33 puskesmas pembantu.

Untuk meningkatkan *peran perempuan* dan anak-anak, pada 2007, sebanyak 43 pusat kegiatan perempuan didirikan di se-Aceh-Nias. Fasilitas tersebut menyediakan sejumlah layanan terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan). Pada 2008, tiga program ditambahkan untuk memberikan dukungan khusus berkenaan dengan

pendampingan hukum bagi perempuan dan anak. Telah disalurkan dukungan modal awal bagi 14.000-an kelompok perempuan yang sudah dimulai sejak awal 2005 hingga 2007, bantuan keuangan bagi 2.000-an kelompok perempuan perajin, serta 600-an program pelatihan keterampilan. Upaya ini, pada gilirannya akan membangun fondasi yang lebih kokoh bagi perkembangan desa dan masyarakat.

Capaian pembangunan sarana *keagamaan* masih di bawah asesmen-kebutuhan awal. Hal tersebut karena didasarkan atas asesmen yang telah direvisi. Asesmen terbaru menunjukkan bahwa 1.533 mesjid dan 1.062 meunasah di Aceh memerlukan bantuan. Sebanyak 315 mesjid, 138 meunasah, dan 16 dayah yang sedang direkonstruksi, diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Adapun dukungan pemulihan *sosial-budaya* telah diberikan sejak program Pemulihan dimulai. Mayoritas proyeknya dimulai pada 2005-06, tatkala masyarakat banyak membutuhkan.

Tata-Kelola

Begitu tanggap-darurat beralih ke rehabilitasi-rekonstruksi, penatakelolaan pekerjaan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, kerangka kerja tertentu yang lebih fleksibel semakin dibutuhkan untuk menjawab dan mempertautkan kompleksitas dinamika di lapangan. Kerangka kerja tersebut meliputi antara lain prakarsa, koordinasi, pengelolaan informasi, serta pencegahan penyelewengan.

PRAKARSA

Dari pengalaman selama Pemulihan, dapat dipetik satu pelajaran penting bahwa kunci utama dari pengelolaan pascabencana adalah ketanggapan bersuasana darurat (*emergency mood*). Pada tingkat teratas, ketanggapan itu berada di tangan BRR, dan para mitra (Donor/NGO dan pemangku kepentingan serta penerima manfaat pun dapat merasakan.

Apapun kendala yang ada, semangat semacam itu dicoba untuk bukan diimplementasikan pada ranah pencegahan penyelewengan semata, melainkan juga di segenap lini kegiatan sektoral, lintassektoral, maupun wilayah. Ranah tersebut antara lain adalah penataan koordinasi dan pengelolaan informasi.

KOORDINASI

Semua pihak semakin memahami bahwa, di atas kertas, koordinasi memang relatif lebih mudah dibicarakan, namun oleh besarnya skala program dan jumlah pelaku, realisasinya terbukti tidak semudah itu. Oleh karena itu, menimbang pengalaman selama 2005 hingga medio 2008, dan demi membuka kesempatan lebih besar bagi elemen lokal, ada banyak dorongan untuk memutar haluan koordinasi.

Haluan koordinasi yang dimaksud adalah, dari yang sekadar berbagi informasi, menjadi menyusun langkah-langkah strategis bersama yang serealistis mungkin. Selain Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias (Coordination Forum for Aceh and Nias,CFAN), Pertemuan Pemangku-kepentingan Kepulauan Nias (Nias Islands Stakeholder Meeting, NISM), atau Tim Terpadu, diciptakan pula kepemimpinan di tingkat daerah/regional, antara lain melalui pengimplementasian sekretariat bersama (Sekber) dan regionalisasi.

PENGELOLAAN INFORMASI

Terkait informasi, kebutuhan yang semakin mendesak saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sistem data untuk menyediakan tinjauan umum mengenai Pemulihan secara konsisten, baik yang *on-* maupun *off-budget*, di samping untuk mengidentifikasi berbagai kesenjangan yang masih laten. Mekanisme pelaporan internal dan Pangkalan-data Pemulihan Aceh-Nias (Recovery Aceh-Nias Database, RANdatabase) yang telah dilakukan hingga kini, dengan demikian, telah melengkapi upaya-upaya BRR untuk mengatasi hal tersebut.

Tonggak penting juga terlihat dari dukungan Pusat Informasi Geospasial dan Pemetaan (Spatial Information and Mapping Centre, SIM-C) BRR bagi pengembangan kapasitas SDM Pemda. Olehnya,

telah berdiri Pusat Data Geospasial Aceh (Aceh Geospatial Data Center, AGDC) yang kini telah melekat di Bappeda Aceh. Banyaknya aset rekonstruksi, perlu dikumpulkan dan dicatat agar diketahui persis letak dan wujudnya. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi pangkalan-data Sistem Informasi Geospasial (Geospatial Information System, GIS). Pusat Data dan Informasi BRR tengah melakukannya untuk mencatat seluruh rumah hasil Pemulihan se-Aceh-Nias. Dari 112.000 rumah, sudah 100.000-an yang tercatat dalam GIS.

Selain itu, Badan PBB mengenai Koordinasi Pemulihan (United Nations Office of the Recovery Coordinator, UNORC), kini telah meluncurkan pangkalan-data *AcehInfo* (www.acehinfo.nad.go.id). Melaluinya, disajikan indikator-indikator kualitas pembangunan manusia, terutama yang terkait Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) 2015. Di dalamnya, terdapat 270 indikator dengan lebih dari 75.000 titik data. Sumber data yang digunakan adalah dari Badan Pusat Statistik, dinas-dinas Pemerintah, BRR, K/L, dan lain-lain. UNORC juga telah berkomitmen bahwa kelak, *AcehInfo* akan diserahkan penuh pemanfaatannya kepada Pemda Aceh.

PENCEGAHAN PENYELEWENGAN

Pemberantasan tindak korupsi adalah isu penting dalam program Pemulihan. Disadari, tidak ada jaminan bahwa di setiap lini dapat terhindar dari praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN). Namun yang harus dan telah dipastikan adalah, setiap pihak yang terbukti terlibat dan memperkaya diri, diproses.

Salah satu unsur penting dalam isu antikorupsi adalah Satuan Anti-Korupsi BRR. Instansi vertikal pun mendukung pelaksanaan *clean government*. Sudah sejak awal 2006 Badan Pemeriksa Keuangan membuka kantor perwakilannya di Aceh untuk melakukan audit dan pemeriksaan terpisah terhadap berbagai organ BRR. Komitmen anti-KKN tersebut secara tak langsung telah meningkatkan kepercayaan masyarakat luas pada proses Pemulihan. Dari total AS$7,2 juta *pledge* Donor yang dikucurkan, hingga saat ini, AS$6,7 juta atau sekitar 91 persen telah berstatus komitmen. Artinya, level kepercayaan masyarakat internasional terhadap penanganan Pemulihan Aceh-Nias sangat meyakinkan.

STRATEGI

Rencana Induk Pemulihan Aceh-Nias telah mengamanahkan dua kebijakan yang sebenarnya mempersiapkan bantalan rel bagi pembangunan berkesinambungan. Dua kebijakan tersebut adalah pembentukan BRR dan pembangunan berbasis-masyarakat. Satu kebijakan lagi yang dilaksanakan belakangan adalah pembangunan berbasis-wilayah.

PEMBANGUNAN BERBASIS-MASYARAKAT

Dalam kondisi abnormal pascabencana, masyarakat berharap sentuhan program-program berdampak cepat. Namun harus diakui, keberharapan itu menyurut drastis manakala mereka dihadapkan pada program-program berprespektif "pembangunan yang dikemudikan masyarakat (*community-driven development*, CDD)". Di Aceh-Nias, implementasi CDD menjadi berlipat tantangannya.

Salah satu pintu masuk untuk mengetahui capaian dan hikmah-ajar dari CDD adalah melalui peran fasilitator. Dedikasi para fasilitator telah menjadi inspirasi yang bagus bagi kajian lebih mendalam tentang praktik CDD di kawasan pascabencana.

PEMBANGUNAN BERBASIS-WILAYAH

Terutama oleh karakter geografis dan sosial-kemasyarakatan di Aceh-Nias, desentralisasi semakin menawarkan pilihan yang cukup aktual dan strategis. Melaluinya, SDM setempat diberi kesempatan untuk lebih berperan dalam proses Pemulihan. Secara bertahap, Kantor Pusat BRR di Banda Aceh tak lagi memegang kendali program, melainkan, sesuai prinsip

desentralisasi, mendelegasikan kewenangannya ke masing-masing kantor perwakilan yang hingga kini telah dua tahun bekerja.

Selain pembangunan ranah fisik, banyak pula yang tergarap secara simultan dalam konteks regionalisasi. Pemerkuatan peran Pemda melalui forum Sekber BRR-Pemda serta perekrutan pegawai negeri sipil ke dalam satuan kerja (Satker) wilayah/sektoral, telah menyumbang kontribusi yang bermakna bagi proses Pemulihan.

PEMBANGUNAN TERSINAMBUNGKAN

Tsunami telah memungkinkan dihentikannya pertikaian puluhan tahun di Aceh. Dan gempa, telah membuat Nias dilirik kembali eksistensi dan pembangunannya. Segera setelah modal fisik pascabencana merosot, subsitusi lewat investasi modal SDM, berlangsung. Pemda di Aceh-Nias segera bertransformasi untuk menggerakkan kembali pembangunan yang berkesinambungan.

Pemampuan Kapasitas

Sebagai langkah nyata untuk membenahi diri dari dalam, Pemda Aceh telah melakukan reorganisasi besar-besaran pada struktur dinas tingkat provinsinya. BRR sendiri gencar menyelesaikan alih aset hasil Pemulihan demi mendukung kesiapan Pemda. BRR juga telah mencanangkan strategi Pengakhiran Masa Tugas. Strategi yang dimaksud, bukan hanya mencakup pengalihan aset/sistem, dokumen, pendanaan, proyek, namun juga SDM. Secara simultan, berbagai lembaga Donor juga telah menjalankan program penguatan kelembagaan daerah.

Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 1.000 kantor telah dibenahi. Program rekrutmen pegawai dan perampingan struktur organisasi telah dilaksanakan. Sejumlah fasilitator dan ahli dilibatkan untuk membantu pengembangan peraturan daerah dan perencanaan strategis. Pemerintah Aceh, selain telah berhasil menyusun Program Legislasi Aceh 2007-12—manakala belum banyak provinsi lain melakukannya—juga berinisiatif memasukkan isu transisi Pemulihan pascakonflik maupun pascatsunami sebagai bagian dari misi pemampuan kapasitasnya.

Alih Pengetahuan

Kekhawatiran bahwa alih pengetahuan kurang tergarap, sedikit-banyak mulai terkikis. Di Aceh, misalnya, hampir 70 persen Satker yang bertugas di berbagai proyek BRR adalah aparatur Pemda. Ditambah dengan tenaga lokal yang bekerja di NGO, jumlah mereka cukup signifikan dan terlatih.

Terkait relasi kerja dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan kantor perwakilan dan distrik BRR, Sekber juga memiliki posisi strategis sebagai wahana alih pengetahuan. Hal itu ditunjukkan misalnya ketika berkontribusi dalam pengelolaan RANdatabase, perencanaan tingkat kabupaten dan kecamatan, pengendalian dan monev program, serta memperkuat hubungan antarpemangku kepentingan lainnya. Pada saat bersamaan, UNORC tengah menggodog sebuah prakarsa untuk lebih menstimulasi penyebaran praktif-praktif terbaik yang didapatkan selama proses Pemulihan melalui Pertukaran Solusi Aceh dan Nias (Solution Exchange Aceh and Nias).

Tumbuhnya Perekonomian

Sejumlah analis dan pengamat ekonomi, pada penghujung Januari 2008, pernah menyatakan bahwa, ekonomi Aceh disinyalir terpuruk menuju kebangkrutan, apalagi angka inflasi dan Indeks Harga Konsumen di Aceh termasuk tinggi di Indonesia. Namun pada semester pertama 2008, untuk pertama kalinya dalam sekian tahun terakhir, inflasi di Banda Aceh dan Lhokseumawe menyentuh angka 0,25 dan 0,46 persen. Besaran ini cukup signifikan, mengingat, ekonomi di Aceh banyak ditopang oleh *booming* proyek-proyek rekonstruksi dan inflasi nasional sebesar 1,37 persen. Laju inflasi tahun kalender 2008 (Januari-Juli) di kedua kota tersebut masing-masing sebesar 7,57 dan 7,86 persen berada di bawah tingkat

laju inflasi nasional (8,85 persen). Laju inflasi *y-on-y* pada Juli 2008 juga di bawah nasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Satu hal yang tak bisa ditampik, bagaimanapun dinamisnya aneka lapangan usaha yang ada, tapi dari komposisi PDRB Aceh-Nias terlihat bahwa pertanian adalah sektor yang paling besar kontribusinya. Artinya, sistem perekonomian Aceh, dan terutama Nias, masih cenderung subsisten karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ini. Oleh karena itu, telah menjadi tantangan bagi Aceh-Nias untuk secara kreatif-inovatif mendorong sektor nonpertanian atau selain migas, seperti industri manufaktur, agroindustri, jasa, dan sektor ekonomi lainnya yang potensial.

Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction,* DRR) telah menjadi isu lintassektoral sejak CFAN kedua yang kemudian mendorong terbentuknya Kelompok Kerja DRR. Di Nias, dalam perkembangan terakhir, isu ini semakin dipertajam dalam forum NISM keempat. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa, bencana memang tidak sanggup dihindari, tapi tidak untuk mengurangi risiko dan jumlah korbannya.

Kelompok Kerja DRR mendorong kesinambungan program Pemulihan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek DRR. Bangunan penyelamatan yang telah dibangun di sejumlah kawasan, adalah salah satu prakarsanya. Selain itu juga telah dibangun sistem peringatan dini tsunami, simulasi bencana dan latihan evakuasi tsunami (*tsunami drill*), serta kajian mikrozonasi untuk mengidentifikasi zona rawan bencana maupun bahaya-ikutannya (*collateral hazard*). Ini penting sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah pada masa mendatang

Dampak-Ikutan

Upaya Pemulihan, beserta segenap dinamika, tantangan, dan kendalanya, telah menjadi instrumen penghantar bagi tumbuhnya aspek dan pihak lain di sekitarnya. Masyarakat, terutama para penyintas, semakin tergugah ketika melihat bahwa sarana-prasarana publik untuk mencari nafkah sudah banyak terbangun, bahkan tak sedikit yang lebih bagus ketimbang semula. Pemda pun semakin tersiapkan jumlah dan mutunya.

SEKTOR PUBLIK

Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, merespons hasil Pemulihan dengan menerbitkan sejumlah kebijakan. Adapun untuk memastikan kesinambungan pembangunan kelak, Pemerintah menerbitkan payung hukum yang di dalamnya, diatur mekanisme pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta anggarannya.

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah mendekati Aceh dan Nias atas dasar perbedaan karakteristiknya, baik dari konteks sosial, ekonomi, budaya, kapasitas Pemda, maupun anggaran pembangunan. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Pemerintah lebih memilih pendekatan kebijakan yang berorientasi kewilayahan ketimbang fungsional; atau dengan kata lain, lebih desentralisatif ketimbang sentralisatif.

Bagi kalangan K/L, capaian Pemulihan oleh BRR dan Mitra, telah ditangkap sebagai momentum untuk memantapkan peran masing-masing. Pemda dituntut kapasitasnya sebagai fasilitator bagi terselenggaranya kembali interaksi kehidupan dalam seluruh aspek. Segenap pihak semakin menyadari bahwa, apabila aspek-aspek pemerintahan daerah belum siap, kerja keras membangun Aceh-Nias menjadi kurang berarti.

Pengelolaan Aset

Telah dirasa mendesak kebutuhan akan sebuah pengelolaan aset yang khusus dan cepat

namun memiliki pencatatan, pelaporan, serta pendokumentasian kepemilikan yang valid dan akurat. Aset kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi berasal dari kegiatan yang didanai melalui skema *on-* maupun *off-budget*. Inti dari pengelolaan aset terdapat pada kegiatan inventarisasi yang bertujuan memperoleh gambaran nyata tentang kondisi dan pemanfaatannya. Hasil identifikasi awal pada penghujung 2006 saja, berdasarkan realisasi anggaran/DIPA, telah terdata sejumlah aset tetap senilai Rp3 trilyun.

Menjawab tantangan penyelesaian tugas yang kompleks, Pusat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR (sebelumnya bernama "Direktorat Manajemen Aset") telah menyiapkan proses pengelolaan aset agar terselenggara lancar dan sesuai aturan. Antara lain dengan membangun Prosedur Pengoperasian Standar dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas). Simas pada prinsipnya menyempurnakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara yang sudah umum berlaku bagi K/L, maupun Sistem Manajemen Barang Daerah di tingkat Pemda.

Secara umum, saat ini total nilai aset hasil Pemulihan Aceh-Nias telah mencapai Rp14,49 trilyun atau 73 persen dari total realisasi anggaran sampai dengan semester pertama 2008. Masing-masing mencakup Rp4,56 trilyun aset masyarakat (rumah) dan Rp9,94 trilyun aset publik (gedung, jalan, peralatan mesin, dan lain-lain).

Dari total aset publik ini, Rp5,73 trilyun merupakan aset tetap definitif. Dari aset yang definitif ini, Rp4,61 trilyun telah diinventarisasi. Dan dari yang telah diinventarisasi, Rp1,57 trilyun sudah diserahterimakan secara formal. Selebihnya, diserahterimakan operasinya dan telah dimanfaatkan oleh penerimanya. Sebagai tambahan, arsip-arsip selama Pemulihan Aceh-Nias berlangsung, saat ini sedang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Penyelamatannya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BRR terhadap Mitra serta masyarakat yang telah membantu Pemulihan Aceh-Nias.

Penyiapan Payung Hukum

Dari waktu ke waktu, dinamika dan realita di lapangan berkembang. Pada kondisi tertentu, terdapat perbedaan penafsiran terhadap apa yang telah dituangkan dalam Rencana Induk. Hal itu menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan Rencana Induk dengan kondisi nyata di lapangan. Lebih jauh, ketidaksesuaian itu berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di tingkat Pemerintah Pusat atau K/L, terutama terkait tugas yang diembannya selaku penyinambung Pemulihan di Aceh-Nias.

Atas pertimbangan dinamika lingkungan strategis yang ada dan evaluasi yang cermat, maka dipandang mendesak untuk melakukan pengubahsesuaian pada strategi, skala prioritas, sasaran, dan terutama menguatkan payung hukum pelaksanaannya. Pengubahsesuaian yang dimaksud bukan berarti hanya sinkronisasi, tapi juga mengurangi dan menambah, sejauh dinilai perlu, efektif, dan efisien. Pengubahsesuaian Rencana Induk dipandang urgen untuk memastikan bahwa Pemulihan Aceh-Nias saat ini berada pada jalurnya yang tepat, dan seluruh kegiatan difokuskan pada mandat yang telah digariskan. Lebih jauh, upaya tersebut penting untuk memperkokoh proses transisi dan penyinambungannya ke fase pembangunan normal.

Peraturan Presiden Nomor 38/2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2009, terutama pada Lampiran II.33, semakin memperkuatnya. Dengan demikian, perihal payung hukum pembangunan-kembali beserta tupoksi para pemangku kepentingannnya saat ini relatif sudah tersiapkan. Capaian pekerjaan Pemulihan Aceh-Nias tidak tutup-buku pada pasca-BRR, melainkan akan terus berlanjut.

SEKTOR PRIVAT

Salah satu tantangan utama pembangunan-kembali Aceh-Nias adalah membenahi kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik mensyaratkan adanya keterjaminan pada aspek mata pencaharian, kebutuhan dasar, serta perdamaian.

Mata Pencaharian

Pada sektor **perikanan**, pelabuhan perikanan, dermaga, pelabuhan, dan prasarana perikanan lainnya yang rusak, telah banyak yang dibenahi; begitu pula dengan kerusakan muara sungai sebagai tempat keluar-masuknya kapal. Kawasan-kawasan pedalaman digali potensinya untuk budidaya ikan air tawar. Telah direhabilitasi 53 unit pemijahan skala rumah tangga, 17.000-an hektar tambak, serta 190-an bagan apung dan 80-an keramba jaring apung. Pemulihan aset-aset produktif perikanan telah mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan bagi ribuan masyarakat (terutama warga pesisir), dan berkontribusi terhadap PDRB.

Baik di Aceh maupun Nias, **pertanian** menjadi sektor tumpuan hidup bagi banyak keluarga, karena secara umum, perekonomian kedua daerah itu berstruktur agraris dan memiliki *Capital-Output-Ratio* rendah. Selain itu, ia berdampak dalam mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan sumber pendapatan, devisa, maupun PDRB. Kesempatan petani untuk langsung bersentuhan dengan informasi dan orang luar yang semakin terbuka, secara serempak dapat mengurangi ketertinggalan dan kemiskinan. Ke depan, sejalan dengan semakin meluasnya desakan akan pentingnya hak domestik dan publik perempuan, upaya tersebut telah menyediakan diri bagi lahirnya prakarsa-prakarsa yang lebih menjanjikan dan berkesinambungan.

Peranan **peternakan** pada pascatsunami terus meningkat karena bisnis komoditas ini selalu prospektif. Sektor ini amat strategis dalam mendukung stabilitas pertumbuhan wilayah, karena merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable*), elastis, serta menjadi komponen penting PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat kecil, dan penutup kesenjangan pendapatan. Kesempatan yang terbuka akibat elastisitasnya meliputi agribisnis hulu dan hilir, budidaya, serta kegiatan jasa terkait, seperti transportasi, perbankan, dan informasi. Perkembangannya yang pesat, juga telah menyediakan momentum yang tepat dalam rangka memampukan kapasitas SDM sektor peternakan.

Kebutuhan Dasar

Secara umum, kondisi **pendidikan** di Aceh-Nias berubah total sejak pascabencana. Bukan hanya sosial-budaya yang disentuh oleh sektor pendidikan, namun juga sosial-ekonomi. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas lagi, maka semakin mantapnya indeks kualitas pendidikan masyarakat, berandil besar terhadap kemajuan sosial-ekonomi suatu kawasan. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, kualitas SDM-nya cenderung semakin baik. Di Aceh, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, masih ada sejumlah kendala, antara lain dalam hal kurikulum dan penetapan kuota perimbangan kesempatan pendidikan.

Sektor **kesehatan** tak luput dari pola penanganan yang desentralisatif. Angka Harapan Hidup di Aceh-Nias meningkat. Peningkatan ini telah menjadi kebanggaan bersama, seiring dengan sarana-prasarana kesehatan di Aceh-Nias yang saat ini semakin membaik. Sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan dan tuntutan masyarakat, tingkat ketersediaannya terus dipacu agar terimbangi dengan pelayanan kesehatan yang prima. Upaya-upaya positif untuk menguatkan komitmen meningkatkan mutu kesehatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, semakin terlihat. Hal itu direalisasikan dengan mengelaborasi potensi elemen-elemennya, seperti tenaga medis, prasarana, serta kualitas proses pelayanan kesehatan.

Perdamaian dan Rekonstruksi

Terkait relevansinya dengan dinamika mutakhir, perdamaian dan reintegrasi telah ditempatkan sebagai bahan pertimbangan penting sekaligus tantangan bagi koordinasi dan implementasi Pemulihan pascatsunami. Rekonstruksi adalah bagian dari proses

reintegrasi itu sendiri. Reintegrasi akan lebih mudah dicapai jika masyarakat merasakan adanya urusan publik yang semakin terlayani dan urusan privat yang semakin terjamin.

Tantangan utama yang pada dasarnya merupakan arsiran antara rekonstruksi dan reintegrasi adalah pemulihan pemberdayaan ekonomi. Untuk itu, menyelenggarakan kegiatan Pemulihan pascatsunami melalui "pembangunan berbasis reintegrasi dan perdamaian", dipercaya akan menyediakan dukungan yang lebih bermakna. Pada arsiran itulah, kegiatan rekonstruksi, secara tak langsung telah menyediakan diri guna memungkinkan masyarakat melihat masalah yang mereka hadapi bukan semata-mata dari kaca mata politik, namun juga ekonomi dan sosial. Peran Pemda, bagi keberhasilan pengombinasian kedua program tersebut, oleh karenanya menjadi penting.

KELUARAN

Waduk Keliling. Aceh Besar telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi di Aceh. Namun ironisnya, hingga kini, sekitar 70 persen areal persawahan milik petani padi di Kabupaten Aceh Besar ternyata masih belum memiliki sarana irigasi teknis. Manakala musim tanam tiba, areal persawahan tersebut mengandalkan air hujan. Jika hujan tidak turun berkepanjangan, akan kekeringan, sehingga panenan tak seperti yang diharapkan. Untuk itulah Waduk Keliling, Keumireu, Aceh Besar, ini dibangun. Gambar diambil pada 23 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

KELUARAN

Prioritas Pemulihan Aceh-Nias pada 2008 terbagi menjadi dua. *Pertama,* penuntasan proyek sesuai Rencana Induk beserta tinjauan yang dilakukan atasnya pada Juni 2007, yakni pada Tinjauan Paruh-waktu (*Mid-term Review,* MTR). *Kedua,* implementasi program transisi yang memungkinkan pemerintah lokal dan nasional menyinambungkan pembangunan.

Dalam rangka mencapai prioritas ini, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR) telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp10,8 trilyun (±AS$1,2 milyar). Selain itu, dilakukan pula peningkatan monev pada seluruh kantor perwakilan BRR. Kemajuan dalam semester pertama 2008 cukup signifikan meskipun terkendala beberapa proyek yang masih belum beres.

Prioritas

Sepanjang tahun ketiga dan terakhir (April 2008 - April 2009) masa tugas BRR ini merupakan tahun kritis dalam keseluruhan durasi pelaksanaan program Pemulihan. Adalah penting bahwa pada tahun terakhir keseluruhan kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi diakhiri dengan sukses. Dan yang lebih penting lagi, mengupayakan agar seluruh capaian program Pemulihan dapat berfungsi, beroperasi, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, prioritas 2008 didesain untuk mempersiapkan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar dapat mengambil-alih tanggung jawab dan memulai kembali pembangunan di atas capaian program Pemulihan.

Saat ini, BRR telah mengelola ribuan paket proyek dan terus melakukan koordinasi terhadap para Mitra Pemulihan, baik nasional maupun internasional. Proyek yang berskala luas dan berjangka panjang, sudah dimulai sejak 2006-07. Sedangkan proyek-proyek yang berjangka pendek, strategis, dan bersifat pendukung, baru dimulai pada 2008.

Dalam hal penuntasan program pada 2008, penekanan ditumpukan pada proyek utama 2007 yang belum rampung atau belum optimal. Proyek termaksud antara lain pembangunan Bandar Udara (Bandara) Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya (Kabupaten Aceh Besar), prasarana pemerintahan, pembangunan sempadan sungai dan pantai, serta sejumlah proyek yang didesain tahun jamak.

Sebagai koordinator utama Pemulihan, pada semester pertama 2008, BRR menyiapkan anggaran pendukung, keahlian teknis, dan—jika diperlukan—dukungan administratif. Hal tersebut dilakukan demi menjamin keberhasilan implementasi program, antara lain melalui Sarana Pendanaan Rekonstruksi Prasarana *(Infrastructure Reconstruction Financing Facilitiy,* IRFF*),* Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB), Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank, IDB), dan sebagainya.

Penekanan kegiatan pada awal 2008, diletakkan pada penuntasan program strategis atau kritis, termasuk penyelesaian isu-isu terkait perumahan dan pengungsi, serta pembangunan prasarana besar dan strategis yang tidak didukung dengan hibah maupun pinjaman luar negeri. Penekanan juga diberikan pada proyek perluasan pelabuhan dan pasar ikan dalam rangka pembangunan ekonomi berjangka panjang, serta pembangunan prasarana air dan sanitasi, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka merangsang lebih lanjut sektor ekonomi, sejumlah program berdaya-hasil cepat sedang dipacu tahun ini. Program tersebut terkonsentrasi pada kawasan tempat masyarakat dapat menuai keuntungan secara cepat, seperti perbaikan pelayanan irigasi di sentra-sentra penghasil padi, dan optimalisasi air bersih, khususnya pada wilayah yang berpotensi terkontaminasi air laut.

Pengimplementasian kebijakan dan strategi memungkinkan periode transisi ini, baik pengelolaan, operasionalisasi, dan pemeliharaan aset yang dibangun selama Pemulihan dapat diserahterimakan kepada Pemda dan masyarakat Aceh-Nias.

Under construction. Selama penanganan pascatsunami, Bandara Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Aceh Besar, frekuensi pendaratannya rata-rata 130 kali per hari—jauh di atas kemampuan perencanaan konstruksinya. Oleh sebab itu, perlu direhabilitasi. Pada 2008, dilakukan perluasan apron dan landskip sisi darat oleh BRR. Apronnya, kelak mampu menampung hingga 12 unit pesawat berbagai ukuran hingga sebesar Boeing-747 atau pesawat kargo barang terbesar di dunia sejenis Antonov. Tampak depan salah satu sudut bandara, 11 Oktober 2008. BRR/Arif Ariadi

Implementasi periode transisi dari BRR ke Pemda setempat mencakup beberapa tahap. *Pertama,* melakukan upaya agar keluaran program Pemulihan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, diakui, dan siap dialihkan. *Kedua,* mengalihkan administrasi proyek. *Ketiga*, meningkatkan kapasitas pengelolaan dan administratif pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota.

Inventarisasi aset *on-budget* sudah dirintis sejak 2007. Proses ini semakin intensif dengan memasukkan pula aset *off-budget* pada sepanjang paruh pertama 2008. Sebagai dukungan terhadap persyaratan hukum persiapan inventarisasi aset hasil proyek Pemulihan, sangat diharapkan bahwa sistem pengelolaan aset akan meningkatkan kemampuan Pemda dalam memelihara dan menyinambungkannya. Terkait tujuan inilah BRR membangun Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas).

Pada 2008 pula, atas dukungan Australian Aid (AusAid), Simas diperkaya dengan informasi-informasi geospasial. Sebetulnya, awal gagasan membangun Simas ini berangkat dari prakarsa BRR. Belakangan, baru AusAid memberikan dukungan untuk kebutuhan nonperumahan.

Sudah menjadi kebijakan Pemerintah bahwa kendati proyek BRR harus tuntas tahun ini, namun sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 2/2005, pasal 26: 3, namun proses rehabilitasi-rekonstruksi untuk seterusnya menjadi tanggung jawab Pemda dan K/L. Dalam rangka memperkuat kebijakan ini, monitoring dan evaluasi (monev) proyek terus dilakukan secara intensif. Jika terindikasi adanya ketidakberesan, proyek akan didesain-ulang untuk menjamin ketertuntasannya pada tahun ini.

Sisi Si Simas. BRR terus memacu proses serah-terima aset hasil Pemulihan kepada Pemda, K/L terkait, ataupun masyarakat penerima manfaat. Pada sisi pencatatan aset, peran Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas) BRR menempati salah satu posisi kunci, seperti yang terekam pada 29 Oktober 2008 ini. BRR/Arif Ariadi

Sebagaimana disebutkan, terdapat sejumlah proyek khusus berjangka panjang yang secara desain akan melampaui durasi masa tugas BRR. Ada juga kemungkinan terdapat proyek yang tak selesai karena isu kontrak atau kualitas. Proyek yang termasuk kriteria ini, tidak akan dialihkan ke Pemda maupun K/L.

Dalam keseluruhan kegiatan Pemulihan, penguatan Pemda dan pelayanan publik telah menjadi agenda utama lintassektoral. Sebagai tambahan dari dampak kehancuran fisik akibat bencana, efektifitas Pemda di Aceh juga menurun signifikan akibat konflik. Menjelang berakhirnya BRR, tujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemda dalam pengelolaan keuangan dan tanggungjawab operasional diintensifkan dengan prakarsa yang dilakukan pada paruh pertama 2008. Dampak penguatan kemampuan secara bertahap selama tiga tahun terakhir, membuat keterlibatan Pemda dalam proses Pemulihan semakin meningkat.

Sumberdaya

Berdasarkan prioritas khusus pada 2008, BRR melancarkan strategi dalam hal pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM)-nya. Strategi itu mencakup: (1) penggabungan anggaran 2008 BRR untuk menjamin ketersediaan dana dalam mencapai prioritas ini; (2) hal ini berarti, dilakukan reorganisasi tanggungjawab divisi khusus dalam struktur BRR yang memungkinkan stafnya memfokuskan diri pada kebutuhan Pemulihan utama pada 2008; dan sebagai akibatnya, terdapat penambahan kapasitas dan aktivitas di kantor perwakilan BRR untuk meningkatkan peran dan partisipasi Pemda setempat.

Seatap untuk kesejahteraan. Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial Pemerintah Elektronik atau Sitkessos-E kini telah menjadi salah satu koordinasi satu atap antara BRR dan Pemerintah Aceh mengenai penanganan kesejahteraan sosial. Tampak depan Sitkessos-E terkait pada 24 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Pendanaan Pemulihan

Sejumlah Rp67 trilyun (AS$7,4 milyar) sudah dikomitmenkan untuk proses Pemulihan Aceh-Nias. Asesmen kerusakan dan kehilangan untuk proses Pemulihan Aceh saja (belum termasuk Nias) mencapai sekitar Rp40 trilyun (±AS$4,5 milyar). Sebaran kerusakan dan kehilangan itu meliputi 22 persen di sektor publik dan 78 persen di sektor privat. Prakiraan pendanaan yang diperhitungkan, bagaimanapun, tertuju pada kerusakan—rehabilitasi atau penggantian aset fisik—dan belum pada membangun-kembali wilayah, masyarakat, dan Pemda.

Melalui dukungan pendanaan Pemerintah untuk Pemulihan Aceh-Nias *(on-budget),* serta masyarakat nasional dan internasional melalui Donor *(off-budget),* program Pemulihan telah dapat dilanjutkan. Sebagaimana terlihat pada bagan di bawah, pendanaan *off-budget* telah

Bagan 1:
Komposisi Pendanaan Pemulihan Aceh-Nias yang sudah berstatus komitmen

on-treasury	*off-treasury*	
Pemerintah: Rp21 trilyun Donor : Rp8 trilyun	Donor: Rp3 trilyun	*on-budget*
	Donor: Rp35 trilyun	*off-budget*

Keterangan:

on-budget : tercatat dalam DIPA
off-budget : tidak tercatat dalam DIPA
on-treasury : dicairkan melalui KPPN-K
off-treasury : dicairkan secara langsung oleh Donor

mencapai komitmen sekitar Rp35 trilyun, dan realisasinya sekarang sudah mencapai sekitar Rp22,85 trilyun. Adapun melalui saluran *on-budget*, baik yang *on-* maupun *off-treasury*, termasuk di dalamnya berupa pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), tercatat komitmen sekitar Rp32 trilyun, dan realisasinya sekarang sudah mencapai sekitar Rp23 trilyun. Tentunya, ini merupakan capaian pendanaan yang amat menggembirakan.

Bagan 2 :

Alokasi pendanaan Pemulihan berdasarkan sektor

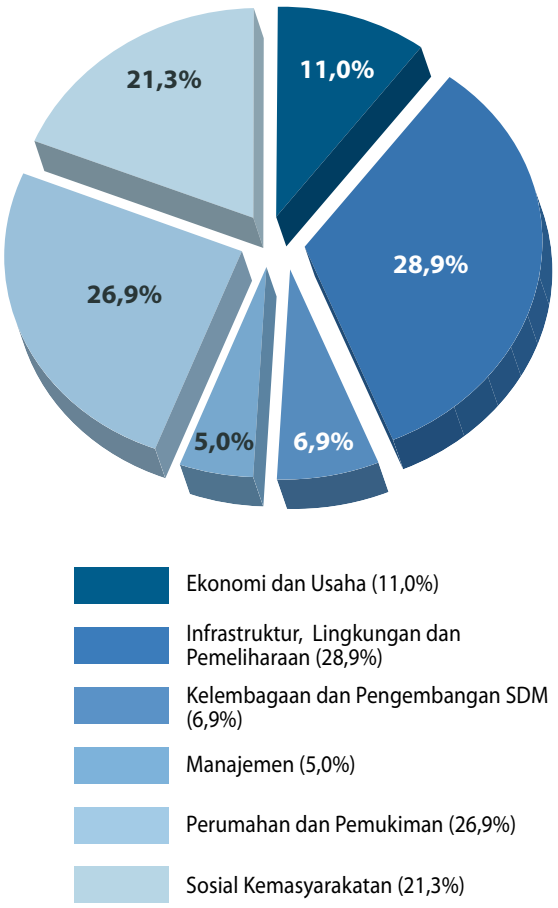

Dalam proses Pemulihan Aceh-Nias, terdapat dana *off-budget* yang disalurkan melalui Dana Multi-Donor (Multi-Donor Fund, MDF). Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti jalan, perumahan, sekolah, sarana air bersih, jembatan, dan juga tempat ibadah. MDF juga mencurahkan perhatian yang besar pada program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, penguatan institusi pemerintahan, serta pembangunan-kembali sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada akhir 2008 dan awal 2009, bersamaan dengan berakhirnya BRR, MDF berfokus pada program-program yang dapat mendukung proses transisi dari BRR ke Pemda.

Selain jalur pendanaan seperti melalui APBN, MDF, atau badan-badan multilateral (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, ADB, dan organisasi nonpemerintah [non-governmental organisation, NGO] lainnya), tak sedikit Donor yang ingin menyalurkan hibahnya melalui jalur lain. Kelebihan jalur kedua, donasinya dapat tersalur secara langsung, namun tetap profesional. Donornya ada yang berasal dari negara mitra, lembaga nonprofit, masyarakat, maupun peruntukan lain-lain. Untuk kebutuhan itulah *Trust Fund* Pemulihan Aceh-Nias (Recovery Aceh-Nias Trust Fund, RANTF) dibentuk.

Ada pula mekanisme penyaluran *on-budget* yang dilakukan melalui penghapusan utang luar negeri, atau lebih dikenal dengan *debt swap*. Melalui kesepakatan *debt swap* dengan Pemerintah Italia, misalnya, sejumlah utang luar negeri Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Italia akhirnya dihapus dengan mencatumkan sejumlah ketentuan. Utang itu sebenarnya merupakan bantuan bilateral pembangunan luar negeri *(official development assistance,* ODA) Pemerintah Italia kepada Indonesia sebagai hasil kesepakatan pada 4 Desember 2003.

Kotak 1:

Mutakhiran RANTF

RANTF dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana (Kabapel) BRR pada 4 Januari 2006 melalui Peraturan Kabapel Nomor 1/PER/BP-BRR/I/2006. Pada tanggal itu pula, dibentuk Komite *Trust Fund* (KTF) sebagai Pengelola RANTF. Komite beranggota gasal ini formasi pertamanya ditetapkan melalui Keputusan Kabapel Nomor 1/KEP/BP-BRR/I/2006. Adapun pedoman untuk memastikan bahwa semua prosedur operasional standar benar-benar dilaksanakan, diatur dalam Peraturan Kabapel Nomor 2/PER/BPBRR/ I/2006.

Mengingat dana yang dihimpun tidak ada yang bersumber dari APBN, maka RANTF menjadi entitas tersendiri yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) bagi setiap kegiatannya. LK RANTF, sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabiltas terhadap publik, diaudit oleh akuntan publik secara independen. Untuk masa tugas 2005-06 dan 2006-07, Pengelola RANTF telah menyerahkan seluruh LK-nya pada akuntan publik terpercaya Grant Thornton Hendrawinata (anggota dari Grant Thornton International). Dalam laporannya 28 Mei 2008, Grant Thornton Hendrawinata menyatakan, hasil audit LK RANTF adalah "wajar tanpa pengecualian".

Per Juni 2008, jumlah hibah yang telah Pengelola RANTF tangani mencapai Rp166 milyar. Masing-masing berasal dari:

Asal	Total (Rp milyar)	Persentase
negara mitra	127	77
perusahaan	21	13
lembaga non profit	4	2
masyarakat	4	2
peruntukan lain-lain	10	6
Total	***166***	***100***

Hibah di RANTF mencakup tiga skema. Melalui skema "terbuka", Pengelola RANTF diberi keleluasan menyalurkan hibah Donor. Dalam skema "fleksibel", Donor menentukan sebagian untuk apa dan di mana hibahnya (terutama pada proyek sektor) dialokasikan. Adapun pada skema "peruntukan tertentu", penentuan alokasi hibah, misalnya tentang sektor apa dan di mana lokasinya, sepenuhnya berada di tangan Donor; RANTF hanya menyetujui.

Skema	Total (Rp milyar)	Persentase
terbuka (*open*)	39	23
fleksibel *(Flexible)*	36	22
peruntukan tertentu *(earmarked)*	70	42
lain-lain	21	13
Total	***166***	***100***

Keseluruh Rp166 milyar hibah para Donor yang telah diamanahkan kepada Pengelola RANTF itu diimplementasikan ke dalam serangkaian proyek. Statusnya sebagai berikut:

Alokasi	Total (Rp)	Persentase
proyek selesai	88.080.151.094	52,96
proyek masih berlangsung	49.247.692.224	29,61
peruntukan lain-lain	28.996.665.296	17,43
Total	***166.324.508.614***	***100,00***

Beberapa program fisik RANTF di Aceh yang telah rampung antara lain pembangunan 1.123 unit rumah di Kabupaten Aceh Jaya dari bantuan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); rekonstruksi Mesjid Lam Nga, Kabupaten Aceh Besar; dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Gayo Luwes. Adapun yang di Kepulauan Nias, telah rampung diperbaiki sejumlah rumah ibadah. Masing-masing adalah, Gereja "Banua Niha Keriso Protestan Jemaat Johanes", Kabupaten Nias Selatan; Gereja Katolik "St. Fidelis", Paroki Maria Bintang Kejora, Kabupaten Nias; Masjid Jami' Lagundri, Kabupaten Nias Selatan; serta Vihara "Vimala Dharma Budha", Kabupaten Nias. RANTF terus memacu kegiatannya hingga tuntas pada limit masa tugasnya pada Desember 2008.

Kotak 2:

Debt Swap Pemerintah Italia

Pada 9 Maret 2005, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Italia menyepakati pelaksanaan program *debt swap*. Program yang berlimit hingga 24 Oktober 2010 ini menunjukkan progres positif dan peluang bagus bagi Indonesia untuk menghapuskan utangnya sebesar AS$24,2 juta dan €5,75 juta.

Terdapat dua progres yang telah dicapai program ini. Progres pertama ditandai oleh tercapainya kesepakatan pelaksanaan empat buah proyek pembangunan senilai Rp58.765.095.000 (atau €4.980.092) di Aceh dalam pertemuan Komite Pengelolaan-I pada Februari 2006. Keempat proyek yang selesai pada Tahun Anggaran (TA) 2006 dan sudah memperoleh persetujuan administratif penghapusan utang Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Italia ini mencakup:

- Rehabilitasi Sistem Kelistrikan NAD (Rp13.537.403.000);
- Proteksi Pantai Syiah Kuala sepanjang 4.350 meter (Rp17.861.154.000);
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional seksi-II di Lamno, Calang (Rp15.269.886.000);
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional Seksi-III di Lamno, Calang (Rp12.096.652.000).

Progres kedua, Indonesia telah mengajukan enam buah proyek di Aceh senilai Rp110.176.638.000 atau setara dengan €9.316.457,37 dalam pertemuan Komite Pengelolaan-II. Keenam proyek tersebut meliputi lima buah di sektor perikanan, pendidikan, kesehatan, prasarana yang dilaksanakan oleh BRR. Sedangkan satu proyek lagi, sektor kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI. Jenis proyek beserta alokasi anggarannya antara lain:

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Ikan Lampulo sesi-I (Rp35.389.800.000);
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Laboratorium Terpadu Unsyiah (Rp20.350.709.000);
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Sigli beserta Sarana Pendukungnya (Rp14.165.129.000);
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Lageun - Pante Kuyun (Krueng Padang) sepanjang 80 meter (Rp8.200.000.000);
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan di Pantai Barat sepanjang 3,8 kilometer yang mencakup Jalan Blang Beurandang, Jalan Beringin Maju, Jalan Beringin Jaya, dan Jalan Teungku Chik Ali Akbar (Rp6.271.000.000); serta,
- Program "Keluarga Harapan" - Program Bantuan untuk Keluarga Miskin (Rp25.800.000.000).

Komite Pengelolaan mengadakan proses seleksi, pemantauan, dan verifikasi hasil proyek pembangunan Anggotanya terdiri dari Duta Besar Pemerintah Italia di Indonesia, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksana.

Sumber: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI.

Alokasi APBN

Alokasi anggaran pada TA 2008 adalah sebesar Rp10,8 trilyun (±AS$1,2 milyar) yang merupakan kombinasi dari dua skema Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA Murni Rp7 trilyun (±AS$778 juta) serta DIPA Luncuran Rp3,8 trilyun. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (Rp6,57 trilyun), Pinjaman Luar Negeri (Rp482,16 milyar), Hibah (Rp3,2 trilyun), serta Rupiah Murni Pendamping (Rp633,77 milyar).

Atas amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2/2005, sebagian besar penyaluran dana Pemulihan yang tercatat dalam DIPA *(on-budget on-treasury)* dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara-Khusus (KPPN-K) di Banda Aceh. KPPN-K termaksud dibentuk oleh Departemen Keuangan.

Kebijakan pengalokasian anggaran DIPA Murni 2008 (Rp7 trilyun) diarahkan dalam tiga saluran prinsip, yakni:

- sebesar 84,11 persen atau sekitar Rp5,9 trilyun (±AS$654 juta) untuk peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah Aceh-Nias;
- sebesar 10,89 persen atau sekitar Rp762 milyar (±AS$85 juta) untuk penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pemerintahan, dan transisi pembangunan Aceh-Nias;
- sebesar 5 persen atau sekitar Rp350 milyar (±AS$39juta) untuk program penyelenggaraan pimpinan, kenegaraan, dan kepemerintahan.

Apabila ditinjau dari perspektif besaran anggaran yang didistribusikan untuk Aceh dan Nias, maka dari total anggaran TA 2008 (Rp10,8 trilyun) yang tersedia, Aceh mendapatkan bagian Rp9,6 trilyun (±AS$1 milyar) dan Nias Rp1,2 trilyun (±AS$143 juta).

Adapun jika ditinjau dari perspektif sektoral, pendistribusiannya dapat disimak pada diagram berikut:

Bagan 3:
Alokasi anggaran BRR 2008 berdasarkan sektor (dalam prosentase)

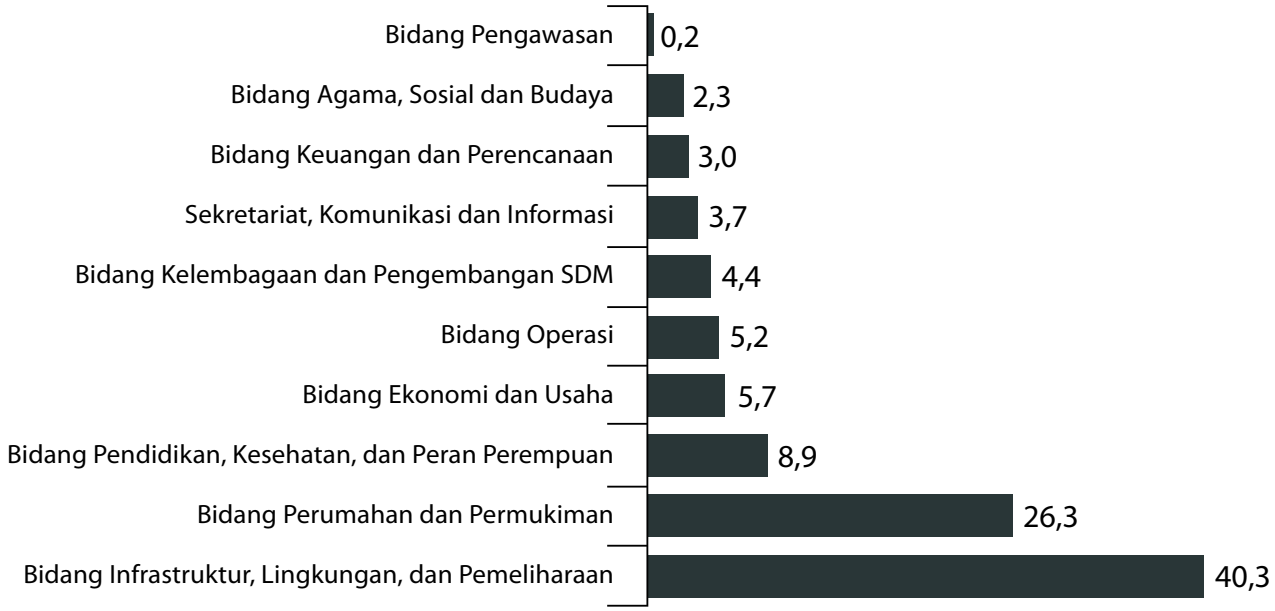

Gedung baru, semangat baru. Tahun 2008 adalah tahun istimewa bagi Aceh, karena mulai tahun tersebut, Aceh akan memperoleh dana otsus sebesar Rp3,4 trilyun. Di Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh yang baru direhab inilah pengelolaan dana tersebut dilakukan. Salah satu pelayanan di GKN, KPPN Percontohan, direkam pada 28 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 3:

KPPN-K Aceh-Nias

Bencana Aceh-Nias telah menjadi sorotan warga dunia serta badan-badan kemanusiaan dan pembangunan, dari dalam maupun luar negeri. Animo itu terutama diwujudkan dalam bentuk trilyunan rupiah sumbangan dan dana tertentu bagi pemulihannya. Hal yang kemudian menjadi tantangan adalah, bagaimana mengelola dana di dua kawasan yang telah hancur-lebur dan rawan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) itu?

Momentum tersebut secara cermat dimanfaatkan Pemerintah yang saat itu masih segar untuk menggalang dan memupuk *trust* dari segenap pihak. Lebih-lebih pada 1 Januari 2005, Pemerintah telah memutuskan untuk, secara besar-besaran dan berjangka panjang, mereformasi proses anggaran demi memperketat pengawasan pengeluaran.

Indonesia ingin membuktikan keseriusannya terhadap komitmen tata-kepemerintahan yang baik *(good governance),* dengan menjamin bahwa dana untuk Pemulihan Aceh-Nias akan dikelola secara benar, transparan, dan akuntabel. Pada sisi lain, Pemerintah juga bertekad menjawab gencarnya tuntutan dari masyarakat agar lebih handal dan terpercaya dalam mengelola dana dengan cara membenahi sistem dan aparatur.

Atas amanah Pembentukan BRR, yakni Perpu Nomor 2/2005 pasal 21 ayat 4, Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan saat itu, Mulia P. Nasution, segera bergerak. Lima hari sebelum BRR dibentuk, sebuah tim khusus beranggotakan lima orang (Tyas Miyanto, Rahmad Tanthawi, Hemil, Riskon, dan Luthfi) ditugasinya untuk menyiapkan pendirian Kantor KPPN-K di Banda Aceh. Tepat pada tiga pekan kemudian, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan 214/KMK.01/2005. Di dalamnya dicantumkan nama sebuah KPPN-K yang berlokasi di Banda Aceh. Pada 25 Mei 2005, KPPN-K Banda Aceh diresmikan dan langsung beroperasi.

Di seluruh Indonesia, KPPN-K hanya ada dua. Satu di Jakarta. Sesuai sebutannya, ke-"khusus"-an yang di Banda Aceh terletak pada, tugasnya yang *khusus* melayani pembayaran dana Pemulihan Aceh-Nias. Dana yang harus ia salurkan sekitar Rp29 trilyun, mencakup hampir keseluruhan *on-budget* (Rp29 trilyun dari Rp32 trilyun). Adapun selama TA 2008, dana yang dibayarkan KPPN-K mencapai Rp10,93 trilyun). Dana yang dikelola 130 satuan kerja (Satker) itu antara lain terdiri dari Rp7 trilyun dari DIPA Murni dan selebihnya, Rp3,8 trilyun, dari DIPA Luncuran dengan batas akhir pencairan 31 Desember 2008.

Para pemanfaatnya amat beragam, ada Satker, pihak swasta (pengusaha/rekanan), donor, menteri, gubernur bersama bupati/walikotanya se-Aceh-Nias, dan masyarakat luas. Sistem pelayanan di Seksi Perbendaharaannya—seksi yang langsung berhubungan dengan klien—diselenggarakan dengan mengadopsi *"total football":* siapapun yang datang dapat dilayani oleh pegawai yang ada.

Sistem semacam itu dimungkinkan berjalan karena seluruh kontrak diselenggarakan secara elektronik*/online* dan, apalagi, arsip data Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) ditata sesuai nomor urut SP2D. Tinggal klik laman *www.danarrapbn.org,* pengurusan SP2D, terlayani secara cepat: dari semula 8 jam, kini menjadi hanya 3/4 jam. Melalui dukungan teknologi informasi itu, masyarakat sejagat pun bisa memantau progres kinerjanya.

Bukan itu saja, demi lebih mendukung efisiensi dan kecepatan, tiga kantor cabang (filial) telah didirikan, masing-masing di Nias, Meulaboh (melayani Pantai Barat Aceh), serta Lhokseumawe (melayani Pantai Timur Aceh). Jika dulu Satker dari segenap penjuru Aceh-Nias harus jauh-jauh datang ke KPPN-K Banda Aceh di Jalan Senangin 2 Lampriet, kini semuanya bisa diproses langsung dari masing-masing KPPN-K filial itu via *e-mail,* termasuk untuk rekonsiliasi dan *cash forcasting.*

KPPN-K Banda Aceh memiliki 26 pegawai. Selain Agus Santoso sebagai kepala kantor, 1 orang kepala subbagian umum, dan 3 orang kepala seksi, sebagian besar adalah para pelaksana (14 orang) dan tenaga honorer (7 orang).

Kendala-kendala awal berupa penyesuaian pola dan sistem anggaran baru, serta keterlambatan pencairan DIPA dan pembentukan Satker, telah berhasil dilewati dengan baik. Reputasinya sebagai perpanjangan tangan Bendahara Umum Negara yang dituntut mampu menjamin likuiditas keuangan Pemerintah selama tiga tahun lebih Pemulihan Aceh-Nias, telah diakui secara luas. Tak kurang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri telah mengganjarnya dengan penghargaan "Citra Pelayanan Prima 2006". Mitra Pemulihan pun berterimakasih serta semakin memercayai dedikasi dan kecepatan pelayanan KPPN-K itu.

Pemantapan Operasionalisasi

Dalam rangka menyediakan dukungan bagi penyelesaian program dan implementasi peralihan, diintensifkan penggeseran fokus sektoral ke wilayah telah dilakukan sejak 2007. Upaya tersebut semakin diintensifkan pada semester pertama 2008. Penyatuan ini melibatkan fokus yang lebih besar pada aspek kontrol terhadap proyek, baik pada perspektif sektoral maupun regional, melalui penempatan-kembali staf tambahan pada kantor perwakilan BRR.

Upaya ini, selain secara tak langsung menjamin kapabilitas dengan melakukan monev progres, juga menyediakan ruang tambahan bagi terjadinya "pembagian peran" antara BRR, Mitra, dan Pemda.

Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan pada 2006, BRR mendorong partisipasi bersama di antara para pemangku kepentingan, khususnya Pemda setempat, dalam hal perencanaan hingga monev proyek di lapangan. Pembentukan sekretariat bersama (Sekber) pada tingkat kabupaten, memang lambat pada awalnya. Namun saat ini, dengan tambahan sumberdaya oleh BRR dan penguatan dari Pemda, Sekber telah memainkan peran penting dalam mencapai prioritas 2008 *(baca subbab "Koordinasi").*

Bertambahnya aktivitas pada tingkat regional terefleksi pada alokasi anggaran TA 2008. Kantor perwakilan BRR menerima alokasi sebesar 43 persen dari keseluruhan anggaran—bandingkan dengan 2007 yang hanya 31 persen. Alokasi anggaran untuk kantor perwakilan BRR pada 2007 dan 2008 masing-masing Rp3 trilyun (±AS$334 juta). Meski demikian, penurunan DIPA Murni yang terjadi pada TA 2008 menjadi Rp7 trilyun (dari Rp10,4 trilyun pada TA 2007), tidak berdampak pada alokasi untuk kantor perwakilan BRR.

Belajar, berbenah. KPPN Aceh semakin banyak belajar dan berbenah selama tiga tahun Pemulihan, termasuk dalam hal penyesuaian pola dan sistem anggaran, lebih-lebih dalam pengurusan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Terlihat kesibukan di loket SPM dan SP2D KPPN-Khusus Banda Aceh, 29 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Bagan 4:
Alokasi Anggaran Kantor BRR (Rp trilyun)

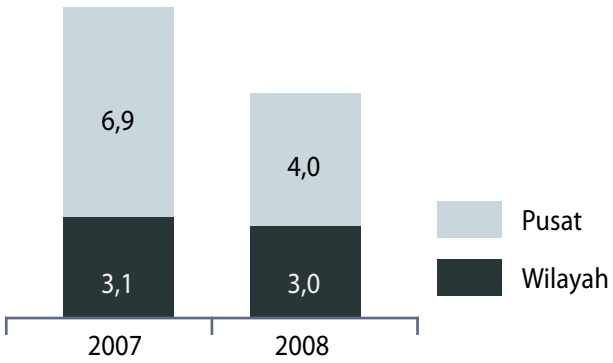

Progres

Pada tahun ini BRR menangani kurang-lebih 3.000 proyek. Jumlah tersebut terpantau melalui "pengelolaan lacak-cepat" (*fast-track management)*. Pengelolaan lacak-cepat pada dasarnya adalah fasilitas untuk penyetujuan usulan proyek oleh Donor/NGO. Sebagian besar dari proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh para kontraktor (47,8 persen) dan BRR sendiri (22 persen), serta 14,5 persen merupakan kolaborasi.

Program-program Pemulihan di bawah koordinasi BRR ditekankan pada basis-kinerja alih-alih basis-proyek. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa dana untuk pelaksanaan proyek dan dana untuk para penerima manfaat dapat segera teralisasikan. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan para penyintas dapat ditanggapi secara cepat. Proyek yang tidak berjalan sesuai semestinya atau macet, ditinjau-ulang BRR. Caranya, dengan mengganti Satker atau mengubah proyek macet tersebut menjadi proyek lain.

Kotak 4:

KANTOR-KANTOR PERWAKILAN BRR

Kantor pusat : **Banda Aceh.**
Perwakilan-I : Sabang, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya.
Perwakilan-II : Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang.
Perwakilan-III : Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara.
Perwakilan-V : Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan pulau-pulau sekitarnya.
Perwakilan-VI : Nias dan Nias Selatan.
Khusus untuk Pulau Simeulue, ditetapkan sebagai distrik khusus.

Mempererat kerjasama. Rapat koordinasi "Sekretariat Bersama Rehabilitasi dan Rekonstruksi" di Kantor Gubernur NAD, Banda Aceh, 13 Februari 2008. Rapat rutin antara BRR dan Pemerintah Aceh semacam ini bertujuan untuk memudahkan transfer aset pengelolaan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Foto: BRR/Arif Ariadi

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada paruh awal 2008 telah melampaui jumlah pembelanjaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini memberikan sinyal bahwa adalah penting untuk melakukan tindakan tinjau-ulang terhadap proyek yang telah dilakukan pada akhir masa kerja BRR. Proyek yang macet dapat diubah atau dibenahi menjadi proyek yang lebih efisien-efektif. Penerapan pengelolaan lacak-cepat juga penting untuk mengukur derajat kinerja suatu proyek.

Fokus BRR pada 2008 dalam pengembangan regional melalui implementasi dan pengawasan program yang lebih terdesentralisasi, menuai hasil menggembirakan. Tujuan dari regionalisasi itu sendiri adalah untuk lebih:

- mendekatkan pelayanan pada para penerima manfaat,
- responsif terhadap kebutuhan Pemda dan masyarakat,
- meningkatkan hasil dan mutu program.

Per 31 Juni 2008, kendati realisasi program masih di bawah harapan, yakni sekitar 27,66 persen, namun pada akhir 2008, keseluruhan proyek diharapkan dapat diselesaikan. Namun secara umum, rata-rata penyerapan Kantor Perwakilan BRR lebih baik daripada penyerapan sektoral BRR. Capaian ini setidaknya akan menjadi indikasi bahwa tujuan dan misi Pemulihan yang dimandatkan kepada BRR tengah dituntaskan.

Prasarana

Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor prasarana telah menyerap dana hampir 30 persen dari keseluruhan dana Pemulihan Aceh-Nias. Sektor ini memang mendapat prioritas yang sangat besar dalam Pemulihan Aceh-Nias. Hal ini dikarenakan pembangunan prasarana penting untuk melancarkan akses ke daerah terpencil dan untuk mendukung

Kotak 5:

Aceh Miliki GKN Baru

Pemda Aceh sekarang memiliki Gedung Keuangan Negara (GKN) baru di Banda Aceh. GKN menduduki posisi penting dalam tata-kelola sebuah pemerintahan, karena menjadi titik-temu tiga pihak dalam pembangunan Aceh pascatsunami, yakni BRR, K/L, dan Pemda. BRR merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan penyelesaian fisik gedung. Sedangkan K/L, dalam hal ini Kementerian Keuangan, menjadi penyalur dana-dana pembangunan.

Dalam kata sambutan peresmian pada Senin, 28 April 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, GKN merupakan salah satu aset yang dibangun untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa 2008 adalah tahun istimewa bagi Aceh, karena mulai tahun tersebut, Aceh akan memperoleh dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp3,4 trilyun. Gedung inilah tempat pengelolaan dana tersebut.

Pemda Aceh, pada di sisi lain akan menjadi aktor utama. Perannya penting dalam hal pemeliharaan. Namun yang lebih penting adalah perannya sebagai pemanfaat gedung dan dana yang mengalir di dalamnya sebagai aset yang bisa diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat Aceh.

Pilih, pilih, pilih. Pembeli ini sedang memilih-pilih tas bordir made ini Samahani, Aceh Besar, 30 Oktober 2008. Produk kerajinan rumahan yang ini kian hari kian populer, bahkan hingga ke luar negeri. Foto: BRR/Arif Ariadi

percepatan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Ditambah dengan pemahaman sebagai investasi jangka panjang, maka bagi BRR, prasarana menjadi sektor yang strategis.

Pada 2008, sebesar 40,3 persen dari total anggaran sektor ini telah dialokasikan pada pembangunan prasarana. Jumlah dana tersebut berasal dari APBN, yang di dalamnya termasuk PHLN dari Bank Dunia, ADB, Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (Japan Bank for International Cooperation, JBIC), dan Badan Perancis untuk Pembangunan (Agence Française de Dévelopment, AFD).

Fokus pada 2008 mencakup perampungan proyek jangka panjang yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya; serta pelaksanaan proyek strategis pada subsektor telekomunikasi, transportasi udara, jalan, gedung pemerintahan, saluran air dan irigasi, serta pengendali banjir. Adapun perencanaan dan pelaksanaan program jangka panjang yang telah dirancang, akan diteruskan setelah masa tugas BRR berakhir.

Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan sektor yang mendapatkan kucuran dana kedua terbesar setelah sektor prasarana, yakni sekitar 27 persen dari anggaran Pemulihan. Tsunami Aceh dan gempa Nias telah menyebabkan 500.000-an warganya tidak memiliki hunian yang layak. Untuk itu, sektor perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama sejak program Pemulihan digulirkan.

Pada 2008, sekitar 26,3 persen dari anggaran Pemulihan dialokasikan untuk kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang belum rampung. Lebih lanjut, pada awal 2008, program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) diluncurkan. Melalui program tersebut disalurkan dana sebesar Rp2,5 juta untuk 48.579 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat (37.264 KK di Aceh 11.315 KK di Nias) yang mencakup 1.103 desa (1.007 desa di 15 kabupaten/kota se-Aceh dan 96 desa di 2 kabupaten se-Kepulauan Nias). Bantuan tersebut sedianya dimaksudkan untuk membantu

Kotak 6:

BRR dan Pengembangan UKM

Pusat Keuangan Mikro Aceh (Aceh Micro Finance, AMF) BRR terus mendukung pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) di Aceh dengan anggaran sekitar Rp150 milyar. Salah satu keberhasilan lembaga ini adalah membantu pengembangan usaha makanan khas Aceh di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Menurut Anwar Daud, pemilik usaha ini, dengan bantuan modal dari AMF BRR, ia berhasil mendirikan "Istana Lampia". Bisnis kue khas Aceh ini ditekuninya sejak 1996, sebab banyak pengunjung yang ingin membawa oleh-oleh makanan khas Aceh setelah datang ke Serambi Mekkah ini. Minimnya modal dan resesi ekonomi 1997 membuat usahanya tidak terlalu berkembang. Kondisi ini diperparah oleh konflik bersenjata yang terjadi di wilayah ini.

Pada Maret 2007 lalu, Anwar mengajukan permohonan bantuan kepada sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) binaan AMF BRR. Ia mendapatkan bantuan senilai Rp100 juta pada Januari 2008. "Bantuan itu saya gunakan untuk modal kerja, membeli peralatan kerja, dan alat-alat produksi," kata Anwar usai peresmian "Istana Lampia Bursa Makanan Khas Aceh" miliknya pada 24 Januari 2008. Dengan bantuan itu, kini ia memproduksi *timphan srikaya*, dendeng, *srikaya,* pulut panggang, bolu ikan dan kue bak pia.

biaya perawatan dan perbaikan rumah. Per Juni 2008, sudah 34.613 KK tercatat di bank lokal sebagai para penerima manfaatnya.

Pada 2007, ditetapkan hampir 140.000 unit rumah memerlukan rekonstruksi, 68.000 unit memerlukan rehabilitasi, dan sekitar 650 desa memerlukan perbaikan prasarana dan sarana dasar (PSD). Kini, pada medio 2008, tercatat sekitar 110.000-an unit rumah telah dibangun kembali, sekitar 70.000 unit rumah telah direhabilitasi. Selain itu, 1.450 desa telah menerima perbaikan PSD—ditambah dengan yang dikerjakan oleh Donor/NGO.

Program perumahan dikerjakan oleh banyak lembaga. Sekitar 41,4 persen didanai pemerintah melalui APBN dan dilaksanakan oleh BRR. Adapun sisanya, sekitar 59,6 persen, adalah *off-budget,* yang didanai dan dilaksanakan sendiri oleh Donor/NGO.

Dana tambahan juga dialokasikan untuk membantu para warga penyintas yang belum menempati rumah baru mereka. Per Juni 2008, diperkirakan masih ada sebagian rumah yang telah dibangun tapi belum dihuni. Ada sejumlah alasan sehingga para penerima manfaat enggan menghuni rumah barunya. Ketaktersediaan atau jauhnya jarak dari lapangan pekerjaan para penghuni lingkungan rumah baru, adalah alasan utamanya. Masih belum terlengkapinya PSD pemukiman (listrik, air, sekolah) serta ditemukannya ratusan penyintas yang memperoleh rumah ganda, adalah alasan berikutnya.

Ekonomi dan Usaha

Sektor ekonomi mendapat alokasi sebesar 11,1 persen dari total pendanaan program Pemulihan. Dana tersebut terkonsentrasi pada pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan UKM.

Mengingat terbatasnya prospek bagi pengembangan industri, sektor pertanian dan perikanan menjadi berada dalam situasi kritis dalam pemulihan ekonomi Aceh-Nias. Apalagi di Aceh, perikanan adalah penyumbang lebih kurang 30 persen Pendapatan

Tradisional yang modern. "Pasar Atjeh", karena posisinya persis di samping Mesjid Baiturahman, membuatnya menjadi ikon kembar jantung Kota Banda Aceh. Setelah hancur oleh tsunami, ikon itu kini dibangun kembali sebagai pusat niaga tradisional yang bercorak modern. Gambar diambil pada 9 Januari 2008. Foto; BRR/Arif Ariadi

Padi Abdya. Seorang petani memanen padi di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), 7 Maret 2008. Tingkat produksi padi di Abdya pada semester pertama 2008 berkisar antara 4-5 ton GKP (gabah kering panen)/hektare. Diperkirakan pada panen raya ke depan, produksinya akan meningkat dua kali lipat. Foto: BRR/Arif Ariadi

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan lebih dari 50 persen lapangan kerja, serta merupakan sektor yang hampir sepertiganya rusak total oleh tsunami. Pada 2008, pertambahan 5,7 persen dari anggaran tahunan telah dialokasikan untuk menyediakan sarana pendukung bagi Pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan UKM.

Pertanian

Diperkirakan 60.000-an hektare lahan pertanian perlu direhabilitasi. Dengan dukungan yang signifikan dari NGO/donor, diharapkan sampai dengan akhir 2008, lebih dari 100.000 hektare akan pulih atau produktif kembali. Rehabilitasi lahan juga menyangkut pembersihan area bekas genangan tsunami, serta pembukaan lahan baru dan pemenuhan input pertanian.

Penyelesaian sistem irigasi menjadi prioritas tahun ini dengan target 40 kilometer saluran irigasi direhabilitasi dan direkonstruksi. Pada akhir 2008, 180 kilometer jaringan irigasi—30 kilometer lebih dari rencana awal—diperkirakan sudah berhasil dikembalikan pengoperasiannya secara penuh.

Pada tahun ini diadakan penambahan 4.000 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) di seluruh Aceh dan Nias. Apabila semuanya terpenuhi pada akhir 2008, maka total penyediaan alsintan selama masa Pemulihan mencapai lebih dari 14.000 unit.

Proyek-proyek tambahan untuk meningkatkan produksi perkebunan di kawasan landaan bencana dituntaskan tahun ini. Sebanyak total 3.600-an hektare lahan perkebunan kelapa sawit, kakao, kelapa, dan karet tahun ini direhabilitasi. Dilakukan pula upaya intensifikasi perkebunan dalam rangka menjamin bahwa semua lahan pertanian yang dulunya tergenang tsunami akan kembali produktif sebelum akhir 2008.

Pasar-ternak Selasa. Ini adalah pasar ternak di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang hanya ada setiap Selasa. Selain sapi dan kerbau, Pidie memiliki potensi ternak berupa kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Gambar diambil pada 21 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Perternakan

Diperkirakan 36.000-an ekor sapi hilang selama tsunami. Sepanjang tiga tahun Pemulihan, sejumlah lebih dari 33.000 ekor sapi didatangkan dan didistribusikan ke seluruh Aceh-Nias. Pada tahun ini, didatangkan lagi 834 ekor oleh BRR dan 3.900-an ekor oleh NGO/Donor untuk menjamin bahwa seluruh kehilangan yang tercatat sudah diganti sebelum akhir 2008. Sarana baru pasar ternak/hewan akan dibangun juga tahun ini, dan sebanyak 7 pasar daging yang semula direncanakan pada 2005 diselesaikan pada 2007.

Untuk industri peternakan, proyek yang dipandang mendesak adalah vaksinasi lebih dari 25.000 ekor sapi, serta pelatihan dan fasilitasi inseminasi (rampung pada 2007). Pada 2008, untuk menjamin kontinyuitas kesehatan ternak di Aceh-Nias, sebuah laboratorium dan pos karantina direncanakan akan selesai pembangunannya. Hal ini sejalan dengan penentuan area tambahan bagi pengelolaan peternakan.

Kotak 7:

Pusat Pengembangan Ekspor Aceh

Pusat Pengembangan Ekspor (Export Development Center, EDC) merupakan unit bidang ekspor yang dibentuk BRR dengan dukungan dari Pemerintah Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kamar Dagang dan Industri, IOO, serta KKM BRR. EDC merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh BRR untuk membangkitkan perekonomian

Berlatih mengolah. Pelatihan pengolahan ikan tangkap bagi nelayan diselenggarakan di Pasar Ikan Lampulo, Banda Aceh, 10 April 2007. Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh USAID ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dan hasil tangkapan. Foto: USAID/Dewi Wahyuni.

masyarakat Aceh melalui pengembangan potensi komoditas ekspor.

EDC bekerja memberikan informasi kepada masyarakat terutama kalangan pebisnis, baik dari dalam maupun luar negeri, mengenai komoditas-komoditas ekspor yang dapat dikembangkan di Aceh. Selain itu, EDC juga bertugas menyediakan berbagai informasi tentang regulasi di bidang ekspor dan tata cara ekspor yang mudah.

Sebelumnya, BRR juga sudah membentuk dua lembaga yang tujuannya mendorong investasi di Aceh. Dua lembaga tersebut adalah IOO dan KKM. Hadirnya ketiga lembaga ini, diharapkan dapat lebih mendorong percepatan pengembangan perekonomian masyarakat Aceh dengan mendatangkan para investor.

Perikanan

Menempati sepanjang pesisir Aceh dan Nias, menjadikan industri perikanan sebagai salah satu sektor utama yang terimbas tsunami. Dari ribuan orang yang hilang, diperkirakan 20 persennya berasal dari desa-desa yang tersebar di sepanjang pesisir barat dan timur laut Aceh, serta ditambah Kepulauan Nias. Respon untuk membangun kembali sektor ini amat luar biasa. Lebih dari 5.000 *boat* telah diganti selama fase awal Pemulihan—melebihi asesmen kehilangan sebanyak 4.121 unit.

Rehabilitasi dan pencetakan tambak telah memungkinkan masyarakat desa-desa pesisir terbangun kembali penghidupannya. Diperkirakan seluas 18.600-an hektare tambak rusak akibat tsunami. Dengan penambahan 280-an hektare tambak yang sedang dibangun tahun ini, maka pada akhir 2008, seluruh kerusakan diperkirakan sudah pulih. Guna menjamin produktivitas tambak, sebanyak 570-an hektare tambak akan menerima

input pertanian pada tahun ini. Berarti, distribusi keseluruhan input pertanian bagi subsektor perikanan mencapai 8.000 hektare.

Pada saat kebanyakan pekerjaan rekonstruksi utama sektor perikanan rampung pada 2007, termasuk pembangunan pelabuhan perikanan skala kecil, dermaga, bongkar-muat, dan ruang pendingin, sejumlah proyek strategis diajukan tahun ini. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan pasar ikan, sarana pemijahan dan penyimpanan jaring, serta 16 tambak ikan tawar.

Usaha

Strategi sub bidang ekonomi dan usaha, untuk jangka pendek adalah segera memberikan lapangan pekerjaan. Untuk jangka menengah adalah memperbaiki struktur perekonomian masyarakat. Sedangkan strategi jangka panjangnya adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagipengembangan ekonomi yang berkesinambungan.

Sepanjang 2005-07, dukungan sudah diberikan kepada usaha kecil melalui bantuan langsung kepada para penerima manfaat untuk mengganti aset produksi mereka. Selain itu juga dirupakan dalam bentuk pinjaman yang dapat diperoleh dari lembaga kredit mikro. Diperkirakan 77.316 bantuan atau pinjaman dibutuhkan untuk memungkinkan usaha kecil bangkit kembali. Pada akhir 2007, sudah lebih dari 80.000 penerima manfaat telah menerima bantuan. Fokus 2008, diarahkan untuk merangsang industri sekunder dengan dukungan program-program yang menjangkau keluar melalui Kantor Penunjang Pelaku Investasi (KPPI) atau *Investor Outreach Office* (IOO), Klinik Kemasan dan Merk (KKM), AMF, dan pembangunan gedung sarana promosi kerajinan tangan.

Sosial-Kemasyarakatan

Pemulihan kehidupan masyarakat sudah termasuk dalam jangkauan tujuan fisik dan non fisik, meliputi: pendidikan, kesehatan, agama, sosial budaya, dan peranan perempuan. Total sebanyak 21,3 persen atau

Kotak 8:

Wirausaha Masyarakat

Sentra Kerajinan Usaha Kecil Samahani berhasil mengekspor 3.500 unit tas bordir khas Aceh yang didesain dan dibuat oleh 200 pengrajin ke Alabama, Amerika Serikat. Ekspor tersebut merupakan pesanan John Jack, seorang anggota jaringan pemasar produk kerajinan tangan dari seluruh dunia. Kegiatan sentra industri kecil yang berlokasi di Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar ini melibatkan sekitar 700 orang dari lima kecamatan di sekitarnya.

BRR mendirikan gedung *workshop* dan segala perlengkapannya sebagai bengkel kerja senilai Rp2,83 milyar dengan dana APBN. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan hasil kerjasama antara BRR-Kedeputian Bidang Ekonomi dan Usaha, Pemda Aceh Besar, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Aceh Besar, pengelola, dan masyarakat penerima manfaat. BRR akan lebih fokus dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, setelah dilakukannya program rehabilitasi tambak, ladang, dan persawahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari trauma ke favorit. Anak-anak berenang di Pantai Ceureumen, Ulee Lheue, Banda Aceh, 2 November 2008. Pantai yang sebelumnya banyak menuai trauma ini kini telah menjadi lokawisata-air favorit bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya. Foto: BRR/Arif Ariadi

ketiga terbesar setelah prasarana dan perumahan telah dialokasikan untuk sektor ini, sebagai indikasi begitu penting dan luas ruang lingkupnya. Pembangunan kembali prasarana dan pusat-pusat perumahan, bersifat fisik; berbeda dengan rehabilitasi kehidupan masyarakat.

Pendidikan

Pemulihan sektor pendidikan merupakan salah satu perhatian yang paling dini pada masa normalisasi kehidupan penyintas anak-anak. Hal ini didasari atas kepedulian mencegah adanya generasi tanpa pendidikan. Hampir 900 sekolah baru selesai dibangun pada akhir 2007 berikut sarananya, termasuk pengadaan mebeler dan peralatan. Tambahan empat sekolah menengah umum (SMU) akan rampung tahun ini.

Sejalan dengan semakin terlengkapi dan siapnya sebagian besar prasarana-sarana pendidikan, sebanyak 35.000-an beasiswa diberikan kepada para tenaga pendidik dan anak didik pilihan. Fokus tahun ini diarahkan pada kesinambungan sistem pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah melalui penguatan institusi tersier, dan pada tahun ini, sarana pelatihan yang besar dibangun di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Dengan adanya sarana tersebut, diharapkan dapat menyediakan dukungan bagi para guru serta kursus keterampilan.

Sebagai tambahan, pada tahun ini pula, telah diprogramkan pembangunan 3.000-an unit rumah bagi para dosen serta renovasi lingkungan kampus. Pembangunan sekolah internasional juga akan diselesaikan sebelum 2008 berakhir.

Kesehatan

Perkembangan yang signifikan ditunjukkan oleh sektor kesehatan, terutama melalui dukungan lembaga internasional. Seperti halnya pendidikan, sektor ini memperoleh perhatian yang cukup besar dari para pemangku kepentingan. Sebanyak 18 rumah sakit (RS) selesai dibangun pada akhir 2007. Pada 2008, ada penambahan 3 RS dan 4 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta pengoperasian kembali 33 puskesmas pembantu (pustu).

Mayoritas pekerjaan utama sektor kesehatan sudah diselesaikan pada 2007. Bidang tersisa yang masih membutuhkan bantuan pada tahun ini adalah pengadaan peralatan, pelatihan, dan sanitasi. Sebanyak 15 unit peralatan medis dibeli tahun ini. Jika ditotal seluruhnya berarti akan terdapat 47 unit—melebihi 32 unit dari asesmen kebutuhan semula—yang akan disediakan di RS-RS se-Aceh-Nias. Dari sebanyak 156 paket beasiswa kesehatan, telah direalisasikan lebih dari 256 paket; 21 paket dikucurkan tahun ini.

Untuk meningkatkan derajat kebersihan dan sanitasi, pada tahun ini beberapa proyek masih dalam tahap penyelesaian. Proyek tersebut penting untuk menyediakan sarana air bersih yang lebih baik dan prosedur dasar sterilisasi. Sampai dengan akhir 2008, sebanyak 21 paket sanitasi dan kebersihan akan diimplementasikan di seluruh Aceh-Nias; 14 di antaranya telah melebihi asesmen kebutuhan semula.

Peran Perempuan dan Anak

Perihal perempuan dan anak, meski semakin mengedepankan sebagai isu penting, masih relatif kurang tergarap secara memadai. Demi alasan inilah beberapa prakarsa dilancarkan, terutama untuk meningkatkan peran perempuan. Pada gilirannya, upaya ini, selain akan memperkuat proses Pemulihan, juga memberikan keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi anak-anak.

Pada 2007, sebanyak 43 pusat kegiatan perempuan didirikan di seluruh Aceh Nias. Pusat-pusat kegiatan tersebut menyediakan serangkaian layanan terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, P2TP2) yang dirancang untuk mengadvokasi perempuan dalam permasalahan hukum dan ketenagakerjaan serta isu-isu lain terkait pascatsunami. Pada 2008, tiga program tambahan diimplementasikan untuk memberikan dukungan khusus berkenaan dengan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak.

Melalui penyediaan dukungan pusat kegiatan dan bantuan di bidang hukum, diharapkan prakarsa Pemulihan lain bagi perempuan dan anak akan berkembang. Indikasinya antara lain adalah, adanya dukungan modal awal bagi sekitar 14.000 kelompok perempuan yang sudah dimulai sejak awal 2005 hingga 2007, bantuan keuangan bagi 2.000-an kelompok perempuan pengrajin, serta 600-an program pelatihan keterampilan. Melalui pendirian jaringan komunitas, bantuan hukum, dan layanan informasi, kaum perempuan akan memiliki akses secara terus-menerus untuk mendukungnya. Upaya ini, pada gilirannya akan menyediakan lebih banyak sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi kaum perempuan dan membangun fondasi yang lebih kokoh bagi perkembangan desa dan masyarakat.

Agama

Capaian Pemulihan sarana keagamaan masih di bawah asesmen-kebutuhan awal. Asesmen-kebutuhan terbaru menunjukkan bahwa 1.533 mesjid dan 1.062 meunasah di Aceh memerlukan bantuan. Angka tersebut, bagaimanapun, adalah berdasarkan asesmen-kebutuhan yang telah direvisi. Akan tetapi, yang perlu diperbaiki tetap lebih banyak, karena kondisi sebagian memang sudah buruk sejak sebelum tsunami. Demi alasan inilah maka masih tersisa pekerjaan penting yang harus diselesaikan.

Masih terdapat begitu banyak dayah (pesantren) yang perlu direhabilitasi. Untuk itu, pada 2008 terdapat

Salah satu dari 735. Para jamaah Mesjid At-Taqwa Blangpidie, Aceh Barat Daya, pulang setelah mengikuti shalat jumat, 7 Maret 2008. Hingga kini, mesjid yang telah terbangun sebanyak 735 unit; kebanyakan melalui pendanaan *on-budget*. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 9:

Rehabilitasi Sarana Ibadah

Pada TA 2008, BRR mengalokasikan dana sebesar Rp143,6 milyar untuk membantu pembangunan 379 unit sarana ibadah yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Aceh dan Rp23,7 milyar untuk membangun 73 unit di Nias.

Pembangunan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Masyarakat membentuk kepanitiaan untuk merancang bangunannya, dengan dibantu sebuah tim konsultan, kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Biaya, dan membuat laporan pelaksanaannya. Laporan panitia akan diperiksa sesuai dengan perkembangan fisik di lapangan sebelum dilakukan proses pencairan dana tahap berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hingga kini, BRR telah merehabilitasi lebih dari 1.000 sarana peribadatan, terdiri dari 881 unit (senilai Rp8,7 milyar) pada 2005, 379 unit (senilai Rp27 milyar) pada 2006, dan 259 unit (senilai Rp5 milyar pada 2007).

Kotak 10:

Pembangunan Sarana Agama dan Pendidikan

Bidang pendidikan dan agama merupakan dua aspek yang juga menjadi perhatian BRR dalam pembangunan masyarakat Aceh. Komitmen ini diwujudkan dengan pembangunan meunasah senilai Rp500 juta di Desa Blang Malo, Kecamatan Tangse, Pidie, yang diresmikan penggunaannya pada 29 Januari 2008.

Selain itu, BRR, yang juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, berkomitmen memenuhi permintaan masyarakat untuk membangun lima unit ruang belajar Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keumala. Pemkab Pidie membangun fondasi beserta lantai, sementara BRR menyelesaikan pembangunan ruang belajar madrasah. Pembangunan madrasah ini dijadwalkan akan selesai pada awal November 2008. Dengan berdirinya meunasah dan gedung belajar di Keumala ini, diharapkan akan membantu dalam mempercepat proses perbaikan pendidikan anak-anak Aceh.

beberapa proyek signifikan yang diajukan untuk menyelesaikan rehabilitasi mesjid, meunasah, dan dayah. Sebanyak 315 mesjid, 138 meunasah, dan 16 dayah yang sedang direkonstruksi, diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

Sosial-Budaya

Dukungan kebutuhan sosial-budaya telah dilancarkan sejak program Pemulihan dimulai. Pada tahun sebelumnya, mayoritas proyek dimulai pada 2005-06, pada saat masyarakat banyak memerlukan.

TATA - KELOLA PROGRAM

Lanskap perumahan. Foto udara Kota Banda Aceh 23 Juni 2007 ini memperlihatkan lanskap rumah-rumah dan sarana umum pada pascatsunami. Selama semester pertama 2008, terdapat penambahan 8.059 unit rumah; 6.627 unit di antaranya dibangun dengan dana *on-budget*. Foto: BRR/Arif Ariadi

TATA-KELOLA

Belum ada satu model penanganan pun yang paling representatif untuk "menjawab" apalagi menjadi acuan bagi Pemulihan pascabencana setingkat tsunami 2004. Dan sekalipun Rencana Induk sudah di tangan, masih belum juga dicapai kesamaan persepsi pekerjaan.

Kepercayaan penuh dari si pemberi amanah, Presiden SBY, kepada BRR, juga dirasa masih belum cukup untuk memberi kemantapan praktis untuk kerja-kerja koordinasi awal. Mengingat kedaruratan kondisi, maka gagasan dan prakarsa apapun yang bermaksud solutif, disambut BRR dengan tangan terbuka.

Di tengah ketiadaan acuan, BRR hadir dalam tegangan kekuatan-kekuatan oponen dan proponen. Saat itu, birokrasi yang konvensional adalah oponen utamanya. Ia berhadapan dengan prakarsa para pemimpin mitra internasional. Dukungan para proponen semacam wakil Bank Dunia, pemerintah negara sahabat, dan segenap NGO saat itu cukup membantu fungsi BRR.

Kondisi seperti itu mengarahkan karakter kerja BRR, dan juga para mitra, menjadi debirokratisasi—dalam beberapa kasus boleh jadi malah antibrokrasi. Hal tersebut bukannya tanpa disadari, mengingat, begitu sebuah institusi penanganan bencana telah dibelit birokrasi yang kental, maka jika sewaktu-waktu bencana datang, akan kewalahan. Dengan demikian, ia akan menjadi "sudah kalah sebelum berperang". Oleh BRR, tantangan dan kekurangan yang ada, dicoba untuk diubah menjadi peluang dan perbaikan.

Dukungan yang kuat, baik dari nasional maupun internasional, akhirnya bisa juga tergalang. Inilah yang membuat BRR menjadi percaya diri dan khas. Kepercayaan diri dan kekhasan itu kelak menjadi menjadi modal utama BRR dalam meniti tahap-tahap selanjutnya, terutama saat harus menjawab dan menyesuaikan tuntutan Pemulihan yang begitu dinamis.

Tantangan yang mengalir bersamanya adalah bagaimana langgam "birokrasi yang debirokatis" itu dapat terinternalisasi alih-alih memengaruhi keseluruhan sistem kerjanya. Serangkaian program yang dijalankan beserta aktornya, kendati satu sama lain memiliki kendala yang berlainan, coba diintegrasikan agar bisa dipantau perkembangannya.

Mengelola koordinasi ratusan aktor Pemulihan, pemangku kepentingan, serta penerima manfaat, adalah contohnya, belum lagi dalam hal pengelolaan data dan informasi. Baik koordinasi maupun pengelolaan informasi, semua berangkat dari prakarsa untuk melakukan yang terbaik dan terefektif untuk menjawab tuntutan pembangunan cepat di medan Pemulihan Aceh-Nias.

Prakarsa

Dari pengalaman selama Pemulihan, dapat dipetik satu pelajaran penting bahwa kunci utama dari pengelolaan pascabencana, meski kerap terbelit oleh peraturan maupun sistem normal yang ada, adalah ketanggapan bersuasana darurat *(emergency mood.* Pada tingkat teratas, ketanggapan itu berada di tangan BRR, sehingga tirisannya tentu bisa dirasakan oleh pihak Donor/NGO, pemangku kepentingan, maupun penerima manfaat. Ketanggapan ditata-kelola secara seksama, karena semangat yang kuat jika tidak dikemudikan dan diawasi secara bagus, akan mudah terpelanting sewaktu berhadapan dengan wilayah "abu-abu".

> "Paradigma perangkat sistem yang normal dalam kondisi yang abnormal dapat ditemukan, misalnya, ketika bersinggungan dengan proses pengadaan *(procurement)* barang/jasa. Dalam proses tersebut, tidak bisa tidak, BRR dilarang menerabas aturan main yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80/2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Padahal peraturan tersebut notabene menggunakan asumsi kondisi normal, bertolak belakang dengan kondisi di mana BRR bekerja."

Jalan selesai. BRR telah merampungkan pembangunan ruas jalan nasional Nagan Raya – Blangpidie (gambar diambil pada 7 Maret 2008). Hingga kini, total panjang jalan nasional yang telah terbangun adalah 492 kilometer; 188 kilometer di antaranya dilakukan pada semester pertama 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Dalam beberapa kasus yang oleh sebab ketidaktahuan atau alasan-alasan tertentu, misalnya untuk alasan azas manfaat dan kesegeraan, penting sekali untuk dibedakan antara "penyelewengan" dan "nonprosedural". Mengingat, keduanya sama-sama berada dalam wilayah abu-abu yang bernama "penyimpangan". Sementara seperti yang kita pahami, tak semua yang nonprosedural merupakan penyelewengan.

> "BRR lebih mendasarkan kerjanya pada azas manfaat. Supaya manfaat yang lebih besar dapat diraih, ditempuhlah sejumlah prakarsa. Berkat prakarsa itu, kontraktor yang terlambat, misalnya, diizinkan untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Contoh lain lagi, setiap kali BRR menetapkan anggaran dan juga target pelaksanaan fisik, banyak kondisi yang "kurang pro". Cuaca, ombak pasang, gempa lagi, libur lebaran, puasa, terlihat "kurang pro". Di Aceh, misalnya, selama Ramadhan, kinerja proyek-proyek konstruksi akan mengalami penurunan drastis. Untuk itu, proyek terpaksa direncanakan dan dimulai jauh-jauh hari, misalnya Januari, supaya selesai tepat waktu."

Begitu pula dengan upaya-upaya inovatif. Inovasi yang ditempuh BRR kerap berlimit sewaktu berhadapan dengan regulasi untuk eksekusi BRR sendiri. Terutama ketika berhadapan dengan hal-hal yang bersifat umum pada level kebijakan, efektifitasnya sering dilimitasi oleh perundang-undangan. Ini adalah problem yang bukan dialami BRR saja, namun juga di K/L manapun.

> "Inovasi yang berlimit bisa dilihat, misalnya, tentang inovasi apakah sebuah institusi pemerintah seperti BRR bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat internasional (NGO atau badan PBB) secara langsung melalui suatu perjanjian, contohnya dalam sektor perumahan. Semula, karena BRR melihat kinerja UN Habitat cukup bagus, maka ketimbang dilaksanakan sendiri, BRR mencoba untuk bekerjasama dengan cara mentransfer uang BRR ke UN Habitat. Tapi toh gagal juga, karena uang pemerintah hanya bisa cair dengan proses pengadaan atau swakelola. Dari peristiwa tersebut bisa dipetik hikmah-ajar bahwasanya, inovasi apapun yang diciptakan, sejauh masih terkait dengan (pengelolaan keuangan K/L) Pemerintah, tetap harus realistis."

Apapun kendala yang ada, semangat semacam itu dicoba untuk bukan diimplementasikan pada ranah pencegahan penyelewengan semata, melainkan juga di segenap lini kegiatan sektoral, lintassektoral, maupun wilayah. Ranah tersebut antara lain adalah penataan koordinasi dan pengelolaan informasi.

Koordinasi

Arti penting koordinasi terletak pada bahwa itulah simpul pengikat dari seluruh kegiatan dan ratusan aktor Pemulihan. Jika simpul tersebut melonggar atau bahkan terlepas, maka bisa dipastikan akan menciptakan kesenjangan. Bentuknya, bisa berupa inefisiensi, kekaburan operasional, "perang bendera", tumpang-tindih, duplikasi, atau kurang terwadahinya prakarsa untuk berbagi rencana dan hikmah-ajar.

Berdasarkan tekad awal datang ke Aceh-Nias, memang sebagian besar aktor berangkat dari, dan oleh karena itu memiliki, semangat kemanusiaan. Namun lantaran luas dan kompleksnya bidang garapan serta terbatasnya durasi kontrak kerja, telah membuat mereka tak tersedia cukup kesempatan untuk saling berbagi.

Banyak dan beragamnya aktor pun kerap memicu kebingungan. Dengan 800-an organisasi yang terlibat dalam program Pemulihan, tak terkecuali pihak swasta, hal yang tak terelakkan adalah tersebarnya standar dan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini membuat hubungan antara kebutuhan dan program kurang terpadu.

BRR menyadari bahwa terkait fungsi koordinasinya, hal pertama yang penting dilakukan adalah mendapatkan gambaran utuh mengenai medan dan sektornya. Dengan demikian memungkinkan BRR untuk menetapkan pada bagian mana saja terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi atau duplikatif. Alat koordinasi utama BRR adalah persetujuan jalur cepat (fast-track approval) atau Nota Konsep Proyek *(Project Concept Note,* PCN*)*.

Setiap Donor/NGO maupun dunia diharuskan mengajukan PCN, yang kemudian dimasukkan ke dalam pangkalan-data proyek. Agar transparan, proses ini dijalankan secara terbuka. PCN berisi informasi detail mengenai kegiatan, jenis dan lingkup kegiatan, lokasi kegiatan yang direncanakan, besarnya dana yang disediakan, rencana waktu dan durasi pelaksanaan, pihak-pihak yang akan/mungkin terkait, serta perkiraan dampak yang mungkin ditimbulkan.

> PCN yang diajukan, dapat dilakukan secara langsung (manual) atau melalui internet. PCN yang masuk akan dinilai, dan dibuat peringkat penilaian terlebih dahulu oleh deputi sektor terkait. Selanjutnya PCN akan didiskusikan dalam suatu *workshop* dwimingguan, dihadiri oleh deputi BRR dan wakil-wakil dari setiap sektor di BRR serta tenaga ahli. Hasil persetujuan dari PCN selanjutnya dikonfirmasikan kepada pihak yang mengajukan. Keluaran dari *workshop* adalah berupa peringkat proyek *(project rating)* sesuai keputusan yang diambil dalam *workshop* tersebut, yakni *unconditional approval* (disetujui tanpa catatan), *conditional approval* (disetujui dengan catatan), *holding bay* (ditunda), serta *turn-down* (ditolak).

Sekadar kilas-balik, mandat BRR selaku koordinator Pemulihan Aceh-Nias ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya, yakni Perpu Nomor 2/2005. Disebutkan, Bapel BRR merupakan institusi resmi Pemerintah yang berwenang dalam mengorganisasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Pemulihan bersama para pemangku kepentingan terkait, baik nasional maupun internasional.

> Terkait kewenangan BRR dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan nasional, Perpu Nomor 2/2005 menegaskan dalam dua pasal, yakni:
>
> - *Pasal 16:1*, "Badan Pelaksana mempunyai wewenang mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait". Kemudian di *Bagian Penjelasan*, dituliskan bahwa, "Yang dimaksud dengan 'pihak lain yang terkait' dalam ketentuan ini adalah seperti negara donor, badan internasional atau lembaga swasta yang turut memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pascabencana."
> - *Pasal 24:1*, "Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi

Rapat besar pertama. Rapat besar pertama antara BRR dan segenap perwakilan LSM lokal, nasional, dan internasional digelar pada 12 Mei 2005. Momentum koordinasi yang berlangsung di Gedung Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bapel BRR. Foto: BRR/ Arif Ariadi

> dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait."
>
> Adapun terkait koordinasi pemangku kepentingan nasional, dinyatakan dalam pasal 17:d, "Badan Pelaksana mempunyai wewenang mengkoordinasikan dan bekerja sama serta mengawasi pihak luar negeri (asing) dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibiayai langsung oleh pihak luar negeri (asing)."

Berdasarkan mandat itu, BRR telah dan sedang melakukan berbagai upaya koordinatif. Untuk tinjauan proyek, disiapkan Pangkalan-data Pemulihan Aceh-Nias (Recovery Aceh-Nias Database, RANdatabase) dan PCN. Untuk koordinasi sektoral, dibentuk Kelompok Kerja Sektoral. Untuk menyerahkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, dibentuk Sekber, atau *Problem Solving and Project Meeting*. Salah satu yang utama Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias (*Coordination Forum for Aceh and Nias,* CFAN) yang diselenggarakan setiap tahun.

Kita sudah sering mendengar sebuah kalimat yang cukup populer, yakni, "memang koordinasi adalah mandat utama BRR, namun usaha Pemulihan itu sendiri, bagaimanapun adalah merupakan tanggung jawab bersama segenap pemangku kepentingan." Kendati sudah terdengar klasik, kiranya kalimat yang tercetus dari CFAN perdana pada Oktober 2005 itu masih relevan hingga sekarang.

> Frase "... koordinasi adalah mandat utama BRR, namun usaha Pemulihan itu sendiri, bagaimanapun juga, adalah merupakan tanggung jawab bersama segenap pemangku kepentingan" ini sebenarnya merupakan simpulan utama CFAN perdana. Di forum tersebut, baru kali pertama itulah para pemuka pemangku kepentingan bertemu dalam rangka menentukan cara-cara yang lebih efektif mengatasi tantangan Pemulihan. Diadakan pada Oktober 2005, CFAN tersebut ditekankan untuk menemukan resultan antara koordinasi dan tanggung jawab bersama yang lebih baik, guna menetapkan standar serta akuntabilitas yang tinggi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membentuk "layanan satu pintu", terutama bagi pengurusan visa dan izin kerja bagi tenaga ekspatriat, yang belakangan bernama Tim Terpadu BRR.

Kotak 11:

Keterlibatan Mitra Internasional

Ketika masa tanggap darurat dilaksanakan, 34 negara sahabat berduyun-duyun membantu Aceh dan Nias hingga menciptakan deret angka: 1 (RS terapung), 9 (kapal induk), 14 (kapal perang), 82 (helikopter), 31 (pesawat udara), 117 (tim medis), dan 16.000 (relawan).

Bencana senantiasa membuka tangan bagi masuknya simpati untuk meringankan penderitaan sesama dalam meraih martabat dan kemandiriannya kembali. Dengan tangkas, masyarakat dunia lalu mengorganisasikan dirinya ke dalam pelbagai kelompok. Besaran dan lingkupnya beragam.

Telah diketahui, gempa bertsunami bukan meluluhlantakkan Aceh-Nias semata, pun sejumlah negara Asia-Afrika, antara lain Malaysia, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, India, Somalia, Maladewa, Tanzania, Bangladesh, Seychelles, dan Mauritius,. United Nations Flash Appeal yang diserukan saat itu bisa diilustrasikan sebagai sebuah "kegairahan darurat yang luar biasa berhasil-guna". Betapa tidak, dalam kurun enam bulan saja, AS$977 juta telah terkomitmenkan. Angka itu merangkak pesat menjadi AS$1,87 milyar manakala seruan itu diulur hingga 12 bulan.

Komunitas donor internasional yang dipelopori Grup Konsultatif mengenai Indonesia (Consultative Group on Indonesia, CGI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menurunkan dua laporan, tajuknya: *Indonesia: Preliminary Damage and Loss Asessment dan Indonesia: Notes on Reconstruction*. Kedua laporan itu telah menyediakan fondasi penting bagi tanggapan kemanusiaan berbasis proyek domestik dan praktik-praktik terbaik dunia. Wujud keterlibatan lain entitas internasional ditandai pula dalam pekerjaan menyusun cetak-biru Pemulihan Aceh-Nias.

Dua peran penting BRR selaku koordinator dan implementor, telah berimplikasi pada penggunaan dua skema pendanaan Pemulihan: *on-* dan *off-budget*. Pada skema kedua, BRR mengharuskan setiap proyek untuk mendapatkan pengesahan dari sektor dan Pemda terkait melalui mekanisme PCN yang hingga kini, telah 45 kali dilokakaryakan. Seusai disetujui, seluruh proyek berskema *off-budget* harus didaftarkan dalam RANdatabase. Per Juni 2008, tercatat seribuan proyek *off-budget* dilaksanakan oleh 800-an pelaku dan didanai oleh 600-an donor.

BRR juga melaksanakan CFAN. Pada forum itu, donor dan para aktor Pemulihan Aceh-Nias mendiskusikan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dalam lingkup yang lebih kecil, Pertemuan Pemangku-kepentingan Kepulauan Nias (Nias Islands Stakeholder Meeting, NISM) menjadi forum berkala tempat mendiskusikan perihal serupa khusus Nias.

Sebuah keunikan dari usaha Pemulihan Aceh-Nias adalah bahwa Pemerintah, para donor dan NGO, dalam ikhwal kontribusi pendanaan, ternyata memiliki besaran yang tak jauh beda. BRR, sejauh ini merupakan aktor tunggal terbesar, bersama dengan sepuluh lembaga lain, telah menorehkan pendanaan hingga tiga perempat dari seluruh sumberdana yang ada. Hanya dalam konteks itu saja, keterlibatan mitra internasional sudah tak bisa terbantahkan.

Eksistensi mereka dalam Pemulihan merupakan sebuah imperatif moral yang memungkinkan sebuah pembangunan-kembali menjadi lebih baik dan bergegas. Dan yang lebih mendasar, keterlibatan itu telah memampukan Aceh-Nias dalam mencapai tujuan azasi pembangunan: memperlapang pilihan-pilihan manusia.

CFAN ketiga. Rapat tahunan CFAN yang dihadiri oleh seluruh Mitra Pemulihan Aceh-Nias diselenggarakan di Jakarta, 24 April 2007. Salah satu topik utama yang dibicarakan pada saat itu adalah tinjauan paruh-waktu pertama Pemulihan Aceh-Nias. Foto: BRR/Arif Ariadi

Tak sampai setahun kemudian, Mei 2006, CFAN kedua dilangsungkan. Gagasan utama yang dicanangkan saat itu adalah merealisasikan pendekatan berbasis-wilayah di tubuh BRR, yakni regionalisasi. Ide yang didukung hampir semua pemangku kepentingan yang hadir, secara implisit, bisa dibaca sebagai sebuah pengakuan penting. Semua mengakui bahwa, demi sebuah pembangunan berkesinambungan, diperlukan rasa saling memiliki dan tanggung jawab pengelolaan yang lebih luas atas aset dan proses pekerjaan raksasa yang kelak akan diserahkan ke Pemda. Untuk itu, isu-isu lintassektoral seperti jender dan lingkungan, diperbincangkan pula.

Pada CFAN ketiga, April 2007, dibahas dua materi pokok. Pertama, pemaparan MTR mengenai progres Pemulihan selama dua tahun, sejak April 2005 hingga April 2007. Pemaparan ini penting bagi dua hal, yakni mengidentifikasi apa-apa saja yang telah dikerjakan serta pembelajaran apa saja yang telah dipetik. Kedua, adalah mengidentifikasi arah ke depan agar target-targetnya serealistis mungkin.

Sebagai tindak-lanjut ide regionalisasi CFAN kedua, ada tiga komponen primer yang kemudian disusulkan. Masing-masing adalah pembentukan Sekber dengan Pemda, pembentukan kepemimpinan di tingkat daerah untuk mendesentralisasi pengambilan keputusan, serta pembentukan kemampuan operasional di tingkat daerah guna meningkatkan kinerja di tingkat setempat.

Dalam lingkup yang lebih khusus, hingga kini, Kantor BRR Perwakilan Nias telah menyelenggarakan empat kali NISM, masing-masing pada Desember 2005, Januari 2006, Maret 2007, dan Mei 2008. NISM menjadi forum evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Nias, dari donor besar seperti Bank Dunia, ADB, badan-badan PBB, Palang Merah Indoneisa (PMI), NGO nasional/internasional, hingga Pemda Sumatera Utara, Nias, dan Nias Selatan.

NISM pertama dan kedua menghasilkan Rencana Aksi Bersama untuk Rekonstruksi Nias yang mengisi kekosongan cetak-biru bagi wilayah itu.

Mengelola transisi di Nias. Rapat tahunan NISM keempat dihadiri oleh segenap Donor/NGO dan perwakilan negara sahabat, 15 Mei 2008. NISM yang kali itu diadakan di Hotel Grand Angkasa, Medan, tersebut mengusung tema "Mengelola Transisi Rekonstruksi menuju Pembangunan Berkelanjutan". Foto: BRR/Arif Ariadi

NISM ketiga, selain menggulirkan Rencana Aksi Terintegrasi untuk Rekonstruksi Kepulauan Nias 2007-2008, juga menitikberatkan perhatian khusus terkait permasalahan seputar Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR. Adapun NISM keempat telah mendesakkan sejumlah rekomendasi penting.

Konsep Sekber dijalankan sehubungan dengan pencanangan strategi regionalisasi. BRR Nias telah terlebih dulu menerapkan konsep serupa pada Mei 2006 dengan memusatkannya di kantor Bappeda. Melaluinya, Pemda ditempatkan sebagai pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab atas pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, dalam merealisasikan proses Pemulihan, Pemda akan didukung sejak tahap perencanaan, penentuan prioritas, hingga pengambilan keputusan secara efektif. *(baca juga pada subbab "Pembangunan Berbasis-Kawasan" dan "Alih Pengetahuan")*

Pembentukan kepemimpinan di tingkat daerah/ regional dilakukan dengan mengangkat sejumlah Kepala Kantor Perwakilan BRR. Namun, pada sisi lain, di beberapa wilayah, kinerja Sekber berjalan lamban atau bahkan menghambat, sehingga terpaksa harus dibekukan. Besar kemungkinan ini disebabkan karena pada tingkat daerah, BRR disibukkan dengan pelaksanaan program-programnya sendiri, terutama rekonstruksi perumahan. Selain itu, kecilnya tingkat kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan dan koordinasi, juga menjadi faktor penyebabnya. Peningkatan pendekatan kerjasama berbasis-wilayah dengan Pemda, diakui, menjadi amat terbatas.

Beberapa kasus yang dihadapi di lapangan mendorong untuk dilakukannya upaya tertentu dalam mencapai kombinasi yang sinergis. Kombinasi tersebut meliputi penataan tentang porsi pemenuhan mandat untuk meningkatkan kapasitas

Kotak 12:

Rekomendasi NISM Keempat

NISM yang mengusung tema "Mengelola Transisi Rekonstruksi menuju Pembangunan Berkelanjutan" ini diselenggarakan pada 15 Mei 2008 di Hotel Grand Angkasa, Medan. Terkait fase transisi di Nias, disepakati tiga aspek penting yang perlu mendapatkan penajaman. Ketiganya adalah:

1. *Kesiapan lembaga terkait*. Turunan pada poin pertama ini antara lain: perlunya kejelasan mengenai pendanaan dan alokasinya, mekanisme serah-terima aset, serta operasionalisasi dan perawatan aset pascaserah-terima. Guna menjamin kesatuan pemahaman dalam perencanaan dan pelaksanaan, dibutuhkan semacam forum bersama dan program pengembangan kapasitas pada SDM Pemda.
2. *Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction, DRR)* bagi semua lapisan masyarakat setempat, mencakup aparat desa, murid sekolah, dll.
3. *Pengembangan ekonomi dan SDM*. Selain perlu merangkul industri perbankan, swasta, serta tokoh/panutan masyarakat, pengembangan sektor ini juga harus memperhatikan komoditas dan budaya yang ada.

Selama tiga tahun proses Pemulihan, banyak sudah progres yang dicapai oleh aspek-aspek fisik, seperti pembangunan perumahan dan prasarana. Sedangkan aspek-aspek nonfisik, seperti pembangunan ekonomi dan kelembagaan, relatif lebih lambat, sehingga perlu dipacu.

Sehubungan dengan hal itu, sejumlah pemangku kepentingan telah menegaskan komitmennya, yakni:

1. *Kementerian Dalam Negeri,* akan lebih proaktif dalam proses transisi, termasuk melakukan kerjasama dengan sejumlah wilayah bencana.
2. *Bappenas,* akan melancarkan sejumlah upaya berupa dukungan terhadap perencanaan dan pelaksanaan; peninjauan ulang alokasi anggaran; serta mengadaptasi DRR ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
3. *Donor;* sekitar delapan donor, termasuk MDF, siap memberikan dukungan.
4. Pemda *(Nias dan Nias Selatan)*, selain akan berupaya keras memperbaiki kapasitas, juga akan mengencangkan kerjasamanya dengan organisasi penyinambung Pemulihan pasca-BRR.

Koordinasi alih-aset. Sekber Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan rapat koordinasi alih-aset hasil-hasil Pemulihan kepada Pemerintah Aceh, di Banda Aceh 13 Februari 2008. Secara umum, total nilai aset hasil Pemulihan se-Aceh-Nias telah mencapai sekitar Rp14,49 trilyun atau 73 persen dari total realisasi anggaran per semester pertama 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Pemda, porsi perencanaan yang lebih besar, serta porsi menyajikan progres yang signifikan dan terukur dalam segenap kegiatan Pemulihan.

Kendala selama masa tanggap darurat yang diwarnai kesulitan logistik, telah berlalu, yang kemudian pada fase berikutnya, tongkat kepemimpinan diambil-alih oleh BRR. Meski demikian, di sana-sini dirasakan masih ada kelemahan koordinasi. Keluhan-keluhan aktor maupun masyarakat, meski banyak yang berhasil dituntaskan, banyak juga yang belum menjadi poin penting untuk diteruskan ke langkah-langkah yang lebih strategis dan praktis alih-alih teronggok sebagai rekomendasi semata.

Satu contoh seperti dana rehabilitasi perumahan yang menimbulkan pro-kontra itu, tetap direalisasikan walau apapun risikonya *(baca kotak "Duduk Perkara Perumahan")*. Hal tersebut, diakui, juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan pola hubungan kerja yang kurang selalu simetris antara Satker BRR dengan masyarakat maupun Pemda setempat.

Masalah-masalah semacam itu telah menjadi rekomendasi penting yang akan ditindaklanjuti dalam CFAN keempat yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2008. Pertemuan tersebut tentu akan menjadi forum tingkat tertinggi yang akan meninjau perkembangan proyek dan menetapkan prioritas-prioritas ke depan, terutama terkait penuntasan kegiatan Pemulihan. Tantangan yang menarik adalah, bagaimana mempertautkan lembaga-lembaga yang masih akan terus mengawal pasca-Pemulihan—terutama proyek-proyek bertahun jamak—dengan elemen lokal bersangkutan untuk kepentingan pembangunan kedepan.

Semua pihak semakin memahami bahwa, di atas kertas, koordinasi memang relatif lebih mudah dicetuskan, namun oleh besarnya skala program

dan jumlah pelaku, realisasi koordinasi telah terbukti tidak semudah itu. Oleh karena itu, menimbang pengalaman selama 2005 hingga medio 2008, dan demi membuka kesempatan lebih besar pada elemen lokal, ada banyak dorongan untuk memutar arah koordinasi. Arah yang dimaksud adalah, dari yang sekadar berbagi informasi, menjadi menyusun langkah-langkah strategis bersama yang serealistis mungkin.

Akan halnya 800-an ratusan organisasi yang melibatkan ribuan orang di dalamnya, Pemerintah menyadari akan pentingnya memodifikasi persyaratan tertentu mengenai layanan administratifnya demi menjawab kebutuhan proses Pemulihan. Kebutuhan itu terutama seputar persyaratan yang berhubungan dengan izin operasional dan bekerja bagi institusi/ individu asing, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak internasional dan ekspedisi antarprovinsi untuk material program Pemulihan.

Untuk itu, sejak November 2005, BRR dilengkapi dengan Tim Terpadu. Tim Terpadu BRR semula dibentuk ketika BRR dihadapkan pada permasalahan 1.400-an kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Belawan, Medan, pada Mei 2005. Permasalahan saat itu, terkait dengan aturan bea-cukai Pemerintah Pusat yang kurang fleksibel terhadap dinamika dan tuntutan kondisi pascabencana.

Tim Terpadu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69/2005, menjadi bagian dari koordinasi BRR. Berangkat dari kondisi yang serbadarurat dan serbasederhana *(baca kotak "Bermula dari sepasang Meja-Kursi"),* Tim Terpadu BRR tampil secara meyakinkan dengan sejumlah inovasi dan gebrakannya. Inovasi utamanya adalah, layanan penting Pemerintah ditampung di bawah satu atap dengan menggabungkan dan memodifikasi prosedur untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi secara efektif-efisien. *One stop service,* istilahnya.

Melalui tim ini, berbagai izin tinggal bagi orang asing telah disetujui. Dan pada saat bersamaan, pendaftaran ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, dan Kepolisian, telah dikoordinasi. Pendaftaran badan internasional juga dikerjakan Tim Terpadu BRR, termasuk untuk badan lokal, nasional, dan internasional yang memperoleh surat rekomendasi pengimporan bantuan Pemulihan.

Prakarsa yang dilancarkan Tim Terpadu BRR telah membuka pintu bagi kerjasama dan koordinasi antardepartemen di Indonesia ke depan, khususnya ketika menghadapi ketidaknormalan situasi bencana. Pengalaman layanan seatap yang ditempuhnya, telah mengilhami sejumlah instansi lain, baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam mengefisienkan pelayanan dan koordinasi.

Telah tercatat. Hamparan rumah-rumah baru di Krueng Raya, Aceh Besar, yang telah selesai dibangun ini, adalah bagian dari 100.000-an unit rumah yang tercatat dalam pangkalan-data GIS Pusdatin-BRR. Melalui GIS, setiap rumah dapat diketahui persis letak, wujud, serta pemiliknya. Gambar diambil pada 29 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 13:

Duduk Perkara Perumahan

Permasalahan di sektor perumahan yang banyak dijumpai ternyata bukan didominasi oleh perkara teknis, melainkan lebih pada perubahan budaya bertempat tinggal. Kendati indikasi menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen (11.000-an unit) rumah BRR telah dihuni, namun keluhan mengenai rumah bantuan yang belum dihuni tak kunjung reda.

Apabila alasannya adalah karena kurang lengkapnya PSD jalan dan air bersih, BRR mengakui bahwa di beberapa titik memang masih membutuhkan waktu lebih lama untuk direalisasikan. Namun apabila alasannya karena ketaktersediaan listrik, tampaknya tidak sepenuhnya demikian.

Kasus yang umum, adalah seperti yang terjadi di sebuah desa di Aceh Barat. Sebelum tsunami, semua juga tahu bahwa di desa itu prasarana penerangan memang belum tersedia. Namun semenjak masyarakat desa itu ditampung di barak yang dilengkapi dengan jaringan listrik terbaik dan gratis, malah membuat mereka enggan menghuni rumah permanen jika Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum kunjung memasang aliran listrik. Konteks situasi inilah yang jarang disadari oleh warga alih-alih NGO.

Ketidakpuasan pada PLN kian bertambah ketika beberapa oknumnya melakukan praktik pengutipan biaya. Padahal sudah jelas, untuk Provinsi Aceh, biaya listrik rumah bantuan sepenuhnya ditanggung BRR. Pengurusan kelistrikan pun telah dipermudah, tidak perlu jauh-jauh ke Banda Aceh, cukup di kabupaten/kotanya masing-masing.

Pada sisi lain, PLN terkadang juga ragu untuk memasang kalau-kalau nanti pembayarannya tidak dilunasi. Akhirnya PLN lebih memprioritaskan kontraktor yang tergabung dalam anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) sebagai jaminannya. Namun masalahnya kemudian, tak semua kontraktor yang ada, sudah terdaftar di AKLI.

Adapun jika masalahnya adalah keluhan rumah yang belum dihuni dan menjadi rusak, sudah barang tentu jika rusaknya parah, akan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengendalian Mutu Konstruksi (PPMK)-BRR. Tim inilah yang menerbitkan rekomendasi untuk perbaikannya kemudian.

Namun permasalahannya bukan sesederhana itu. Opini masyarakat marak menyatakan bahwa, semua konstruksi bangunan rumah bantuan tergolong tak layak. Padahal banyak di antaranya lebih bermuara pada minim atau bahkan tiadanya perawatan pascakonstruksi yang sepenuhnya merupakan kewajiban pihak penghuni. Rentang waktu setahun pascaperampungan bangunan, tentu saja membutuhkan perawatan intensif. Dikarenakan tak sedikit penghuni yang berhak masih ogah-ogahan menempati, terang saja perawatannya pun terabaikan. Konteks semacam ini acapkali juga kurang dimengerti banyak pihak.

Demikian pula soal kemubaziran penyediaan kamar mandi dan kakus *(water closet, WC)* sebagai satu kesatuan sarana rumah. Tidak mudah memang untuk menerapkan sarana kesehatan tersebut di tengah kultur masyakarat yang masih didominasi oleh pandangan bahwa, tidak cukup elok menyatukan "tempat kotor" dengan rumah. Contohnya di Bireuen, banyak kamar mandi dan WC yang akhirnya teronggok menjadi gudang penyimpanan.

Belum lagi soal penyediaan air, misalnya ketiadaan sumber air yang terpusat dan buruknya kualitas air setempat, padahal permintaan di wilayah bersangkutan merupakan sebuah keharusan. Semua persoalan tersebut, meski masih ibarat lingkaran setan, tapi dalam rentang waktu tersisa, tetap akan diupayakan jalan terbaik untuk memutusnya.

Kotak 14:

Bermula dari Sepasang Meja-Kursi

Siapa sangka Tim Terpadu BRR yang sangat populer, khususnya di kalangan pekerja asing kemanusiaan itu, mengawali kerjanya dari sepasang meja-kursi? Padahal tugas tim itu termasuk unit layanan garis depan. Ia lah yang melayani staf asing saat mengurus keimigrasian dan beragam urusan NGO/Non-NGO Asing, pengapalan, kepolisian dan setumpuk tugas lainnya di Aceh-Nias kala itu.

Ceritanya bermula dari Gedung Utama BRR Lueng Bata, Juni 2005 lampau. Tim pertama yang tak lain adalah Ibu Nannie Hudawati, sang pimpinan, bersama Bapak Syukri Sulaiman sebagai staf generasi perintis, berjuang untuk mendapatkan ruang kerja. Dalam situasi serbadarurat itu, akhirnya diperolehlah jatah sepasang meja-kursi. Mereka masih ingat, di tengah kesibukan pelayanan, bila meja-kursi tersebut tidak lekas-lekas diduduki, pasti akan diserobot orang.

Syukurlah keadaan segera berakhir usai Bu Nannie bertemu dengan salah satu deputi BRR. Akhirnya disepakati bahwa, Tim Terpadu BRR-lah unit pertama yang akan dibangunkan "kantor gerbong" di sekitar selasar, lokasi kantor saat ini. Unit-unit lain, menyusul.

Sembari menunggu gedung jadi, suatu kali Kabapel BRR, Kuntoro Mangkusubroto, menyaksikan suasana kerja Tim Terpadu BRR yang serbadarurat. Terkadang jongkok, bekerja sambil berdiri, hingga akhirnya Kabapel meminta mereka pindah ke sebuah tenda—yang juga tak kalah daruratnya—di sekitar gedung

Tiga tahun telah lewat. Aktivitas sehari-hari di Tim Terpadu-BRR, 1 Februari 2006. Tiga tahun sudah Tim Terpadu-BRR bekerja. Pada masa transisi (1 September 2008 - 16 April 2009). Foto: BRR/Arif Ariadi

utama. Sempat pula dipinjami suatu ruangan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD di kawasan Prada, Banda Aceh, sebelum akhirnya menempati kantornya sekarang di Lueng Bata. Kantor terakhir, sebentar lagi juga akan segera mereka tinggalkan. Secara definitif layanan Tim Terpadu BRR berakhir 30 Agustus 2008, dan untuk menuntaskan pelaporan kinerjanya ditetapkan 30 September 2008.

Memasuki tahun keempat, tampaknya kebutuhan keluar-masuknya warga asing yang bekerja sebagai staf NGO dan non-NGO maupun aktivitas pengiriman barang bantuan dengan kebutuhan kelengkapan dokumennya telah kian surut. Dari semula 500-an lembaga NGO dan non-NGO, kini tersisa 101 lembaga. Dari ribuan staf pekerja asing, kini tinggal 400-an, termasuk anggota keluarganya.

Telah lebih dari tiga tahun berbagai unit kerja Tim Terpadu BRR, dari unsur-unsur departemen serta Kepolisian Daerah NAD, melayani. Semua tugas dan kewenangannya akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat—kecuali unsur Polda yang tentu saja tetap dikembalikan kepada satuannya di Aceh.

Pada masa transisi per 1 September 2008 hingga 16 April 2009, Pemerintah Pusat tetap memberikan kemudahan dan fasilitas, serta memproseskan perizinan atas rekomendasi BRR. Dalam proses tersebut, Ketua Tim Terpadu ditunjuk menjadi pemberi rekomendasi sekaligus *focal point* dengan Pemerintah Pusat maupun instansi yang berwenang.

Sungguh suatu pengalaman berharga bahwa, untuk pertama kali sebuah unit kerja lembaga pemerintah bekerjasama dan melibatkan lintas-K/L. Mengesampingkan kecenderungan ego sektoral, demi memecah kebuntuan-kebuntuan di lapangan dalam rangka pembangunan-kembali dari bencana terhebat seabad terakhir, itulah yang menyatukan tim yang berawal dari sepasang meja-kursi itu.

Pengelolaan Informasi

Dalam lingkup fungsinya sebagai koordinator saja, BRR telah merasakan adanya kemendesakan akan kebutuhan data dan informasi yang akurat; belum lagi dalam lingkup implentasi. Oleh karena itu, dukungan data/informasi yang teratur dari para Mitra menjadi sangat berharga. Ditambah lagi, dalam Perpu Nomor 2/2005 (pasal 17 huruf e) telah ditegaskan bahwa, "Badan Pelaksana mempunyai wewenang mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Pemerintah Pusat, Pemda, dan pihak lain yang terkait."

Kebutuhan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sistem data untuk menyediakan tinjauan umum mengenai Pemulihan secara konsisten, baik yang *on-* maupun *off-budget,* di samping untuk mengidentifikasi berbagai kesenjangan yang masih laten. Mekanisme pelaporan internal yang ketat dan pangkalan-data Pemulihan Aceh-Nias RANdatabase yang telah dilakukan hingga kini, dengan demikian, telah melengkapi upaya-upaya BRR untuk mengatasi hal tersebut.

Setelah persetujuan proyek dikeluarkan melalui mekanisme PCN, BRR melakukan pemantauan pelaksanaan program melalui piranti-piranti teknis yang dimiliki. RANdatabase, salah satunya. Secara spesifik, RANdatabase diarahkan untuk kepentingan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sistem pangkalan-data penyampaian PCN dan pelaporan proyek tersebut berbasis jaringan *(web),* sehingga dapat diakses dari mana saja. Sistem RANdatabase bersifat swalayan, artinya, yang memasukkan data adalah pihak yang terkait langsung dengan proyek yang dalam hal ini direkomendasikan para mitra/implementor tingkat pertama.

Sehubungan dengan transparansi, RANdatabase menyediakan hak akses bagi publik. Publik dapat mengakses informasi di RANdatabase tanpa mendaftar *(account)* terlebih dulu. Misalnya untuk mengetahui kemajuan suatu proyek di suatu wilayah, publik bahkan dapat menelusuri hingga tingkat desa. Lebih detail lagi, RANdatabase menyajikan informasi tentang siapa melakukan apa, di mana, dan bagaimana progres proyeknya. Dengan demikian, RANdatabase dapat merangkul partisipasi publik untuk turut memantau perkembangan proyek di lapangan.

Pihak yang berkepentingan terhadap proyek harus memiliki identitas pengguna *(user ID)* dan kata kunci untuk *account.* Dengan prosedur tersebut, pemilik proyek dapat secara mandiri memasukkan, menyunting, hingga memutakhirkan data proyeknya. Pemilik proyek diwajibkan menyampaikan dan memutakhirkan laporan progres kegiatan setidaknya sebulan sekali.

RANdatabase menyediakan informasi pengelolaan bagi proses koordinasi dan pengendalian proyek *on-* dan terutama *off-budget* agar tidak terjadi tumpang-tindih. Sistem informasi ini memiliki aplikasi lengkap dan mudah dipelajari. *Outreach team* dibentuk untuk memfasilitasi pelaksana proyek, lembaga agen pendanaan, dan sumber pendanaan untuk memasukkan dan menggunakan data di RANdatabase. Tim ini menjadi penjaga gawang tingkat keakuratan data, selain sebagai penghubung berbagai pihak terkait proyek.

Sistem yang dibangun atas kontribusi informasi berbagai NGO dan instansi itu kini telah mencakup informasi tentang 12.000-an proyek. Informasi keuangan, seperti komitmen dan pencairan, telah menggambarkan aliran pendanaan yang menopang proses pemulihan serta menjamin derajat transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, RANdatabase masih memerlukan perbaikan dalam segi mutu maupun validasi data. Kemudahan penggunaan dan fokus pada bidang-bidang tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan utama, terus disempurnakan.

Untuk kepentingan publik yang lebih luas, BRR menyediakan laman (situs) www.e-aceh-nias.org yang merupakan terminal utama pengaksesan informasi seputar progres Pemulihan Aceh-Nias. Laman

Jemput bola. Beberapa tenaga magang sedang bekerja di unit SIM-C yang sudah melekat di kompeks gubernuran Aceh, Banda Aceh, pada 24 Oktober 2008. Langkah SIM-C merupakan salah satu praktik terbaik penguatan Pemda secara "jemput bola" yang ditempuh BRR. Foto: BRR/Arif Ariadi

resmi BRR ini memuat informasi termutakhir yang dapat dijadikan bahan rujukan koordinasi oleh para pemangku kepentingan bersangkutan.

Di dalamnya disebarkan publikasi mengenai seluruh kegiatan di Aceh-Nias yang diselenggarakan oleh Donor/NGO, masyarakat, hingga institusi pemerintah. Informasi mengenai *trust fund,* Multi-Donor Fund, kegiatan di Nias, kegiatan CFAN, siaran pers, siaran berkala, ketenagakerjaan, keuangan, program dan proyek, dan fitur-fitur lainnya, disediakan. Media ini juga bermakna bagi ikhtiar transparansi kegiatan Pemulihan, termasuk anggaran, pengadaan (barang/jasa), serta laporan pertanggungjawaban BRR dan Mitra. Laman ini telah di-*hit* lebih dari 150 juta pengunjung sejak diluncurkan pada 4 April 2005.

Keberhasilan penting lainnya yang tercatat pada Februari 2006 dalam hal manajemen informasi adalah pembentukan Pusat Informasi Geospasial dan Pemetaan (Spatial Information and Mapping Centre, SIM-C) BRR. SIM-C BRR sebenarnya merupakan peralihan sistem informasi geografis Pusat Informasi Kemanusiaan (Humanitarian Information Center, HIC)/ Sistem Pengelolaan Informasi PBB (United Nations Information Management Systems, UNIMS) ke tangan BRR.

Beberapa tahun setelah tsunami, ratusan pihak turut terlibat dalam kegiatan Pemulihan. Tentu saja kegiatan itu telah menghasilkan data yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu jenis data yang amat berperan penting, dan oleh karenanya dapat dijadikan acuan, untuk proses pembangunan jangka panjang adalah data yang bersifat geospasial. Guna memelihara berbagai data geospasial yang tersebar itu, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa mendokumentasi keberadaannya. Ia harus sekaligus menjadi penghubung antarlembaga pemilik dan pembutuh data. Untuk itulah SIM-C BRR dibentuk.

Data tata-ruang, misalnya peta standar dan peta beresolusi tinggi untuk keperluan administratif, sektor, keruangan, dan tematik, baik bagi lingkup provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan, adalah lingkup pelayanan SIM-C BRR. Selain itu, SIM-C BRR juga menyelenggarakan pelatihan dan dukungan bagi para pengguna, antara lain terkait dengan penggunaan informasi spasial, pengemasan data berbasis sektor, serta produk-produk peta lainnya.

Berbagai perangkat koordinasi dan pengendalian proyek telah diwujudkan untuk menjamin bahwa proses Pemulihan berjalan sesuai prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Piranti-lunak *(software)* dan piranti-keras *(hardware)* yang sedang terus dikembangkan juga diimbangi dengan pengembangan *brainware*, atau perilaku dan kompetensi para pengguna. Tujuannya, agar hambatan teknis dapat dimanfaatkan sebagai tantangan untuk lebih mengoptimalkan kedua perangkat sebelumnya.

Dukungan untuk mengembangkan kapasitas SDM instansi Pemda, menjadi terobosan SIM-C BRR yang brilian. Apalagi mengingat bahwa durasi peran SIM-C BRR hanya sampai 2009, maka diperlukan instansi tertentu dalam Pemda untuk mengambil perannya. Berkatnya, telah banyak SDM Pemda yang mahir menggunakan informasi tata-ruang, terutama untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan. Kombinasi antara kesiapan SDM Pemda dan limit *ad hoc* SIM-C BRR itulah yang kemudian mendorong SIM-C BRR membidani lahirnya Pusat Data Geospasial Aceh (Aceh Geospatial Data Center, AGDC) pada Desember 2006.

Jauh sebelumnya SIM-C BRR perlu melekat dulu di kantor Bappeda Aceh, Jalan Teungku Daud Beureu-eh 26, Banda Aceh, untuk mewujudkan AGDC. Lamannya, http://www.gdc.nad.go.id. AGDC mendukung pemanfaatan dan berbagi data dan informasi geospasial antarinstitusi, baik pemerintah, NGO, maupun swasta, yang terlibat dalam proses pembangunan di Aceh. Dan secara lebih khusus, AGDC bertujuan untuk:

- menyediakan akses terhadap data dan informasi geospasial secara mudah dan cepat,

Bagan 5:

Tampilan awal laman *front-end* AGDC sebelum direnovasi

- mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan,
- meningkatkan pemahaman akan kegunaan data informasi geospasial.

Terutama berkat dukungan pendanaan Satker BRR - Pembinaan Keuangan dan Perencanaan, AGDC kini telah memiliki sarana yang memadai untuk melayani informasi tentang ketersediaan data geospasial, baik yang berada di AGDC sendiri maupun di instansi lain. Secara sekilas, berikut digambarkan skema sarana dukungan piranti keras dan lunak yang tersedia di AGDC:

Langkah SIM-C BRR ini hanyalah salah satu contoh dari sekian praktik terbaik penguatan Pemda secara "jemput bola" yang dilakukan BRR. Dan kini, secara bertahap, AGDC telah semakin mampu mengambil peran SIM-C BRR, terutama dalam hal penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian data geospasial. Portal internet AGDC siaga dengan piranti lunak *Opensource Geonetwork*. Dengan piranti tersebut, siapapun dapat mencari informasi tentang keberadaan data melalui internet. AGDC juga telah mampu menyelenggarakan rupa-rupa kegiatan yang sebelumnya dilakukan SIM-C BRR, antara lain:

- memasukkan dan memutakhirkan data instansi pemerintah provinsi;
- memutakhirkan peta tematik, terutama yang terkait Pemulihan;
- melakukan kodifikasi wilayah administrasi pemerintahan menuju *single ID;*
- verifikasi dan pemetaan luas hutan Aceh;
- memberikan pelatihan mengenai sistem informasi geospasial *(geospatial information system,* GIS) tingkat dasar dan lanjutan bagi aparat Pemda;
- melayani permintaan data geospasial.

Baru-baru ini AGDC juga telah merilis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Aceh (Sirenda). Sistem manajemen berbasis teknologi informasi ini dibangun dalam rangka perencanaan pembangunan se-Aceh. Dengan pangkalan-data *online* dan internet portal yang dimilikinya, kini, proses pengaksesan data profil daerah dan indikator pembangunan menjadi semakin mudah saja. Pengaksesan dapat dilakukan secara terdistribusi melalui internet. Selain itu, di Kantor Bappeda Aceh, tersedia pula pusat data dan ruang pamer *(show room)* data dan informasi.

Bagi Aceh, pembentukan AGDC telah menjadi tantangan sekaligus peluang, terutama karena Aceh sudah menjadi pioner dalam pengimplementasian program Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). AGDC merupakan sebuah upaya membangun basis data pembangunan dengan melibatkan seluruh dinas dan Pemda kabupaten/kota se-Aceh. Prestasi ini sekaligus telah mengukir nama Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia pengimplementasi IDSN dengan dukungan teknologi informasi dan data yang cukup memadai. Pasca-Pemulihan pada 2009 kelak, Pemerintah Aceh sudah menyatakan komitmennya untuk siap mengambil alih seluruh tanggung jawab operasional. Ini tentu merupakan sebuah warta yang menggembirakan.

Integrasi data. Empat pegawai Pemdaprov Aceh berdiskusi di AGDC di kompleks Bappeda Aceh, Banda Aceh, 27 Oktober 2008. Prakarsa membangun AGDC—dibidani SIM-C BRR sejak Desember 2006—merupakan ikhtiar untuk mengintegrasikan pangkalan-data pembangunan dengan melibatkan seluruh dinas dan Pemda kabupaten/kota se-Aceh. Foto: BRR/Arif Ariadi

Bagan 6:
Skema sarana dukungan piranti-keras (*hardware*) dan piranti-lunak (*software*) di AGDC

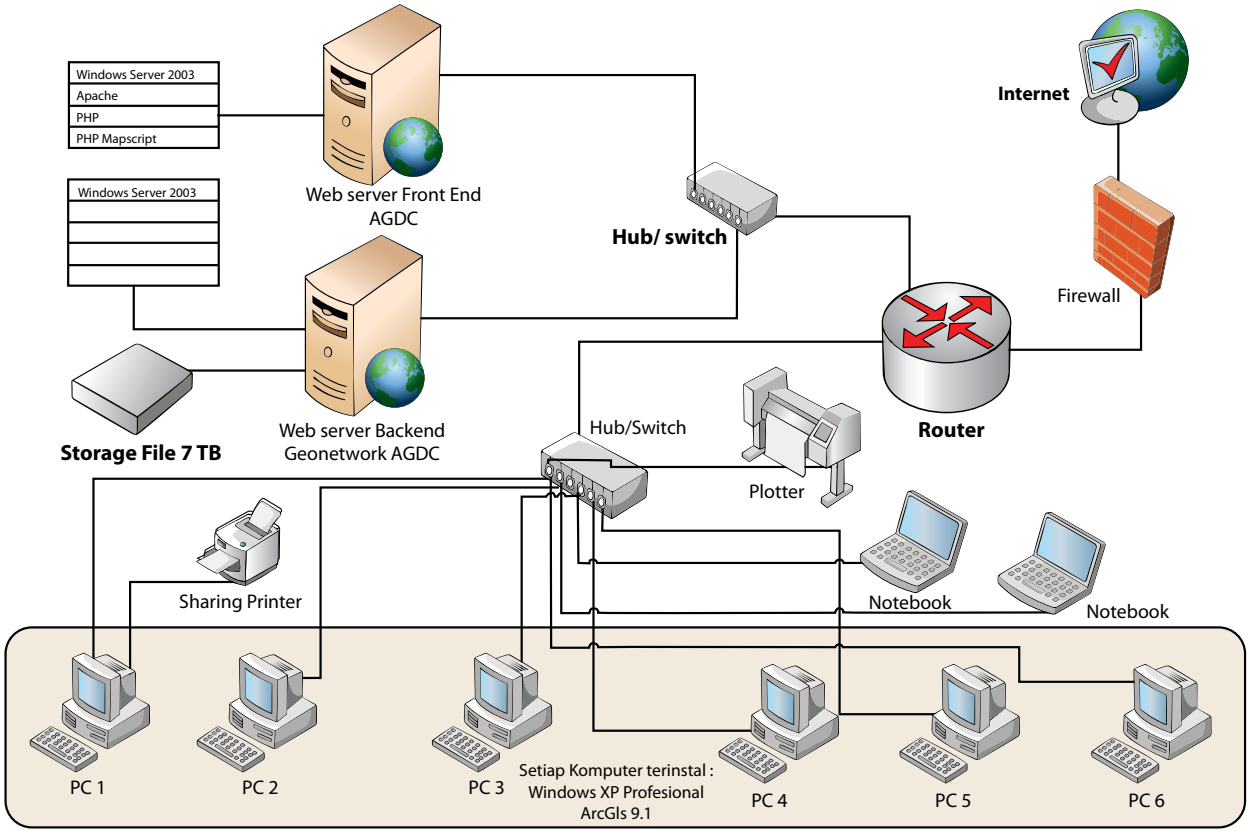

Kegiatan Pemulihan telah menghasilkan aset berupa sarana-prasarana yang tersebar di mana-mana. Indikator statistik kualitas kehidupan masyarakat yang merupakan dampak pembangunan yang terjadi pun mengalami perubahan pesat. Informasi mengenai aset dan statistik kualitas kehidupan masyarakat tersebut menjadi dasar yang kuat dalam membantu Pemda dalam melakukan perencanaan pembangunan agar lebih terarah.

Semua data aset dicatat dan dikumpulkan, sehingga akan diketahui persis letak dan wujud asetnya. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi GIS. Sistem ini seluruhnya dibangun dan dikembangkan sendiri oleh karyawan BRR, dengan dukungan dana sepenuhnya *on-budget*, tanpa bantuan konsultan.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)-BRR tengah melakukannya untuk mencatat seluruh rumah hasil Pemulihan se-Aceh-Nias. Dari 112.000 rumah, sudah 100.000-an yang tercatat dalam GIS. Jumlah itu tentu akan terus bertambah seiring dengan selesainya seluruh pembangunan rumah.

Informasi yang dapat diperoleh dari GIS antara lain berupa titik koordinat lokasi rumah, nama pemilik atau penerima manfaat, NGO yang membangun, lembaga donor yang mendanai, dan lain-lain. Melalui aplikasi yang merupakan bagian dari Simas BRR itu, titik lokasi setiap rumah hasil Pemulihan bisa dilihat sampai ke tingkat desa, lengkap dengan foto unit rumahnya. Ini membuat semuanya menjadi transparan dan akuntabel.

Dengan banyaknya aset rekonstruksi yang telah dihasilkan, dampak pada Pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang menyeluruh, merupakan indikator kunci bagi keberhasilan upaya Pemerintah, baik BRR maupun Pemda setempat. Capaian-capaian tersebut hanya akan bermanfaat jika pembangunan ke depan terus diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Selain itu, salah satu Badan PBB, Badan PBB mengenai Koordinasi Pemulihan (*United Nations Office of the Recovery Coordinator,* UNORC), kini telah meluncurkan *AcehInfo* yang sejatinya merupakan sejenis pangkalan-data. *AcehInfo* menyajikan indikator-indikator kualitas pembangunan manusia, terutama yang terkait Tujuan Pembangunan Milenium *(Millenium Development Goals, MDG)* 2015. Di dalam laman www.acehinfo.nad.go.id tersebut terdapat 270 indikator dengan lebih dari 75.000 titik data. Sumber data yang digunakan adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas-dinas Pemerintah, BRR, K/L, dan lain-lain. UNORC juga telah berkomitmen bahwa nantinya, *AcehInfo* akan diserahkan penuh pemanfaatannya kepada Pemda Aceh.

Berdasarkan data 2006 *AcehInfo* yang bersumber dari Dinas Kesehatan Aceh, misalnya, tingkat kematian ibu per 100.000 kelahiran bayi bisa langsung diketahui. Dari *AcehInfo* pula, dapat diketahui bahwa hanya sepertiga kabupaten/kota di Aceh yang angkanya di bawah 150, misalnya saja Aceh Utara, Aceh Besar, dan Nagan Raya. Ke depan, tiga perangkat teknologi pangkalan-data tersebut (GIS, *AcehInfo,* dan AGDC), diharapkan akan memperkuat kokohnya landasan bagi perencanaan pembangunan daerah oleh Pemda. Dengan demikian, pembangunan daerah tentu akan lebih terarah.

Pencegahan Penyelewengan

Dibandingkan sejumlah K/L lain, hingga kini, tak sedikit pihak yang mengakui bahwa belum pernah ada satu tekanan *(pressure)* dari masyarakat pada suatu

RTRW terpadu. Pemukiman baru di kawasan ngarai dekat Lhokseudu, Aceh Besar, dibangun berdasarkan rencana tata-ruang dan wilayah (RTRW) yang terpadu, 12 Juni 2008. Pada masa-masa mendatang, perencanaan seperti demikian, akan semakin menjadi pertimbangan utama dalam hal permukiman dan perkotaan. Foto: BRR/Arif Ariadi

institusi pun yang sedemikian besar sebesar yang dialami BRR. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya temuan, yang telah maupun masih diduga, di BRR melebihi apa yang ditemukan oleh sejumlah lembaga audit dan NGO antikorupsi pada lembaga lain. Artinya, BRR dan program rekonstruksi benar-benar telah menjadi sorotan banyak pemerhati dan masyarakat luas terkait pelaksanaan tata-kepemerintahan yang bersih *(clean government).*

Bukan sesekali tercium kecenderungan bahwa, semakin pucuk pimpinan di BRR menegaskan BRR antikorupsi, maka semakin giat elemen masyarakat

mengorek-korek apa praktik KKN di BRR. Disadari benar bahwa, memang BRR tidak akan mungkin sepenuhnya terhindar dari praktik KKN, karena dari 1.200-an orang karyawannya, tidak tertutup kemungkinan ada segelintir yang menyeleweng. Namun yang harus dan telah dipastikan adalah bahwa, setiap orang yang terbukti terlibat dan memperkaya diri, akan diproses.

Fluktuasi inflasi dan harga material, merangkak naik seiring dengan naiknya ekspektasi masyarakat penyintas. Tuntutan masyarakat madani dan internasional agar aktor Pemulihan tak sekadar membangun tapi lebih baik dari sediakala *(build back better),* sama kerasnya dengan tuntutan untuk tetap mematuhi aturan main pengadaan barang/jasa (Keputusan Presiden Nomor 80/2003) yang semua orang tahu lebih cocok untuk kondisi normal.

Demikianlah, di medan Pemulihan, tuntutan akan percepatan pembangunan dan kompleksitas masalah yang menyertainya, tak jarang malah menelorkan pendekatan yang berbeda dibandingan dalam kondisi normal. Kata "penyimpangan" menemukan makna dan definisinya secara tegas—sesekali abu-abu—dalam dwirupa: "penyelewengan" atau "nonprosedural".

Keduanya memiliki konsekuensi dan implikasi yang berlainan. Praktik penyelewengan pasti berniat nonprosedural, namun prakarsa nonprosedural tidak selamanya berniat menyeleweng. Salah satu contoh prakarsa BRR yang cukup mengundang kontroversi adalah peluncuran dana perwalian *(trustfund)* pada TA 2006.

> Memasuki akhir TA 2006, BRR berinisiatif memanfaatkan sisa dana yang belum terserap untuk diluncurkan ke TA berikutnya. BRR kemudian mendapatkan izin prinsip pada 22 Desember 2006 dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara Nomor S-9264/PB/2006 untuk membuat trustfund. Nilainya mencapai Rp2,2 trilyun (±AS$246 juta) atau 21 persen dari pagu TA 2006 sebesar Rp10,5 trilyun (±AS$1,2 milyar). Semula dana ini disiapkan untuk satu semester periode dan sudah harus dicairkan sebelum 1 Juli 2007. Namun, mengingat pentingnya keberlanjutan sektor-sektor terkait, dan pada limit waktu tersebut semua trustfund BRR belum juga termanfaatkan secara optimal, periode ini kemudian diperpanjang hingga 30 September 2007 setelah disetujui melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-38/PB/2007 (29 Juni 2007). Tak semua bidang dapat ditalanginya, hanya perumahan, prasarana, dan tata-guna lahan (sesuai Peraturan Kabapel BRR Nomor 31/PER/BP-BRR/XII/2006, 26 Desember 2006). Meski diniatkan untuk menyediakan jumlah rumah yang terus bertambah dalam rangka memenuhi kebutuhan para penyintas yang masih tinggal di huntara, keputusan untuk menetapkan trustfund ini ternyata menuai banyak kritik dan kontroversi.

Boleh dikata, selama 30-an tahun konflik, semua proyek pembangunan di Aceh relatif stagnan. Kondisi semacam itu subur bagi praktik KKN. Tak lama setelah tsunami, trilyunan rupiah mengucur. Megaproyek terlaksana di mana-mana. Banyak orang yang mendadak jatuh miskin, tapi tak sedikit pula yang mendadak kaya. Bahkan di pelosok-pelosok "daerah merah" (basis konflik) yang dulunya orang enggan ke sana, pembangunan juga menyentuhnya, membuka harapan baru.

Kendati pada awalnya dirundung kebimbangan, sejumlah Donor dan negara sahabat akhirnya memutuskan untuk mengalirkan sumbangannya, baik dalam bentuk hibah *(grant)* maupun pinjaman *(loan)*. Paris Club telah mengamanahkan dananya melalui mekanisme moratorium hutang, dan kini seratus persen dari amanah AS$3 milyar itu telah teralokasi ke dalam berbagai proyek Pemulihan.

> Pada 9 Maret 2005 Paris Club bersidang, dan memutuskan untuk memberikan moratorium utang kepada negara-negara landaan tsunami hingga 31 Desember 2005. Tak terkecuali Indonesia, juga mendapatkan moratorium. Pembayaran hutang yang jatuh tempo pada 2005 pun ditangguhkan selama lima tahun dengan masa tenggang setahun. Alhasil, Pemerintah, pada TA 2005 lebih lapang ruang geraknya dalam menyediakan dana Pemulihan. Meski demikian, moratorium itu adalah penundaan beban, oleh karena itu Pemerintah harus mempertimbangkan beban anggaran pada saat penundaan tersebut jatuh tempo.

Dari total AS$7,2 juta *pledge* donor yang dikucurkan, baik melalui mekanisme *on-* maupun *off-budget,* hingga saat ini, AS$6,7 juta telah berstatus komitmen. Itu artinya, level kepercayaan masyarakat internasional terhadap penanganan Pemulihan Aceh-Nias sangat meyakinkan, yakni sekitar 91 persen.

Presentase komitmen dana tersebut pada dasarnya telah membuktikan bahwa, meski Aceh-Nias tinggi tingkat korupsinya, namun kepercayaan mereka, terutama pada BRR, luar biasa besarnya. Mereka yakin bahwa uang yang disumbangkannya benar-benar dikawal secara benar dan sungguh-sungguh. Kepercayaan yang luas itulah yang semakin menumbuhkan banyak komitmen baru. Tanpa adanya suatu hasil yang konkrit di lapangan yang menunjukkan bahwa BRR berhati-hati *(prudent)* dalam mengawalnya, hal itu tentu sulit didapatkan.

Sesuatu yang konkrit itu, jika dilihat secara detail, memang tidak seindah apabila dilihat dari kejauhan.

Upaya preventif SAK. Sejak mengawali kiprahnya pada 13 September 2005, SAK telah menerapkan dua strategi antikorupsi: preventif dan represif. Strategi preventif, yang menjadi kegiatan utama SAK, mencakup monitoring rutin, monitoring khusus, dan sosialisasi antikorupsi. Salah satu mata acara sosialisasi antikorupsi adalah pelatihan bagi para penyuluh agama dan khotib mesjid se-Banda Aceh, 20 Agustus 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

Transparansi dan Pakta Integritas yang diterapkan BRR dengan cukup detail, kini semakin menuai tantangan. Standar kompetensi dan integritas yang dulu sangat dikedepankan, saat ini tantangannya semakin berat saja. Kendati semua datang bertubi-tubi, namun BRR tak bergeming, karena jika mundur sekali saja dan menolerir ketidakkonsistenan, tentu akan menggugurkan apa yang selama ini telah diperjuangkan.

Bukan hanya BRR yang dituntut memiliki akuntabilitas tinggi, termasuk tegas terhadap antikorupsi, namun para Mitra Pemulihan pun demikian juga adanya. Artinya, pemberantasan tindak korupsi adalah isu yang menarik perhatian utama dalam program rekonstruksi. BRR, terlepas dari segala keistimewaannya, tetap tidak memiliki keistimewaan apapun jika sudah berhadapan dengan pemberantasan tindak korupsi. Salah satu eksponen penting dalam isu ini adalah Satuan Anti-Korupsi (SAK) BRR.

> “Jika sudah berhadapan dengan pemberantasan tindak korupsi, seperti halnya institusi publik lainnya di Indonesia, BRR memang tidak memiliki keistimewaan apapun. Hal ini telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukan BRR, Perpu Nomor 2/2005, tepatnya pasal 23 (Bab VII, Ketentuan Pidana). Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana lainnya berlaku terhadap setiap tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Perpu ini.”

Berdasarkan Peraturan Kabapel Nomor 01/PER/BP-BRR/VII/2005 (25 Juli 2005) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kabapel Nomor 30/PER/BP-BRR/XI/2006 (10 November 2006), SAK terbentuk. Tugasnya, mengawasi penggunaan dana

Pemulihan agar tetap menjunjung tinggi integritas dan bebas dari tindak korupsi.

Sejak mengawali kiprahnya pada 13 September 2005, SAK telah menerapkan dua strategi antikorupsi, yakni preventif dan represif. Strategi preventif menjadi kegiatan yang lebih diutamakan, mencakup monitoring rutin, monitoring khusus, dan sosialisasi antikorupsi. Adapun strategi represif dilakukan melalui kegiatan penelitian mendalam dan audit investigatif.

Yang istimewa dari SAK adalah bahwa, mandatnya khusus untuk memantau, memproses, dan mengadukan bila terjadi penyelewengan di dalam tubuh BRR pada sepanjang masa tugasnya. Jika dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), SAK tidak memiliki kewenangan penindakan hukum, dan KPK tidak masuk wilayah audit.

Kotak 15:

Komitmen Bersih SAK

Dalam perjalanannya, SAK telah mengalami dua kali suksesi. Di bawah kepemimpinan Kevin Evans, semula kegiatan SAK dijalankan hanya oleh enam orang. Tentu saja ini amat jauh dari ideal sebagai pengawal pelaksanaan Pemulihan. Segera setelah 30 auditor BPKP Pusat datang memperkuatnya pada September 2005, barulah tugas dan fungsi SAK menjadi lebih mantap.

Suksesi pertama terjadi pada Maret 2006. Posisi Kevin digantikan Achmad MM Jogasara. Per 31 Mei 2007, personel SAK telah mencapai 48 orang, mencakup 25 auditor, 9 auditor yunior, dan 13 tenaga administrasi. Achmad memimpin hingga Juni 2007.

Suksesi berikutnya berada di tangan Yustra Iwata Alsa, sejak Juni 2007 hingga sekarang. Sepanjang periode ini, SAK telah melakukan banyak perubahan penting, terutama terkait pengelolaan pengaduan, pelaksanaan audit, dan pemantauan tindak lanjut. Saat ini, gawang SAK telah dijaga oleh 46 personel, meliputi 7 pegawai struktural, 24 auditor, 6 tenaga magang, 4 tenaga honorer, dan 5 staf biasa.

Masih juga dirasa jumlah personel tersebut kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang harus diproses. Bayangkan, jumlah pengaduan yang terkait kontrak/paket pekerjaan rehabilitasi-rekonstruksi saja mencapai 600 per tahun. Maka berdasarkan Nota Kesepahaman (*Master of Understanding,* MoU) BRR-BPKP, sebagian tugas pemeriksaan akan dilimpahkan ke BPKP oleh SAK dan Deputi Bidang Pengawasan BRR. Melalui cara ini, keduanya tak perlu merekrut terlalu banyak personel. Bagi SAK sendiri, tugas pemeriksaan dapat diturunkan derajatnya menjadi praaudit atau bahkan sekadar analisis gejala (simptom) korupsi. SAK, dengan demikian, akan lebih dapat memfokuskan dirinya pada fungsi pencegahan agar dapat memiliki jangkauan (*coverage*) pengawasan yang lebih luas, dan tentu saja efektif-efisien.

Apakah itu membuat gebrakan-gebrakan SAK menjadi lebih bertaji? Suatu kali Yustra berujar, "Saya akui, bahwa memperjuangkan gerakan antikorupsi memang tak semudah angan-angan. Tantangannya seabrek. Namun untuk itu, setidaknya, kami punya dua pedang bila ingin selamat sampai di tujuan: komitmen untuk bersih, dan kesiapan merevisi kebijakan yang tidak populis."

Memperkuat SDM keagamaan. Lokakarya Pembangunan Fasilitas Publik Berbasis Partisipatif baru-baru ini diselenggarakan untuk para pengurus mesjid, meunasah, dan dayah se-Banda Aceh dan Aceh Besar. Acara yang berlangsung di Aula Misfalah, Asrama Haji Banda Aceh, 29 Oktober 2008, oleh BRR ini bertujuan untuk membangun kapasitas SDM keagamaan. Foto: BRR/Ramadhan.

Kerangka kerjanya berangkat dari pengaduan masyarakat, baik dari internal maupun eksternal BRR. Pengaduan-pengaduan tersebut lalu diproses. Apabila ditemukan indikasi kuat pelanggaran Pakta Integritas, lebih-lebih tindak pidana korupsi, maka SAK mempunyai kewenangan untuk melakukan audit investigatif dan dapat meminta bantuan teknis dari dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP).

Sejauh ini, telah lebih dari 150 laporan diserahkan, baik ke Kejaksaan Agung, Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Polri), maupun KPK. Sebanyak 77 rekanan (kontraktor) dimasukkan ke dalam daftar hitam *(blacklist)* sejak 2005-2006 karena memiliki prestasi negatif. Mereka tidak diperkenankan lagi mengikuti tender 2008. Per Juni 2008, SAK telah berhasil membatalkan 59 paket lelang yang sarat KKN senilai Rp504 milyar lebih.

Dari segi edukasi, sosialisasi antikorupsi telah diselenggarakan SAK pada 100 jurnalis media massa, kalangan NGO, 300 guru sekolah (SMP dan SMU), tak terkecuali staf internal BRR di Aceh dan Nias *(*tentang *mindsetting* antikorupsi*)*.

Diselenggarakan pula program serupa khusus ulama, melalui agenda bertajuk "Diseminasi Anti-Korupsi bagi Penyuluh Agama dan Khatib Mesjid." Hal ini mengingat, peran ulama di Aceh sebagai agen penyebar informasi cukup strategis. Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Aceh juga akan terlibat dengan mendistribusikan Serial Khotbah Jumat "Menuju Masyarakat Anti-Korupsi" ke seluruh masjid se-Aceh.

Tak cukup dengan sosialisasi, SAK, melalui Deputi Bidang Pengawasan BRR juga aktif mendampingi Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

di lima kabupaten/kota se-Aceh sepanjang April 2008. Diperkirakan pada Juli 2008, kegiatan ini akan berakhir.

BRR tercatat sebagai badan Pemerintah pertama yang mendirikan unit antikorupsi otonom untuk mengawasi penggunaan dana Pemulihan. Dalam dinamikanya, muncul gagasan untuk lebih memandirikan SAK agar tidak berada di bawah Bapel BRR sebagai lembaga yang menjadi obyek pantauannya. Oleh karena itu, sempat akan diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) antara Bapel dan Dewan Pengawas (Wanwas) BRR pada 27 Juni 2007.

Dalam ranah penegakan hukum, SAK, seperti halnya KPK, bersifat *stakeholder compliance,* sehingga ia tidak memiliki atasan dalam pengertian struktural kelembagaan. Tidak berlebihan bila Kepala SAK, Yustra Iwata Alsa pernah mengilustrasikan, "SAK itu '70 persennya' KPK. Kami tidak memiliki atasan. Sama halnya dengan KPK, atasan kami adalah masyarakat, bukan Wanwas, Wanrah, apalagi Bapel." Dengan kata lain, SAK selalu menjalankan tugasnya berdasarkan pengkajian terhadap pelbagai informasi dan masukan dari masyarakat.

Instansi vertikal pun mendukung pelaksanaan *clean government* selama Pemulihan Aceh-Nias berlangsung. Sudah sejak awal 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka kantor perwakilannya di Aceh. Hingga kini, BPK telah melakukan banyak audit dan pemeriksaan yang terpisah terhadap berbagai organ BRR. BPK juga merupakan anggota INTOSAI. Seperti diketahui, Organisasi Tertinggi BPK-BPK se-Dunia (*International Organisation of Supreme Audit Institutions,* INTOSAI) terpandang sebagai sebuah komunitas instansi audit tertinggi internasional yang telah bertemu di Wina pada 2006. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah disepakatinya kerjasama peningkatkan pertukaran informasi di antara semua instansi audit tertinggi negara-negara Donor utama.

STRATEGI

Kehidupan baru di "Ring-1". Rumah-rumah beserta sarana-prasarana dasar baru di Kahju, Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, 30 Maret 2007, yang telah usai dibangun, menyiratkan geliat kehidupan baru. Kahju, kawasan pesisir terujung dari Pantai Timur Aceh, adalah termasuk zona "Ring-1" tsunami. Foto: BRR/Arif Ariadi

STRATEGI

Ada dua kebijakan mendasar yang semula terasa menghambat laju gerak Pemulihan. Namun belakangan, tak bisa disangkal, dua kebijakan yang merupakan amanah Rencana Induk Pemulihan Aceh-Nias itu sebenarnya telah mempersiapkan bantalan rel yang memadai bagi pembangunan berkelanjutan. *Kebijakan pertama* adalah, membentuk badan yang, paling tidak harus, setingkat kementerian agar memadai kemampuan dan kewenanganannya dalam memasinisi gerbong Pemulihan berdimensi kompleks itu. Badan tersebut adalah BRR. *Kebijakan kedua,* partisipasi masyarakat dalam pemulihan mereka sendiri harus dikedepankan.

Terhadap kebijakan pertama, tak sedikit pihak yang berpendapat, dibandingkan negara-negara lain landaan bencana, Indonesia dianggap telah memilih arah kompas yang berbeda. Akan tetapi, mengingat kondisi sosial-politik kala itu, pilihan strategis tersebut secepatnya bisa diterima. Pasalnya, pembentukan badan Pemulihan yang mandiri dan terpercaya, yang menekankan proses-proses yang sebagian digerakkan oleh masyarakat, telah menyumbangkan kontribusi berarti bagi proses lain yang juga sedang berlangsung saat itu. Proses perdamaian, salah satunya.

Akan halnya kebijakan kedua, Pemerintah seperti bermaksud mendeklarasikan bahwa, melaluinya, ia ingin belajar dengan mengoreksi kekeliruan masa lalu. Pada era Orde Baru, Pemerintah Pusat, dalam melaksanakan pembangunan, lebih mengutamakan pemberdayaan aparatur institusi vertikal, karena Pemerintah Pusat lebih memercayai mereka dalam setiap aspek dan tahapan pekerjaan. Kondisi ini, di satu sisi, memang berhasil membangun struktur birokrasi yang solid, namun ia abai terhadap partisipasi Pemda dan masyarakat, apalagi kontribusi pranata sosial-kemasyarakatan setempat.

Oleh karena itulah BRR mencoba pendekatan berbasis-masyarakat atau lebih lazim dikenal sebagai "pembangunan yang dikemudikan masyarakat *(community-driven development,* CDD)". Ini terlihat pada kebijakan-kebijakan awal BRR yang menitikberatkan pada sektor privat dan menyebabkan basis Pemulihan bergeming pada pendekatan bawah-ke-atas *(bottom-up)* ketimbang atas-ke-bawah *(top-down)*. Pendekatan pertama, meski acap lebih lamban, namun dipercaya lebih berdampak jangka panjang karena masyarakat dipertimbangkan sebagai subyek penting.

Belasan ribu proyek Pemulihan mustahil ditangani secara sentralistik oleh satu tangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembagian atau pendelegasian kewenangan. Pembangunan berbasis-kawasan (regionalisasi), adalah satu wujudnya.

Ketika rencana-rencana telah disepakati bersama masyarakat, ketika dana-dana mulai mengalir, ketika kapasitas telah bangkit, ketika kontrak-kontrak mulai diteken, dan ketika pengadaan barang/jasa telah marak, Pemulihan segera menjemput momentumnya. Itu dulu. Dan kini, Pemda setempat di Aceh-Nias mulai memetik buah pilihan yang memang sulit itu, dan semakin gencar mengadopsi ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunannya, terutama sektor publik.

Pembangunan berbasis-masyarakat

Disadari, di belahan lain dunia, tantangan CDD sudah sulit. Di Pemulihan Aceh-Nias, lebih sulit lagi. Pada kondisi normal, pelaksanaan CDD memang masuk akal, karena setidaknya bisa meminimalisasi (potensi) konflik yang timbul, misalnya ketika beberapa warga memperoleh keuntungan dari proyek, sementara yang lainnya tidak.

Dalam kondisi abnormal pascabencana, masyarakat tengah bersibuk untuk mengupayakan kembali aset pribadi--rumah, tanah, perahu, kedai, tambak—yang raib. Dalam kondisi tersebut, masyarakat amat berharap sentuhan program-program berdampak cepat. Namun harus diakui, keberharapan itu

Dikemudikan masyarakat. "Pembangunan yang dikemudikan masyarakat", terutama pada fase-fase awal Pemulihan, adalah salah satu strategi yang dijalankan BRR beserta Mitra. Duek pakat (musyawarah) warga Desa Genting Timu, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan pihak Kantor Perwakilan BRR setempat pada 28 September 2006 ini, adalah salah satu contohnya. Foto: BRR/Arif Ariadi.

Kotak 16:

Kiprah Fasilitator di Nias

Nias, tak asing lagi bagi Irwan. Maklum, ibu dari keempat anaknya adalah *ono Niha* (orang Nias). Sudah sejak kecil, Irwan TP. Simanjuntak, begitu nama lengkapnya, mengikuti orang tuanya yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Gunungsitoli. Direkrut sejak September 2005, menjadikan Irwan termasuk fasilitator terlama di Kantor BRR Perwakilan Nias.

Pada awal-awal BRR bekerja, kepercayaan masyarakat belum sebagus sekarang. Banyak penyintas sinis mendengar kata "bantuan". Jika disinggung-singgung soal itu, jawabannya hampir seragam, "Bantuan hanya singgah bagi mereka yang pintar melobi atau dekat dengan pejabat saja." Bahkan di desa-desa Nias Selatan, sebagian warga terlanjur antipati jika bertemu orang luar karena sudah kenyang dibuai janji-janji kosong. Di situlah peran fasilitator sebagai ujung tombak program semakin diuji.

Tentang apa saja pengalaman Irwan selama bergulat dengan pengungsi, jangan ditanya lagi. Terutama ketika pendataan dan verifikasi pengungsi, ancaman, makian, protes, sudah menjadi santapan rutin. Hanya lantaran ingin memiliki rumah bantuan dan makanan, tak sedikit dari mereka yang memaksa-maksakan kehendak

agar namanya didaftar sebagai pengungsi. "Jadi, ketimbang suka, lebih banyak dukanya lah, Pak!" ungkap Irwan terkekeh.

Isu bahwa ada oknum fasilitator yang melakukan pungutan liar (pungli), juga mewarnai. Terhadap praktik ini, Kantor BRR Perwakilan Nias mengambil tindakan tegas, dengan langsung memecat oknum tersebut. Tindakan itu diambil untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa tidak ada kutipan apapun terkait bantuan dari BRR. Upaya tersebut akhirnya mendongkrak tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

Ketika program Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT) direalisasikan pada penghujung 2007, Irwan didapuk sebagai fasilitatornya. Melalui program tersebut, disalurkan hibah pembelian lahan kepada para pengungsi yang tidak memiliki lahan. Selain itu, masih terkait BSBT, lelaki kelahiran Siborong-borong, 18 Maret 1957, ini juga memfasilitasi pengembangan huntara menjadi rumah permanen. Tak tanggung-tanggung, 226 KK, semuanya ia yang tangani.

Selang beberapa pekan, tepatnya pada Januari 2008, program pembangunan perumahan telah menanti. Jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung Medan ini ditugasi untuk memfasilitasi pembangunan rumah melalui skema bantuan langsung masyarakat (BLM) di empat desa Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Keempat desa itu adalah Fodo, Lolomboli, Luahalaraga, dan Faekhu.

Di samping perumahan, ada juga sejumlah fasilitator yang diperbantukan ke sektor lain. Yang menarik adalah peran mereka dalam pembangunan jembatan. Di beberapa desa di Kepulauan Nias—boleh jadi ini kali pertama di Indonesia—pembangunan jembatan ditempuh melalui pendekatan CDD. Terutama berkat dukungan fasilitator, kegiatan yang selama ini dianggap sebagai jenis konstruksi padat modal dan keahlian, ternyata dapat pula dilaksanakan oleh penduduk yang rata-rata kurang berpendidikan atau pengalaman.

Di kalangan rekan maupun masyarakat dampingan, sosok Irwan dikenal ulet dan berdedikasi tinggi. Lalu, apakah modal utama Irwan? "Komunikasi saja, belum cukup. Seorang fasilitator yang baik, dituntut konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan," tandas Irwan.

Kendala dan tantangan, tentu saja ada. Masyarakat, banyak pula yang nakal. Sekalipun pada akhirnya tumbuh kesadaran bahwa tindakan tersebut kurang terpuji, tak pelak, Irwan kerap pening dibuatnya. Yang paling sering ia jumpai adalah manipulasi data. Modusnya antara lain, rumah yang tidak rusak dimasukkan ke dalam daftar.

"Terlepas dari itu semua, saya bahagia menyaksikan kondisi sekarang. Betapa tidak, dari hari ke hari, masyarakat, terutama dampingan saya, sudah banyak yang berubah. Lebih baik. Anda mungkin tidak merasakan, tapi saya bisa," ujar Irwan bangga. Masyarakat, tambahnya, kini semakin cakap mengelola dirinya karena para fasilitator sepertinya sudah menanamkan agar apapun masalahnya, harus bisa dituntaskan sendiri. Sehingga ke depan, yakin Irwan, karena masyarakat sudah terlanjur tahu tentang seluk-beluknya, jangan harap kontraktor atau siapa pun main tipu-tipu.

Saat ditanya bagaimana *survive*-nya kelak setelah BRR bubar, dengan mantap ia menjawab, "Berbekal pengalaman jatuh-bangun sebagai fasilitator, saya akan tekuni itu bidang konsultan pengembangan masyarakat."

menyurut drastis manakala mereka dihadapkan pada program-program berprespektif CDD. Jadi di Aceh-Nias, implementasi CDD menjadi sekian kali lipat tantangannya.

Kendati demikian, beberapa capaian dan hikmah-ajar telah banyak yang dipetik. Salah satunya adalah, betapa peran fasilitator seyogianya lebih dipertimbangkan dalam pengimplementasian program. Di Nias, misalnya, kini terdapat puluhan fasilitator. Dedikasi mereka telah menjadi inspirasi secara luas dan menjadi satu sumber yang bagus bagi kajian lebih mendalam tentang praktik CDD di kawasan pascabencana. Lebih jauh mengenai pelaksanaan CDD, akan dikupas lebih banyak pada Laporan Tahunan 2008 mendatang.

Pembangunan Berbasis-Wilayah

Pada dasarnya, fungsi penting BRR sebagai institusi Pemulihan, tak lain adalah untuk membantu dalam menggerakkan kembali roda kemampuan elemen lokal, terkhusus Pemda, agar setidaknya berfungsi seperti sediakala. Namun untuk mendekatkan BRR kepadanya, dibutuhkan mekanisme yang sesuai agar kemauan-baik dan kerelaan berbagi peran dapat terkelola secara memadai. Dalam konteks itulah desentralisasi menawarkan ruang solutifnya. Momentum reformasi sosial-politik yang berlangsung cepat, telah menyodori Indonesia suatu haluan "baru" berupa kebijakan desentralisasi.

> "Desentralisasi pada dasarnya bukan barang baru di Indonesia. Ayunan pendulum antara sentralisasi dan desentralisasi pemerintahan, serta ketegangan dalam pembagian wewenang Pusat-Daerah untuk mencari keseimbangan di negeri ini, telah lama terjadi. Pemerintah Pusat kerap ragu dalam memberikan Daerah suatu status otonom untuk memegang cukup kekuasaan. Provinsi, terkhusus gubernur, selalu lebih diposisikan sebagai wakil kekuasaan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dirunut ke belakang dari perubahan dasar hukum untuk pemerintahan daerah. Produk kolonial Desentralisatie Wet 1903 digantikan oleh UU Nomor 1/1945 yang sesungguhnya tidak jauh berbeda sifat dekonsentrasinya. UU Nomor 22/1948, dan penggantinya UU Nomor 1/1957, didominasi oleh sifat desentralisasi. Sejalan peralihan dalam Demokrasi Terpimpin, Perpres Nomor 6/1959 mengayunkannya kembali ke kutub dekonsentrasi. UU Nomor 18/1965 lebih condong pada desentralisasi, tetapi lalu digantikan oleh UU Nomor 5/1974 yang kembali bersifat dekonsentrasi. Era reformasi ditandai oleh keluarnya UU Nomor 22/1999 yang pekat desentralisasinya."

Secara politis, dalam Sidang Tahunan (ST) Agustus 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor IV/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (otda), telah ditekankan akan pentingnya desentralisasi. MPR menegaskan, desentralisasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan merata, serta ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah.

> "Era otda di Indonesia sebetulnya telah dicanangkan beberapa bulan sebelum ST MPR 2000, yakni ketika pemerintahan Presiden Habibie mengesahkan UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 23/1999. Sama halnya dengan provinsi lain, saat itu, Aceh juga baru mulai menata-tata kemampuannya dalam mengelola urusan daerahnya sendiri. Tuntutan lama Aceh dipenuhi Pemerintah Pusat pada 4 Oktober 1999 melalui UU Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh."

Ditambah dengan pertimbangan geografis Aceh-Nias yang luas, terpencar-pencar, variatif, serta masing-masing wilayah berlainan potensi dan karakteristiknya, desentralisasi semakin menawarkan pilihan yang tepat dan aktual. Pertimbangan itu cukup strategis terutama terkait kebutuhan akan komitmen yang tinggi dan upaya berjangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pada 5 Mei 2006, di CFAN kedua, BRR bergerak cepat dalam menerjemahkan pendekatan berbasis-wilayah itu dengan membuka lima distrik sebagai uji coba. Oleh sebab Kantor Pusat BRR kian terbebani

Papan transparansi. Papan keterangan proyek yang dipancangkan di setiap lokasi terkait, merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas BRR kepada masyarakat. Salah satunya, seperti yang terdapat di proyek pembangunan Bandara Cut Nyak Dhien, Kabupaten Nagan Raya, ini, 7 Maret 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

dengan melimpahnya tugas dan kewenangan, maka pengelolaan berbasis-wilayah kian dianggap penting karena dapat mendorong tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja. Dengan demikian, elemen setempat tentu akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam proses kepemerintahan. Secara bertahap, akhirnya Kantor Pusat BRR di Banda Aceh tak lagi memegang kendali program, melainkan, sesuai prinsip desentralisasi, *membagikan* kewenangannya ke masing-masing kantor perwakilan.

Pendelegasian tersebut penting untuk memperpendek mata-rantai program serta mendulang informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritasi di tingkat lokal. Selain amat membantu dalam memperbaiki mutu layanan yang membuat sektor publik lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakatnya, desentralisasi juga meningkatkan partisipasi masyarakat sejak dari penyusunan hingga pengawasan kebijakan.

Dua tahun sudah Kantor-Kantor Perwakilan BRR bekerja. Wilayahnya menjangkaui kawasan Pantai Barat Aceh (Kantor Perwakilan-I dan Kantor Perwakilan-V), Pantai Timur Aceh (Kantor Perwakilan-II), Kepulauan Nias (Kantor Perwakilan-VI), serta distrik khusus Simeulue. Guna menutup kesenjangan pertumbuhan, di kawasan tak terimbas tsunami, terutama bagian tengah Aceh, dibentuklah Kantor Perwakilan-III.

> “Jumlah daerah di Provinsi Aceh meningkat dari 133 wilayah administratif di akhir 1980-an menjadi 231 pada 2004. Pemekaran ini kurang selaras dengan sebaran penduduk secara geografis. Dampak fenomena tersebut antara lain, melimpahnya kekuatan politik pada daerah-daerah tertentu, terutama di bagian tengah dan selatan Aceh yang dahulunya dikenal sebagai basis kelompok militer dan milisia. Adapun wilayah-wilayah di pesisir utara provinsi yang dulunya dikenal sebagai pusat kekuatan konservatif Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjadi terpinggirkan. Perlu diketahui, alokasi bantuan teknis dan dana bagi penyintas tsunami maupun konflik ditentukan sesuai jumlah wilayah administratif.”

Kotak 17:

Kilas-balik Regionalisasi BRR

Kebijakan desentralisasi semula lahir dari pengalaman pembentukan Kantor BRR Perwakilan Nias. Perbedaan pendekatan dalam menjalankan kantor perwakilan di Aceh dan Nias selanjutnya membuat mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemulihan menjadi sedikit berbeda antara kedua wilayah itu.

Ide regionalisasi diperkenalkan perdana oleh BRR pada CFAN-II, 5 Mei 2006, dengan memilih lima distrik sebagai ujicoba. Selanjutnya, pada 4 Juli 2006, enam kantor perwakilan BRR diluncurkan berdasarkan Peraturan Kabapel Nomor 22/PER/BP-BRR/VII/2006. Tata-organisasi kantor perwakilan diatur melalui Peraturan Kabapel Nomor 24/PER/BP-BRR/VII/2006 (20 Juli 2006).

Formasi kantor perwakilan BRR telah mengalami tiga kali perubahan sejak itu; masing-masing berdasarkan Peraturan Kabapel Nomor 26/PER/BP-BRR/VII/2006 (24 Juli 2006), Peraturan Kabapel Nomor 34/PER/BP-BRR/VIII/2007 (6 Agustus 2007), dan Peraturan Kabapel Nomor 40/PER/BP-BRR/XI/2007 (24 September 2007). Setelah mengalami pasang-surut yang dinamis, saat ini telah ada lima kantor perwakilan BRR.

Setiap kantor mencakup beberapa distrik (kabupaten/kota). Berarti, keseluruh 23 kabupaten/kota se-Aceh dan 2 kabupaten se-Kepulauan Nias termasuk di dalamnya. Seiring dengan era otda, di Aceh dan Nias, dalam beberapa tahun terakhir marak terjadi pemekaran

Seiring dengan berakhirnya masa-tugas BRR, muncul tuntutan untuk lebih meningkatkan mutu kinerja masing-masing regional. Kedeputian Bidang Operasi BRR menangkap momentum tersebut dengan mengoptimalkan fungsi Pengendalian Pembangunan-nya.

Di Pengendalian Pembangunan, detail-detail implementasi kegiatan dipantau, dievaluasi, dan kemudian diintegrasikan secara komprehensif. Hasilnya disiarkan langsung melalui sarana pandang-dengar (layar televisi) intern, katalog, serta publikasi cepat lainnya. Mutakhiran data yang ditampilkan bukan lagi per semester atau per bulan, melainkan per jam, bahkan per menit. *(baca kotak: "Pengendali Proyek").*

Selain pembangunan ranah fisik, banyak pula yang tergarap secara simultan dalam konteks regionalisasi. Terkait Pemda, paling tidak ada dua ranah penting, yakni politik dan administrasi. Dalam ranah politik, masyarakat kian mempertimbangkan posisi Pemda sebagai wahana pendidikan yang memadai, dan secara agregat, itu akan berkontribusi dalam mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Adapun dalam ranah administratif, Pemda semakin terposisikan sebagai unit pemerintah di tingkat lokal penyedia layanan publik yang efektif dan efisien.

Pemerkuatan peran Pemda melalui forum Sekber BRR-Pemda serta perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) ke dalam Satker wilayah/sektoral, telah menyumbang kontribusi yang bermakna bagi proses Pemulihan.

Pada sisi lain, sejalan dengan kenaikan jumlah PNS, belanja pegawai—gaji, tunjangan, pembayaran tambahan—turut meningkatkan pengeluaran rutin Daerah. Proporsi belanja untuk pegawai

Kotak 18:

Pemekaran di Aceh Sewindu Terakhir

Maraknya tren pemekaran Daerah Tingkat (Dati)-II di seluruh provinsi di Indonesia merambahi pula Provinsi Aceh. Berikut perkembangannya selama sewindu terakhir.

- Pada 2000, Aceh memiliki 13 Dati-II, mencakup 11 kabupaten dan 2 kotamadya. Kabupaten termaksud terdiri dari Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jeumpa, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue. Adapun kotamadyanya adalah Banda Aceh dan Sabang.
- Pada 2001, terbentuk dua kota administratif (kotatif), yakni Lhokseumawe (dari Aceh Utara, berdasarkan UU Nomor 2/2001) dan Langsa (dari Aceh Timur, berdasarkan UU Nomor 3/2001).
- Pada 2002, berdasarkan UU Nomor 4/2002, terbentuk lima kabupaten. Masing-masing, Aceh Barat Daya (dari Aceh Selatan), Aceh Jaya dan Nagan Raya (dari Aceh Barat), Gayo Lues (dari Aceh Tenggara), dan Aceh Tamiang (dari Aceh Timur).
- Pada 2003, terbentuk satu kabupaten, yakni Bener Meriah (dari Aceh Tengah) berdasarkan UU Nomor 41/2003.
- Pada 2004 tidak terjadi pemekaran hingga 2006.
- Pada 2007, jumlah kabupaten dan kotamadyanya masing-masing bertambah satu—bertahan hingga paruh-pertama 2008. Kedua Dati-II baru itu adalah Kabupaten Pidie Jaya (dari Pidie, berdasarkan UU Nomor 7/2007) dan Kotamadya Subulussalam (dari Aceh Singkil, berdasarkan UU Nomor 8/2007).

Mengingat selama semester-I 2008 tak terjadi pemekaran, Provinsi Aceh kini memiliki 23 Dati-II (18 kabupaten, 3 kotamadya, 2 kotatif) yang membawahi 266 kecamatan dan 6.261 gampong/kelurahan. Jika ditabelkan, perkembangan pemekarannya selama kurun 2000-07—sepanjang 2004-06 tidak terjadi pemekaran—adalah sebagai berikut:

Tahun	Daerah Tingkat-II			Jumlah
	Kabupaten	Kota		
		Kotamadya	Kota Admistratif	
2000	11	2	0	13
2001	11	2	2	15
2002	16	2	2	20
2003	17	2	2	21
2007	18	3	2	23

terhadap total pengeluaran rutin melonjak. Meski bagaimanapun, fenomena tersebut telah dipahami sebagai semacam "harga yang harus dibayar" demi menyiapkan fondasi yang kokoh. Olehnya, BRR, bersama Mitra Pemulihan, telah semakin diyakinkan, bahwa melibatkan Pemda Aceh-Nias, itu sama artinya dengan menyemai jaminan bahwa Pemulihan akan senantiasa berjalan di atas relnya yang kokoh secara berkesinambungan.

Pembangunan Tersinambungkan

Bencana memang telah memorakporandakan modal fisik dan menghilangkan banyak modal nonfisik Aceh-Nias. Tapi bencana juga lah yang memicu tumbuhnya kumpulan modal dan akumulasi SDM di Aceh, berikut kemampuan atau kecakapannya yang beragam.

Fenomena alam telah mengubah secara radikal berbagai segi wilayah dan kehidupan di Aceh-Nias.

Tsunami telah memungkinkan dihentikannya pertikaian puluhan tahun di Aceh dan memanggil pulang warganya dari pengungsian di berbagai belahan daerah atau dunia. Gempa telah membuat Nias dilirik kembali eksistensi dan pembangunannya.

Ratusan ribu yang meninggal dan hilang, termasuk tokoh-tokoh masyarakat pegawai pemerintah, atau tenaga pengajar, telah dan tengah tergantikan. Akibat hilangnya sekian tenaga pengajar dan PNS, misalnya, kini telah tersedia banyak beasiswa ke dalam maupun luar negeri bagi para pengganti mereka. Konon, sejumlah pemberi beasiswa malah dibelit kesulitan memperoleh kandidat penerima beasiswa asal Aceh-Nias. Sementara yang sudah menerima beasiswa, hampir semuanya telah dan tengah menjalaninya.

Segera setelah modal fisik pascabencana merosot, subsititusi lewat investasi modal SDM berlangsung. Momentum itu telah menyediakan kesempatan untuk memperbaharui kumpulan modal dan

Kotak 19:

Pemekaran di Nias

Dampak desentralisasi yang tampak jelas di Kepulauan Nias adalah bertambahnya jumlah wilayah administratif tingkat kabupaten dan kecamatan. Hal tersebut karena dasar hukum desentralisasi, yakni UU Nomor 22/1999 (tentang Pemda) dan UU Nomor 25/1999 (tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), memang membuka celah untuk itu.

Pada kurun 1999-2003, di Kabupaten Nias telah terbentuk lima kecamatan baru yang kemudian mencakup seluruh kepulauan. Selanjutnya pada 2003, Kabupaten Nias "dibelah" dua menjadi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Padahal pembentukan lima kecamatan baru di Kabupaten Nias, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Nomor 136/1180/K/2004, saja masih belum juga ditunaikan. Dan kini, di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nisel, telah terdapat masing-masing 8 dan 32 kecamatan

Mencuat wacana untuk "membelah" lagi Kabupaten Nias menjadi 3 Dati-II baru, yakni 2 kabupaten (Nias Utara dan Nias Barat) dan 1 kota (Gunungsitoli) yang kemudian meletupkan polemik hangat. Salah satu yang dipolemikkan adalah, kendati letak geografis dan karakteristik daerah tertentu acap menjadi motivasi pemekaran, namun implikasinya masih menuai keprihatinan yang serius. Lebih-lebih seiring munculnya kesadaran pada diri masyarakat, motivasi tren semacam ini seyogianya lebih disandarkan pada upaya memperbaiki fungsi layanan umum pemerintah—yang berdampak panjang—ketimbang kepentingan elit-elit setempat—yang bersifat sesaat.

Kotak 20:

Pengendali Proyek

Jika bertandang ke Kantor Pusat BRR, jangan heran bila di beberapa ruangan, anda akan menyaksikan tayangan televisi layar lebar. Informasi aneka tabel yang secara komunikatif memuat progres kegiatan proyek BRR, ditampilkan di sana. Baik kemajuan realisasi fisik maupun keuangan dari 12 unit indikator wilayah dan sektor, ditayangkan secara *realtime*. Angka-angkanya berubah terus setiap waktu seiring dengan kemajuan proyek. Jadi, dari media pandang-dengar itu saja, pemirsa dapat memantau seluruh kemajuan, kekurangan, kecepatan, maupun keterlambatan proyek Pemulihan di Aceh-Nias.

Layanan informasi multimedia itu merupakan salah satu produk dari Wakil Kedeputian Bidang Operasi Bidang Pengendalian Pembangunan. Sudah ada sejak 2006, sejak terbitnya Peraturan Kabapel BRR Nomor 17/PER/BP-BRR/VI/2008 (tentang SOTK Bapel BRR), 23 Juni 2008, unit kerja itu telah dirombak menjadi tiga unit yakni, Pusat Pengendalian dan Pelaksanaan Proyek Sektoral (P4S), Pusat Pengendalian Program dan Proyek Wilayah (P4W), serta PPMK dan Layanan Pengadaan.

Di dalam mandatnya, Pengendalian Pembangunan mengemban empat tugas utama. *Pertama,* mengendalikan secara internal perihal koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan proyek. *Kedua,* melaksanakan koordinasi terhadap direktur, kepala pusat, dan kepala kantor perwakilan. *Ketiga*, melaksanakan kelayakan program. *Keempat,* memastikan ketepatan dan kesesuaian prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku selain juga membantu tugas-tugas lain dari Deputi Bidang Operasi. Dengan sedikit merendah, menurut sang nahkoda, Taqwallah, unitnya bukanlah eksekutor percepatan program dan proyek, tetapi hanya menyampaikan fakta-fakta lapangan.

Dari balik ruangan kantor yang selalu sibuk bahkan 24 jam ini, berbagai hikmah-ajar pengelolaan proyekpun telah dipetik. Lampu dan sinar layar komputer seperti tidak ada matinya. Oleh performa kinerja semacam itu, bisa dikatakan, pada paruh awal 2008 ini, semua mata di BRR tertuju ke sana.

Bagi Taqwallah, ada dua cara untuk pengendalian, yakni "panggil dan *crosscheck* (cek-silang)". Dengan adanya kendali terlebih dulu, dapat disamakan persepsinya tentang status berbagai proyek. "Dalam setiap rapat pimpinan (rapim), kita bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mesti pegang kartu truf, agar bukan hanya mereka yang melapor. Problem bukan lagi mereka yang melemparkan, melainkan kita. Bukankah isu persoalannya sudah ada di genggaman?" tegas Taqwallah yang kini menjadi ujung tombak setiap rapim digelar.

Terdapat empat kunci keberhasilan dalam pengelolaan proyek. *Pertama*, harus ada kesamaan persepsi tentang proyek di semua level, sejak dari kepala program, kepala kantor perwakilan, direktur, hingga Tim Satker dan Tim Wilayah/Distrik. *Kedua,* kepatuhan terhadap format kendali dan pantau mutlak dibutuhkan.

Ketiga, Tim Pengendali mesti memiliki jaringan komunikasi yang luas agar dapat memantau status revisi dan dicairkannya anggaran, serta akses kepada SDM/Biro Hukum agar mengetahui mutasi Satker. Pemantauan "gerak-gerik" paket juga dilakukan melalui kepala program, kepala Satker, dan staf di Wilayah.

Keempat, pangkalan-data harus proaktif, bisa bicara. Dengan demikian, hanya dari buku katalog, format kendali dan pantau, ataupun tayangan multimedia saja, dapat terbaca mana paket program yang aman melewati limit lelang, yang telat, atau yang mustahil terselesaikan. Sumber data kurang penting datang dari mana. Yang penting, dipunyai atau tidak, dan apakah sudah tercek-silang atau belum.

Sebenarnya sejak mula, data mata anggaran dan program sudah diikat melalui dokumen-dokumen anggaran. Ibaratnya, sejak program disusun sudah dipantau gerak-gerik paket proyeknya. Pangkalan data yang akurat juga hanya bisa didapatkan dari hasil cek-silang Tim Lapangan. Evaluasinya dilakukan bukan dalam hitungan bulan ataupun minggu, melainkan 1x24 jam. Hanya dengan strategi dan kerja keras seperti itu, tampaknya proyek Pemulihan Aceh-Nias dapat dijalankan semakin amanah.

memungkinkan pengadopsian teknologi baru. Pada gilirannya, kesempatan itu dapat memacu produktivitas.

BRR pada dasarnya merupakan sebuah lembaga *ad hoc* Pemerintah Pusat yang bersifat kuasi-otonom. Ia dimandati presiden memulihkan daerah-daerah otonom yang berbeda jenjang pemerintahannya. Kehadirannya sebatas mengisi kesenjangan otoritas sejauh sampai Pemda dan masyarakatnya telah mampu mengambil-alih kembali tata-kelola kepemerintahannya. Dengan demikian, durasi masa tugasnya sudah, dan harus, terlimitasi. Titik limit resmi BRR, 16 April 2009.

Proses Pemulihan yang berlangsung telah menarik Pemda di Aceh-Nias untuk bertransformasi dalam menggerakkan kembali pembangunan setempat. Per Juni 2008, terbangun sudah 112.346 unit rumah baru, 787 unit sarana kesehatan, 1.045 unit bangunan sekolah termasuk pelatihan bagi 26.538 guru, 2.542 kilometer jalan, 11 bandara dan landasan-pacu *(airstrip),* serta 16 pelabuhan laut. Semua itu tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kontribusi seluruh aktor Pemulihan dan masyarakat. Itu semua juga harus dipersiapkan perawatannya agar azas kemanfaatannya berkesinambungan.

Pemampuan Kapasitas

Seiring pulihnya aspek wilayah dan kehidupan, Pemda Aceh-Nias sudah mencoba beberapa upaya untuk mempersiapkan dirinya dalam rangka mengambil-alih langkah-langkah transisional. Pada Pemda Aceh, misalnya, sejumlah terobosan untuk itu telah ditempuh. Reorganisasi besar-besaran struktur dinas tingkat provinsi, oleh banyak pihak dinilai sebagai langkah nyata Pemda Aceh untuk membenahi diri dari dalam. BRR sendiri gencar menyelesaikan alih aset hasil Pemulihan demi mendukung kesiapan Pemda.

April 2007, dalam MTR, BRR telah menegaskan tiga strategi PMT. Ketiganya meliputi proses transisi, penyiapan kelembagaan, dan pemampuan kapasitas

Menunggu dibangun. Terutama karena kendala geografis, sarana-prasarana masyarakat di Nias, belum semuanya terbangun. Warga Kepulauan Hinako, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias, misalnya, masih harus menggunakan perahu penyeberangan dari pelabuhan lama yang rusak oleh tsunami Desember 2004. Gambar diambil pada 12 November 2007. Foto: Bodi CH

Pemda dengan bekerja sama secara erat dengannya dan juga K/L terkait. Proses transisi yang dimaksud, bukan hanya mencakup pengalihan aset/sistem, dokumen, pendanaan, proyek, namun juga SDM.

Di lingkup internal BRR sendiri, sudah dilakukan upaya-upaya dukungan strategis dalam rangka mengembangkan dan memperkokoh kapasitas SDM-nya. Salah satunya berupa "Program Purnabakti BRR". Program yang menuai antusiasme positif tersebut kini tengah berlangsung.

Adapun pemampuan kapasitas Pemda, antara lain diupayakan dengan melakukan pengintensifan Sekber, pembangunan kapasitas perencanaan dan keuangan, pengelolaan prasarana (operasi dan perawatan), penataan ruang dan pengembangan kawasan, serta pengelolaan lingkungan, termasuk DRR. Stretegi ini telah mulai direalisasikan sejak 2007.

Di pihak lain, kendati tidak seluruhnya berjalan sesuai yang diharapkan, tapi tampak bahwa Pemda juga telah mencoba inisiatif mengambil langkah-langkah penyiapan proses pengalihan. Pada CFAN ketiga, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh menyatakan bahwa Pemda sudah dalam kondisi siap mengambil-alih tugas Pemulihan melalui pengintegrasian ke dalam pembangunan-kembali daerah. Caranya, dengan membentuk sebuah komite yang melibatkan Pemda, BRR, dan Donor, dalam rangka menangani proses transisi.

Pada Mei 2008, muncul usulan pembentukan Badan Koordinasi Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BKKRR). Selang sebulan kemudian, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menghadap Wapres. Gubernur menyatakan keinginannya agar dapat mengambil-alih mandat BRR melalui badan baru di bawah kendali Pemerintah Aceh dengan tetap memiliki dewan pengarah. Gagasan ini memang sejalan dengan pola pimpinan daerah dalam membentuk beragam badan *ad hoc*. Perbedaannya adalah, apabila badan-badan *ad hoc* sebelumnya

Kurangi ketergantungan. Pelatihan komposisasi jerami bagi warga Desa Lambeugak, Kabupaten Aceh Besar, diselenggarakan ADB melalui program ETESP-Agriculture, 14 Oktober 2008. Kegiatan ini dimaksudkan untuk semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang terbukti tidak ramah-lingkungan. Foto: ADB/Dewi Wahyuni.

disebutkan bersifat *advisory,* BKKRR lebih sebagai Bapel. Inilah yang barangkali akhirnya membuat usulan tersebut urung ditindaklanjuti lebih jauh.

Keinginan untuk membentuk badan khusus semacam tampaknya tidak terjadi di Nias. Mengingat, Pemda Nias merupakan bagian dari kesatuan sistem Provinsi Sumatera Utara. Keinginan tersebut dikalahkan oleh keinginan Pemda Nias agar lebih diperhatikan ketimbang sebelum-sebelumnya. Salah satunya adalah dengan menegaskan pembagian kewenangan antara K/L, Pemprov, dan Pemkab. Membentuk "Desk Nias", juga merupakan usulan agar koordinasi antartingkat pemerintahan tetap memperhatikan kebutuhan daerah.

Wakil Bupati Nias pada 2007 diberitakan agak mengkhawatirkan kemampuan SDM Pemdanya untuk mengambil-alih sisa pekerjaan Pemulihan. Namun tak seberapa lama kemudian kekhawatiran tersebut berganti dengan ekspresi kepercayaan diri. Dalam perencanaan, pengendalian, dan monev seatap Pemda-BRR, Pemda Nias juga telah menggalang kerjasama dengan Kantor BRR Perwakilan Nias dan UNORC untuk melaksanakan Forum Pemulihan Kecamatan (Kecamatan Recovery Forum, KRF). Forum ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan konsep yang tepat atas rencana keberlanjutan kegiatan pemulihan daerah pascaberakhirnya BRR.

Pada 2008, BRR telah dan tengah mengakhiri proyeknya, mempersiapkan pelimpahan Dekonsentrasi dan penyerahan Tugas Pembantuan, serta memulai pengalihan dokumen. Muara semua ini adalah untuk memuluskan pengalihan tugas ke Pemda dan K/L pada 2009. Secara khusus telah juga dipastikan sedini mungkin bahwa transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan normal melibatkan Pemda. Pelibatan itu mencakup tahap perencanaan, evaluasi, hingga pengalihan kegiatan.

Kotak 21:

Program Purnabakti BRR

Dengan terbitnya Peraturan Kabapel BRR Nomor 51/PER/BP-BRR/XII/2007 tentang Program Purnabakti bagi Pegawai BRR, status program yang pada November 2007 masih rencana atau baru berupa draf itu, per 7 Desember 2007, resmi sudah.

Berdasarkan kebutuhan dasar organisasi serta proses PMT, BRR melakukan transisi ke Pemda pada 2008. Selain itu, BRR juga telah mempersiapkan dukungan yang bersifat strategis pada pegawainya dalam mengembangkan kapasitas, menuju kemandirian individu atau kelompok. Ketika masa tugas BRR berakhir, pegawai yang memiliki keterampilan khusus diharapkan dapat terus berkiprah. Itulah yang hendak dicapai oleh Program Purnabakti BRR. Secara tak langsung, hal ini gayut dengan semangat menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat Aceh-Nias secara umum.

Untuk kesiapan program yang dijadwalkan berlangsung sepanjang April-Desember 2008 itu, Tim Purnabakti BRR telah menyebarkan formulir karir ke seluruh pegawai di lingkup Bapel BRR. Formulir ini pada dasarnya berupa usulan. Dengan demikian, faktor kelayakannya dapat senantiasa ditinjau-ulang agar lebih tepat sasaran. Awal April 2008, pegawai yang telah mengembalikan formulir ke SDM BRR diserahi lembar komitmen guna memastikan keikutsertaannya.

Dalam program ini, pegawai dapat memilih salah satu dari tiga subprogram yang ditawarkan. Ketiganya adaah Dukungan Beasiswa Pendidikan Lanjut *(Eligible Scholarship),* Kewirausahaan *(Entrepreneurship),* serta Pelatihan Penunjang Bakat (Kemampuan Teknis dan Kemampuan Manajerial).

Tim Purnabakti-SDM menggalang kerjasama dengan sejumlah balai pelatihan (lokal/nasional) terkait dengan ketiga subbprogram tersebut. Terbetik satu berita, Singapore International Foundation dan Lee Kwan Yu University telah menyalakan lampu hijau untuk berpartisipasi, dengan memberikan kursus Bahasa Inggris cuma-cuma untuk tingkat menengah dan lanjut. Kabar gembira lainnya, bagi para pegawai BRR yang belum menamatkan pendidikan SMU atau yang sederajat, Tim Purnabakti-BRR menyelenggarakan program peningkatan ijazah.

Seiring dengan niat baik itu, seperti sudah menjadi adat, muncul pula anggapan miring bahwa program ini justru akan menurunkan kinerja pegawai BRR. Yudi Purnomo, salah seorang anggota Tim Purnabakti-SDM, menjelaskan bahwa anggapan itu sah-sah saja. Namun yang perlu diingat, tepisnya, program ini adalah satu mata rantai dari strategi manajemen PMT BRR yang menekankan pada dampak jangka panjang.

"Jangan terpaku pada hari ini, tapi coba bayangkan karir seperti apakah yang anda impi-impikan 5-10 tahun mendatang. Dengan ikut program ini, berarti investasi yang tepat untuk membekali diri, agar selain lebih siap, juga lebih yakin untuk *survive,"* ungkap Yudi.

Ditambahkan, sifat program ini sama sekali tidak mengikat. Oleh karenanya, siapapun deputi—apalagi direktur—tiada berhak melarang stafnya untuk memilih program yang diingini. Para deputi atau direktur itu, lanjut Yudi, sekadar mengetahui atau paling banter, mengarahkan. Tak lebih dari itu.

(Diubahsesuaikan dari Direktorat Komunikasi BRR. "Yang Mutakhir dari Program Purnabakti" dalam *Buletin Beranda Edisi 6. Banda Aceh: Maret 2008, hlm. 3)*

Program Purnabakti. Salah satu upaya BRR dalam mendorong mutu SDM-nya, adalah dengan menyelenggarakan "Program Purnabakti", seperti yang ditampilkan di foto ini, 18 April 2008. Di dalamnya, setiap pegawai BRR dapat memilih salah satu dari tiga subprogram yang ditawarkan, yakni Dukungan Beasiswa Pendidikan Lanjut, Kewirausahaan, atau Pelatihan Penunjang Bakat. Foto: BRR/Oni Imelva

BRR terus berupaya untuk memastikan bahwa Pemda dan para pemangku kepentingan terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun selama Pemulihan. Penguatan kapasitas Pemda diprioritaskan pada bidang perencanaan keuangan, manajemen prasarana, penataan ruang dan manajemen lingkungan. Caranya adalah dengan melakukan pelatihan, magang kerja, maupun alih pengetahuan dari BRR kepada Pemda *(baca subbab "Alih Pengetahuan")*.

Secara simultan, berbagai lembaga donor juga telah menjalankan program penguatan kelembagaan daerah. Berikut beberapa contoh kegiatan bersangkutan, baik oleh BRR maupun mitra Pemulihan, yang masih berlangsung pada semester-I 2008.

Tak dapat dimungkiri, banyak sudah perkembangan yang menunjukkan indikasi bahwa Pemda semakin menguat setelah dukungan fasilitasi diberikan. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 1.000 kantor telah direhabilitasi dan direkonstruksi, termasuk kantor-kantor desa dan kecamatan, kantor pengadilan, serta bangunan administratif pokok.

Program rekrutmen pegawai pun telah dilaksanakan. Pada penghujung 2007, Gubernur Aceh melangsungkan perekrutan sejumlah pejabat secara terbuka, dan bahkan tak menutup kandidat dari luar provinsi. Langkah ini bukan yang pertama, mengingat walikota Banda Aceh dulu pernah melakukan. Seiring waktu, lebih dari 20.000 PNS telah dilatih. Tindak-lanjut dari pelatihan tersebut, petunjuk operasional dan prosedur telah disiapkan serta didistribusikan ke berbagai lembaga administratif/departemen tempat mereka bekerja.

Tabel 1:
Program penguatan kelembagaan daerah

No Referensi	Nama	*on-/off-budget*	Pelaksana/Pendonor	Periode	Wilayah
ECON 395 GI	Integrated Soil and Crop Management	*off*	ACIAR/ Pemerintah Australia	09/01/2007 -30/11/2009	Aceh
ECON 147 Bilat	AIPRD Aceh Rehabilitation Program	*off*	AIPRD/ AIPRD	01/07/2006 -01/07/2008	Aceh
ECON 399 IN	UNDP Waste Management Livelihoods	*off*	Austcare/ Austcare	14/05/2007 – 14/04/2008	Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simeulue, Banda Aceh, Nias, Nias Selatan
ECON 280 IN	Poverty Alleviation InSED Pro (Integrated Sustainable Economic Development Project in Nias)	*off*	Bappedalda/ pendonor masih akan ditentukan	01/09/2007 – 31/08/2009	Nias, Nias Selatan
ECON 424 GI	Nias Islands Integrated Economic and Human Development Project	*off*	BRR/ MDF	01/01/2008 – 01/01/2011	Nias
ECON 129 UN	Rehabilitation of Livelihoods in the Fisheries Sector Affected by Tsunami and Earthquake in Indonesia	*off*	FAO/ Pemerintah Jerman	01/01/2006 – 30/11/2008	Aceh, Nias
ECON 443 UN	Fish Marketing Information for NAD Province (GCP/ INC/078/SPA)	*off*	FAO/ Pemerintah Syanyol	01/01/2008 – 31/12/2008	Aceh Barat, Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe
SOC 223 UN	Strengthening Women's Legal Rights in Aceh	*off*	UNIFEM/ CIDA	02/04/2007 – 02/03/2009	Aceh
INFRA 521 Bilat	AIPRD Housing Assistance Program (HAP)	*off*	AIPRD/ AIPRD	01/10/2006 – 01/03/2008	Aceh
INFRA 54 IN	Integrated Community-Based Risk Reduction Programme (IC BRR) Teunom Aceh Jaya	*off*	PMI/ Palang Merah Denmark	01/04/2005 – 31/12/2009	Aceh Jaya
INFRA 300 GI	Aceh and Nias Sea Defense, Flood Protection, Refuge, and Early-Warning Systems Consultancy	*off*	Dinas Sumber Daya Air/ Pemerintah Belanda	01/03/2006 – 31/03/2009	Aceh, Nias
INFRA 261 UN	Development of SIMC (Spatial Information and Management Center)	*off*	SIM-C/ UNIMS	01/04/2006 – 30/06/2009	Banda Aceh

INFRA 165 UN	Aceh-Nias Settlements Support Programme (ANSSP)	*off*	UN Habitat/ UNDP	01/04/2005 – 30/06/2008	Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Banda Aceh, Nias, Nias Selatan
INFRA 275 GI	Provincial-Level Strategic Infrastructure Planning and Design – IREP II	*on*	BRR/ MDF	03/01/2006 – 28/02/2009	Aceh, Nias
INFRA 276 GI	Nias Roads, Transport, and City Development Planning and Design – IREP II	*on*	BRR/ MDF	17/01/2007 – 17/01/2010	Nias, Nias Selatan
INFRA 471 GI	Kecamatan-Based Rehabilitation and Reconstruction Planning for Nias Project (KRRP)	*on*	BRR/ MDF	01/02/2007 – 30/06/2010	Nias, Nias Selatan
INST 94 IN	TA Facility for Aceh and Nias	*off*	AIPRD/ AIPRD	03/02/2008 – 31/12/2009	Banda Aceh, Nias
INSTI 107 Multi	Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP)	*off*	BRR/ ADB	01/03/2006 – 30/06/2009	Aceh, Nias
INSTI 83 In	Canada/Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP)	*off*	Federation of Canadian Municipalities/ Pemerintah Kanada-CIDA	01/06/2006 – 31/03/2009	Aceh Jaya, Pidie, Banda Aceh
INSTI 114 Bilat	Aceh Local Governance Programme (Algap II)	*off*	GTZ/ ECHO	01/01/2007 – 31/12/2009	Aceh
INSTI 7 Bilat	Capacity Development Support for the Finance Divisions throughout NAD Province GRS II	*off*	Sekretariat Daerah/ Pemerintah Kanada	13/06/2005 – 28/02/2009	Aceh
INSTI 121 UN	AGTP (Aceh Government Transformation Programme) Initiation Plan	*off*	UNDP/ UNDP	01/10/2007 – 10/07/2008	Banda Aceh
INSTI 104 UN	Implementing A Strategic Environmental Framework and Building Local Capacity in Aceh	*off*	UNEP/ DANIDA	01/04/2007 – 30/06/2010	Aceh
SPAT 5 Bilat	Management of Geo-Risks Province NAD—ManGeo NAD	*off*	BGR/ GTZ	03/08/2005 – 30/06/2009	Aceh
SPAT 17 Multi	Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP)	*off*	BRR/ ADB	01/03/2007 – 01/06/2008	Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, Aceh Selatan, Simeulue, Nias

Sumber: RANdatabase-BRR

Satu dari 51. Gedung Pengadilan Negeri Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang diambil gambarnya pada 6 Maret 2008 ini. Gedung tersebut merupakan satu dari seluruh 51 unit yang telah dibangun BRR; kesemuanya selesai sebelum 2007. Foto: BRR/Arif Ariadi

Selain merekrut aparat berdasarkan sistem meritokrasi, Pemerintah Aceh telah pula merampingkan struktur organisasinya. Demi efisiensi kerja Pemda, rancangan qanun (raqan) yang mengatur SOTK dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah, telah ditetapkan tahun lalu. Begitu pula raqan yang mengatur SOTK sekretariat daerah (Setda) dan sekretariat dewan (Setwan). Hal itu tampak dari diterbitkannya dua qanun, yakni Qanun Nomor 5/2007 (SOTK Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah) pada 5 Oktober 2007; serta Qanun Nomor 4/2007 (SOTK Setda dan Setwan) pada 23 Oktober 2007.

Reorganisasi struktur tersebut ditujukan untuk memangkas rentang birokrasi dan meningkatkan efektivitas kerja secara keseluruhan. Pengisian kursi kepala dinas dilakukan dengan uji kecakapan dan kelayakan *(fit and proper test)* yang terbuka. Ditambah dengan pemublikasian prosesnya melalui media massa lokal, menjadikannya sebagai sebuah inovasi tersendiri dalam sejarah profesionalisme kepemerintahan. Empat asisten Setda, dipangkas menjadi tiga. Jumlah biro, dari dua belas, kini menjadi sembilan. Lima bagian di Setwan, dijadikan empat.

Amanat otsus Aceh dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), didukung dengan peningkatan kemampuan para penyusun UU dan anggota badan perencananya. UUPA menentukan, sekurang-kurangnya 76 raqan perlu dibentuk, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memprioritaskan 56 buah. Penentuan skala prioritas daftar judul raqan bukan semata-mata atas alasan qanun organik yang terkait langsung dengan pelaksanaan UUPA, melainkan sebagian justru untuk mendukung pelaksanaan keistimewaan Aceh lainnya.

Sejumlah fasilitator dan ahli telah dilibatkan selama dua tahun ini. Mereka ditempatkan untuk membantu pengembangan qanun dan mendokumentasikan perencanaan strategis. Per Juni 2008, hampir 40

Komitmen negara tetangga. Perdana Menteri Australia terpilih, Kevin Rudd, didampingi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengunjungi Balai Budidaya Air Payau di Ujung Batee, Kabupaten Aceh Besar, 14 Juni 2008. Besaran komitmen bantuan negara tetangga tersebut terhadap Pemulihan Aceh-Nias telah mencapai sekitar AU$147 juta. Foto: BRR/Arif Ariadi

raqan telah ditetapkan sebagai qanun. Sebanyak 80-an dokumen perencanaan pemerintahan telah diterbitkan. Sementara itu, masih banyak lagi raqan yang siap dan menunggu ditetapkan. Pada saat bersamaan, 300-an organisasi daerah telah menerima dukungan langsung untuk menguatkan partisipasi mereka dalam urusan kemasyarakatan. Dan, bila dianggap perlu, hal itu juga untuk mendukung pembentukan peraturan dan perencanaan pembangunan daerah yang seimbang dan mengakomodasi kepentingan yang lebih luas.

Pemda Aceh juga berupaya meningkatkan kecakapannya melalui penyelenggaraan program-program strategis, seperti halnya Program Transformasi Pemerintahan Aceh (*Aceh Government Transformation Programme,* AGTP). Program yang dirancang atas prakarsa Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ini difasilitasi oleh Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme,* UNDP) dengan dukungan dana dari MDF. AGTP langsung bekerja membantu gubernur dalam menyiapkan jajarannya untuk mengoordinasi proses transisi dari BRR.

Pada saat hampir bersamaan, BRR tengah dan terus memacu serah-terima aset hasil Pemulihan kepada Pemda, K/L terkait, ataupun masyarakat penerima manfaat. Aset-aset tersebut dicatat dalam Simas. Data yang rinci dan akurat dari setiap aset, tentu akan menjadi modal bagi Pemda bersangkutan dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan serta pemanfaatan lebih lanjut.

Hal lain yang menggembirakan adalah, Pemerintah Aceh, kini telah berhasil menyusun Program Legislasi Aceh (prolega) 2007-12 manakala belum banyak provinsi lain melakukannya. Pada DPRA dan DPRK, telah pula diselenggarakan lokakarya sinergisasi legislatif untuk prolega pada April 2007. Beberapa pekan kemudian, Keputusan DPRA Nomor 6/2007 tentang Persetujuan Penetapan Prolega 2007, menyusul disahkan.

Bantuan operasional. Bertempat di halaman Kantor Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh, pada 4 Desember 2006, Pejabat Gubernur Provinsi NAD saat itu, DR. Ir. Mustafa Abubakar, M. Si., menerima secara simbolis bantuan operasional pemerintahan untuk tingkat provinsi hingga gampong. Bantuan dari Satker Sementara BRR-Peningkatan Penataan Kapasitas Kelembagaan NAD-Nias itu antara lain berupa kendaraan roda dua. Foto: BRR/Oni Imelva

Pemerintah Aceh juga telah berinisiatif memasukkan, baik isu transisi Pemulihan pascakonflik maupun pascatsunami, sebagai bagian dari misi pemampuan kapasitas, terutama dalam sektor perekonomian. Artinya, Pemda setempat telah memandang bahwa, penanganan kedua masalah tersebut adalah soko guru bagi perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya.

Alih Pengetahuan

Berkembang kekhawatiran bahwa, karena banyaknya fokus pada pengalihan aset fisik, maka alih pengetahuan pada SDM yang ada menjadi kurang tergarap. Keterlibatan aparat Daerah sebagai Satker di lapangan, misalnya, masih sedikit, padahal mereka inilah yang kelak sebagai pemelihara aset.

Namun hal ini kurang terbukti, karena di Aceh misalnya, hampir 70 persen Satker yang bertugas di berbagai proyek BRR adalah pegawai Pemda. Belum lagi ditambah dengan tenaga lokal yang bekerja di NGO. Jumlah mereka cukup banyak dan signifikan. Sehingga, sejalan dengan massifnya keterlibatan dalam proyek Pemulihan, kini SDM Aceh-Nias yang bermutu dan terlatih semakin meningkat.

Sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, banyak sudah pola "jemput bola" yang telah dilakukan oleh para aktor Pemulihan, termasuk BRR, untuk melakukan alih pengetahuan ke SDM Pemda setempat. Inisiasi pendirian AGDC oleh SIM-C *(baca subbab "Pengelolaan Informasi"),* pengembalian kemampuan kelembagaan tradisional (contoh: *Panglima La'ot*), atau pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja yang terlibat dalam proyek Pemulihan, adalah beberapa contohnya.

Pada tahun ini, peran SDM BRR di kantor distrik yang tersebar di segenap kabupaten/kota se-Aceh-Nias semakin dikedepankan. Distrik menjadi pelaksana berbagai proyek. Ia turut mengendalikan Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diwenangi untuk meninjau-ulang kegiatan dan, bila perlu, membatalkannya. Dalam kasus pembatalan seperti ini, deputi akan harus tunduk kepada Kepala Distrik. Dengan semakin berorientasi pada kewilayahan, diharapkan berbagai kegiatan menjadi lebih tepat sasaran.

Terkait dengan relasi kerja dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan kantor perwakilan dan distrik BRR, Sekber juga memiliki posisi strategis sebagai wahana alih pengetahuan. Hal itu ditunjukkan misalnya ketika berkontribusi dalam pengelolaan data dan informasi Pemulihan (RANdatabase), perencanaan tingkat kabupaten dan kecamatan, pengendalian serta monev program, serta memperkuat hubungan antarpemangku kepentingan lainnya.

Di Kabupaten Nias, Sekber cukup dipandang bagus dalam rangka melatih kemampuan SDM setempat. Pada tahap awal, rencana dari segenap pemangku kepentingan (BRR, Pemda, NGO) disatukan di Sekber untuk kemudian ditetapkan kriterianya. Setelah itu, mereka melakukan peninjauan-ulang, memilih prioritas, menetapkan program tahunan dan tahun jamak, serta membagi tanggung jawab program.

Kemampuan Sekber semakin teruji ketika harus melakukan koordinasi terhadap banyak pihak, dan tentu saja banyak kepentingan, dalam penyepakatan program dan anggaran. Pada tahap pengendalian, Sekber menjadi titik temu antara Asisten Pembangunan/Kepala Dinas dan Kantor Perwakilan BRR, yang mengendalikan Satkernya masing-masing. Pada tahap monev, Sekber menjadi resultan antara Unit Monev-Audit Pemkab dan Unit Monev-Audit BRR, yang bertanggung jawab atas program Pemda atau BRR masing-masing.

Dengan memperhatikan peran strategis yang ada, maka upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemda sejak 2008 hingga April 2009 diarahkan pada:

- mengoordinir identifikasi dan alih aset rekonstruksi;
- mempersiapkan instansi Pemda yang bertanggung jawab atas pengoperasian

dan perawatan aset yang telah atau akan diserahterimakan;

- mengoordinir perencanaan antara BRR dan Pemda, sehingga Pemda dapat lebih memahami dasar pemikiran program rekonstruksi sebagai basis dari pembangunan wilayah yang berkelanjutan;
- memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pembangunan di tingkat kecamatan untuk mendukung kedudukan kecamatan sebagai titik keberlanjutan proses dan kegiatan rekonstruksi; serta,
- memulai kampanye kebijakan dan aksi-aksi DRR, termasuk melalui pembentukan lembaga-lembaga DRR formal di kabupaten dan kecamatan.

Di Kepulauan Nias, pengembangan Sekber ke arah seperti itu akan didukung oleh beragam instrumen/kegiatan yang telah berlangsung—sebagian besar berupa program pembangunan kapasitas Pemda. Program tersebut antara lain Perencanaan Tata-Ruang Wilayah Pascabencana Nias dan Nias Selatan, Dukungan untuk Kawasan Miskin dan Tertinggal (*Support for Poor and Disadvantage Areas,* SPADA), KRF yang dikembangkan UNORC, Tata-Ruang dan Rencana Aksi Kecamatan, serta pengoperasian dan perawatan prasarana di bawah Program Pemampuan Rekonstruksi Prasarana (*Infrastructure Reconstruction Enabling Program,* IREP). Sekalipun pada Januari 2009 akan menjadi unit transisi/peralihan yang bertanggung jawab langsung pada bupati dengan tugas utama menyinambungkan kegiatan Pemulihan pasca-BRR, Sekber di Nias akan dipertahankan hingga April 2009.

Pada saat bersamaan, UNORC tengah menggodog sebuah prakarsa untuk lebih menstimulasi penyebaran

Kotak 22:

SEAN

SEAN adalah jaringan forum virtual yang diprakarsai UNORC untuk menghubungkan Masyarakat Praktisi (Communities of Practice, CoP) pembangunan se-Aceh-Nias. Anggotanya terdiri dari peneliti akademis, pemerintah, pekerja NGO, pengusaha, donor, aktivis, dan anggota masyarakat. SEAN mendukung sembilan bidang CoP, yakni Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Persiapan dan Pengurangan Risiko Bencana, Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, Perumahan dan Prasarana, Gender, Lingkungan Hidup, dan Pascakonflik.

Melalui email interaktif, setiap anggota SEAN dapat mengirimkan pertanyaan, yang selanjutnya ditinjau dan diedarkan kepada anggota CoP. Sesama anggota CoP akan memberikan saran, pengalaman, koneksi, atau berbagai masukan lainnya atas pertanyaan yang diajukan. Inilah pertanyaan dan jawaban gabungan yang menyodorkan peluang kepada anggota CoP untuk menanggapinya sesuai dengan pengetahuan dan saran yang dimiliki; selanjutnya menerima jawaban gabungan di akhir periode diskusi. Untuk meningkatkan kemampuan jejaring, pertanyaan dan tanggapan yang diberikan oleh setiap anggota akan ditandai dengan nama mereka.

Untuk mendukung kegiatan layanan pertanyaan-jawaban gabungan ini, maka setiap akhir periode akan disertai penerbitan buklet, yaitu tempat penyimpanan pengetahuan lintasreferensi *online*. Isinya adalah opsi kelompok aksi, layanan e-konsultasi sebagai penampung umpan-balik untuk berbagai dokumen, kebijakan, atau rencana, opsi pelaksanaan, e-diskusi selama 3 minggu, serta rapat tahunan untuk tiap-tiap CoP. Setiap layanan ini akan dikembangkan sejalan dengan perkembangan masing-masing CoP agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Aceh-Nias. Dengan demikian, anggota CoP akan memperoleh informasi dan riset terkini.

Dilatih agar kuat. Dalam rangka memperkuat kapasitas SDM setempat, BRR menginisiasi beragam pelatihan. Termasuk satu paket dalam kegiatan e-procurement di Pemdakab Aceh Tamiang, pada 21 Januari 2008, dilangsungkan pula pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi aparat Pemda terkait. Foto: BRR/Raihanun

praktif-praktif terbaik yang didapatkan selama proses Pemulihan melalui Pertukaran Solusi Aceh dan Nias (*Solution Exchange Aceh and Nias,* SEAN). Melalui penyelenggaraan lini komunikasinya, SEAN mendorong praktisi pembangunan yang berasal dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan menciptakan solusi yang inovatif. Prakarsa ini juga bermaksud untuk membangun landasan pengetahuan, pengalaman, dan efisiensi lebih lanjut dengan mencegah penemuan yang sebelumnya telah ada.

Adanya Sekber, pelibatan SDM Pemda dalam Satker, magang kerja tenaga lokal di NGO (inter)nasional, SEAN, dan lain-lain, telah menyubursebarkan praktik pembelajaran dan peningkatan kemampuan. Pengalaman berharga dari sana tentu tak sedikit yang telah dipetik oleh putra-putri terbaik setempat. SDM Aceh-Nias tersebut kini telah menjadi investasi bagi hari ini dan, terutama, masa depan. Proses investasi itu berlangsung melalui penyerapan kecakapan berorganisasi dan penguasaan teknologi yang lebih baik ketimbang prabencana.

Kecakapan berorganisasi dan penguasaan teknologi yang lebih baik, memantapkan kepercayaan terhadap kemampuan diri. Kepercayaan diri adalah modal penting untuk membangkitkan produktivitas. Dan produktivitas yang meningkat, adalah impetus bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tumbuhnya Perekonomian

Terdapat korelasi menarik antara (dampak) bencana dengan pertumbuhan ekonomi. Bencana, kendati pada satu sisi berdampak mengurangi tingkat pengembalian modal fisik, namun pada sisi lain, malah mengakumulasi tingkat pengembalian relatif modal manusia (SDM), keseluruhan produktivitas, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai satu contoh kasus dan kajian, kita akan coba Aceh.

Sejumlah analis dan pengamat ekonomi, pada penghujung Januari 2008, pernah menyatakan bahwa ekonomi Aceh disinyalir terpuruk menuju kebangkrutan. Inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah pascatsunami yang menderanya dianggap sebagai pemicu. Bank Indonesia (BI) Banda Aceh melansir, pertumbuhan ekonomi Aceh 2007 *(y-on-y)* turun sebesar 0,6 persen.

Memang benar bahwa pada awal 2008 pertumbuhan ekonomi di Aceh terpuruk sebesar itu serta, apalagi, angka inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh termasuk tinggi di Indonesia. Per Januari 2008, IHK di tingkat nasional tercatat 157,27 persen; sementara di Lhokseumawe dan Banda Aceh masing-masing 160,79 dan 208,80 persen. Besaran angka itu memang cukup mengkhawatirkan, namun juga kurang *fair*. Pasalnya, angka 0,6 persen itu tanpa memperhitungkan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2007 yang masih positif.

Keterlambatan realisasi belanja pembangunan, harus diakui, memang kerap terjadi di Aceh—Nias juga. Banyak proyek pembangunan justru dimulai pada September 2007, sedangkan dari Januari sampai Oktober 2007, kebanyakan hanya berupa belanja rutin Pemda. Sehingga, jika variabel ini turut diperhitungkan, maka keluarannya akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan pertengahan tahun 2008 dan selanjutnya.

Pada semester pertama 2008, untuk pertama kalinya dalam sekian tahun terakhir, inflasi di Banda Aceh dan Lhokseumawe—dua kota yang kerap dijadikan barometer ekonomi Aceh—merosot tajam pada angka 0,25 dan 0,46 persen. Besaran ini cukup signifikan, mengingat, ekonomi di Aceh banyak ditopang oleh *booming* proyek-proyek rekonstruksi dan inflasi nasional yang sebesar 1,37 persen. Coba bandingkan dengan Medan dan Palembang yang masing-masing sebesar 1,36 dan 1,32 persen (hanya selisih 1 dan 4 dijit mendekati angka inflasi nasional). Bahkan tingkat inflasi di Banda Aceh adalah yang terendah se-Sumatera.

Begitu pula dengan tingkat IHK. Ketika Januari 2008 IHK di Lhokseumawe dan Banda Aceh sebesar 160,79 dan 208,80 persen—semuanya di atas IHK nasional (157,27 persen)—kini peringkatnya malah terbalik. Pada semester pertama 2008, ketika IHK nasional tercatat 111,59 persen, IHK di Lhokseumawe dan Banda Aceh masing-masing tercatat sebesar 109,27

Tabel 2:
Tingkat IHK dan inflasi di 16 kota Sumatera (dalam persen)

No	Kota	IHK	Inflasi
1	Banda Aceh	110,82	0,25
2	Lhokseumawe	109,27	0,46
3	Sibolga	111,07	1,27
4	Pematang Siantar	111,47	1,24
5	Medan	111,42	1,36
6	Padang Sidempuan	113,94	1,42
7	Padang	113,09	1,51
8	Pekanbaru	110,22	1,32
9	Dumai	115,25	1,68
10	Jambi	114,23	1,17
11	Palembang	114,15	1,32
12	Bengkulu	115,14	2,63
13	Bandar Lampung	114,34	2,20
14	Pangkal Pinang	115,20	1,01
15	Batam	109,07	1,12
16	Tanjung Pinang	112,42	0,71
	Nasional	111,59	1,37

Sumber: BPS, Juli 2008

dan 110,82 persen—jauh di bawah IHK nasional. Bandingkan dengan IHK di Medan (111,42 persen) dan Palembang (114,15 persen) yang hampir setara dengan IHK nasional. Bahkan se-Sumatera, tingkat IHK Lhokseumawe terendah di atas Batam.

Adapun laju inflasi tahun kalender 2008 (Januari-Juli) di Banda Aceh dan Lhokseumawe masing-masing sebesar 7,57 dan 7,86 persen. Keduanya berada di bawah tingkat laju inflasi nasional yang sebesar 8,85 persen. Sedangkan laju inflasi *(y-on-y)* pada 2008 (Juli 2008 terhadap Juli 2007) di Banda Aceh dan Lhokseumawe sebesar 10,82 dan 10,06 persen, di bawah nasional (11,90 persen). Perbandingan dengan dua tahun sebelumnya, bisa disimak pada tabel berikut.

Tabel 3:
Inflasi 2006-08 di dua kota besar di Aceh (dalam persen)

Tahun	Kota				Nasional	
	Banda Aceh		Lhokseumawe			
	kalender	*y-on-y*	kalender	*y-on-y*	kalender	*y-on-y*
2006	9,54	9,54	11,47	11,47	6,60	6,60
2007	11,00	11,00	4,18	4,18	6,59	6,59
2008 (per Juli)	7,57	10,82	7,86	10,06	8,85	11,90

Sumber: BPS, Juli 2008

Pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. PDRB Aceh pun meningkat. Besaran itu akan meningkat lagi, bahkan drastis, andai semua bantuan di luar anggaran pemerintah turut diperhitungkan. Umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Pada semester-I 2008, besaran PDRB Aceh (tanpa memperhitungkan bantuan di luar anggaran pemerintah) atas harga berlaku pada triwulan-II 2008 mencapai Rp20,05 trilyun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2008 pada triwulan yang sama sebesar Rp8,43 trilyun. Besaran PDRB tanpa miyak dan gas bumi (migas) atas dasar harga berlaku pada triwulan yang sama sebesar Rp14,60 trilyun dan berdasarkan harga konstan sebesar Rp6,6 trilyun.

Dibandingkan triwulan-I 2008 *(q-to-q)*, pertumbuhan ekonomi Aceh selama triwulan-II yang diukur atas dasar kenaikan PDRB 2008 hanya 0,35 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2007 *(y-to-y),* pertumbuhannya sebesar -7,92 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester-I 2008 dibanding dengan semester-I 2007 *(c-to-c)* sebesar -6,57 persen.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas Aceh, relatif lebih tinggi lagi. Jika dibandingkan triwulan-I 2008 *(q-to-q)*, maka capaian pada triwulan-II 2008 meningkat sebesar 2,05 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2007 *(y-to-y),* terjadi pertumbuhan sebesar 2,18 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada semester-I 2008 dibandingkan dengan semester-I 2007 *(c-to-c)* adalah sebesar 3 persen.

Adapun sektor yang paling tinggi pertumbuhannya *(q-to-q)* adalah pertanian, yakni 4,24 persen. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sebesar 4,19 persen; berbeda dengan sektor bangunan yang sebesar 1,34 persen. Sedangkan secara tahunan *(y-to-y)*, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik dan air minum, yakni 10,27 persen. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 8,10 persen; berbeda dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sekitar 3,51 persen.

Dinamika angka-angka (inflasi, IHK, PDRB) yang membaik, tidak serta-merta merupakan jaminan bahwa perekonomian tumbuh secara merata. Alih-alih demikian, pertumbuhan itu masih terlihat menumpuk

Senja di Simpang Surabaya. Lalu-lintas Simpang Surabaya, Banda Aceh, dalam panoramanya pada senjakala, 1 November 2008. Sarana-prasarana dan kehidupan perkotaan di seluruh Aceh berangsur-angsur makin kondusif, sebagaimana yang diharapkan banyak pihak sebelumnya. Foto: BRR/Arif Ariadi

Tabel 4:
PDRB Aceh semester pertama 2008 di lapangan usaha (dalam trilyun rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku 2008		Harga Konstan 2008	
		Triwulan-I	Triwulan-II	Triwulan-I	Triwulan-II
1	Pertanian	5,37	5,66	2,1	2,19
2	Pertambangan dan penggalian	3,18	3,53	1,19	1,13
3	Industri pengolahan	2,32	2,61	1,14	1,1
4	Listrik, gas, dan air bersih	0,05	0,05	0,02	0,02
5	Bangunan	1,42	1,54	0,5	0,51
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	2,54	2,67	1,44	1,45
7	Pengangkutan dan komunikasi	1,5	1,64	0,53	0,53
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,35	0,38	0,13	0,13
9	Jasa-jasa	1,91	1,95	1,35	1,37
PDRB		18,6	20,03	8,4	4,43
PDRB tanpa migas		13,81	14,6	6,52	6,66

Sumber: BPS, Juli 2008

Baromater perekonomian. Kawasan perniagaan Pasar Atjeh dan sekitarnya, merupakan barometer perekonomian Kota Banda Aceh. Pembangunan tahap awal Pasar Atjeh dengan dana sekitar Rp30 milyar dari JICS dan dikerjakan PT Hutama Karya, rampung pada Maret 2008. Gambar diambil pada 29 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

pada satu-dua kota tertentu. Dana cenderung terpusat di daerah perkotaan dan wilayah yang lebih dekat dengan ibukota provinsi.

BRR dan UNORC merilis Indeks Pembangunan dan Pemulihan *(Recovery and Development Index, RDI)* berdasarkan tingkat kinerja dari 14 indikator pemulihan utama. Dalam laporannya disebutkan bahwa, RDI terbaik di Aceh berada di Sabang, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Ketiganya terletak di bagian utara provinsi. Dengan RDI bernilai minus, 10 kabupaten dan 2 kota di Aceh tertinggal dalam proses Pemulihan dan pembangunan. RDI terburuk dialami Simeuleu, karena, sekalipun termasuk yang paling parah terimbas oleh tsunami, pulau ini sulit diakses dari ibukota provinsi. RDI yang termasuk terburuk lainnya mencakup wilayah pedalaman selatan yang justru tidak atau sedikit saja terimbas oleh konflik lama dan tsunami. Wilayah itu mencakup Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang. Nagan Raya di pesisir barat Aceh, juga termasuk.

Bahwa kemungkinan terjadi salah arah dalam kebijakan pembangunan di daerah, sebagaimana daerah lain di Indonesia, adalah keprihatinan yang bukan hanya telah dipahami, namun ditanggapi oleh segenap pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai sebaran pertumbuhan ekonomi yang lebih adil-merata telah dipahami sebagai pencegah timbulnya kesenjangan antardaerah. Wacana pemekaran wilayah yang gencar akhir-akhir ini adalah salah satu indikasinya.

Disadari, dalam semangat otda, pemekaran wilayah memang dimungkinkan. Namun jika tanpa memperhatikan beban negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kesiapan SDM-nya, tentu menjadi kurang bijaksana. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Penopang utama. Lanskap kilang minyak di Kota Lhokseumawe, 9 April 2006. Kekayaan migas akan tetap menjadi penopang utama perekonomian Aceh pada masa-masa mendatang. BRR/Arif Ariadi

Tabel 5:
Laju pertumbuhan PDRB Aceh semester pertama 2008 di lapangan usaha (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	*q-to-q*		*y-to-y*		*c-to-c*
		Triwulan-I 2008 terhadap Triwulan-IV 2007	Triwulan-II 2008 terhadap Triwulan-I 2008	Triwulan-I 2008 terhadap Triwulan-IV 2007	Triwulan-II 2008 terhadap Triwulan-I 2008	Semester-I 2008 terhadap Semester-I 2007
1	Pertanian	1,81	4,24	5,55	3,44	4,46
2	Pertambangan dan penggalian	-9,68	-5,52	-35,45	-42,55	-39,11
3	Industri pengolahan	0,13	-2,72	-4,76	-2,53	-3,68
4	Listrik, gas, dan air bersih	-0,86	-0,96	20,36	10,27	15,12
5	Bangunan	-13,56	1,34	2,64	-1,75	0,38
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	-3,66	0,69	5,02	3,51	4,26
7	Pengangkutan dan komunikasi	-5,25	-0,19	0,29	-0,53	-0,12
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	-20,76	4,19	23,91	8,10	15,30
9	Jasa-jasa	-3,92	1,19	2,25	1,04	1,64
PDRB		-3,90	0,35	-5,18	-7,92	-6,57
PDRB nonmigas		-2,98	2,05	4,12	2,18	3,13

Sumber: BPS, Juli 2008

(musrenbang) pun belum dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengangkat kebutuhan riil di tingkat masyarakat.

Rendahnya PDRB di di Aceh-Nias sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan struktural atau tidak dimilikinya sumber-sumber keuangan yang potensial. Dalam banyak kasus, tanpa menafikan tugas-tugas kenegaraan, hal itu juga disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat sebelumnya yang sentralistik. Melalui prakarsa regionalisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis-wilayah yang telah sejak dini dilansir BRR, dengan segala kurang-lebihnya, kesenjangan semacam ini sebenarnya telah diantisipasi.

Satu hal yang tak bisa ditampik adalah, bagaimanapun dinamisnya aneka lapangan usaha yang ada, tapi dari komposisi PDRB terlihat bahwa pertanian adalah sektor yang paling besar kontribusinya *(lihat tabel PDRB Aceh Semester pertama 2008 di lapangan usaha)*. Boleh jadi ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian masih cenderung subsisten karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ini. Kecenderungan ini lebih kuat di Nias.

Oleh karena itu, telah menjadi tantangan bagi Daerah untuk secara kreatif-inovatif mendorong sektor nonpertanian (selain migas), seperti industri manufaktur, agroindustri, jasa, dan sektor ekonomi lainnya yang potensial dikembangkan. Dengan

Feri Ulee Lheue. Kapal feri merapat di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, 12 Januari 2008. Pengelolaan retribusi yang profesional pada transportasi laut diharapkan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah setempat. Foto: BRR/Arif Ariadi

demikian, selain ekonomi akan bertumbuh secara beragam dan merata, sumber penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun turut terdongkrak.

Harus diakui bahwa memang masih terdapat ketergantungan Daerah pada Pemerintah Pusat, dalam artian, Penerimaan Daerah masih didominasi kucuran dana Pemerintah Pusat. Sedikit Daerah yang tidak demikian, karena diimbangi oleh pengelolaan sumber kekayaan alam—karet, timah, migas, kayu—yang merupakan andalan ekspor Indonesia. Meningkatkan PAD tanpa menyumbat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, adalah salah satu upaya terbaik dalam mengurangi ketergantungan tersebut. Bahkan dengan desentralisasi fiskal saat ini, Daerah telah diberi kesempatan lebih luas untuk melakukan *'taxing power'* seperti pungutan pajak dan retribusi.

Disadari, meningkatkan penerimaan Daerah juga perlu kebijaksanaan; apakah Pemda akan mengambil langkah memperluas basis dan struktur pajak/retribusi atau meningkatkan investasi daerah. Jika melakukan yang pertama, dikhawatirkan perekonomian Daerah akan terdistorsi dan memicu *high cost economy.* Namun, jika pilihannya yang kedua, maka kalangan investor harus dirangsang agar tertarik menanamkan modalnya. Tiada investasi tanpa layanan umum pemerintahan (keringanan prosedur investasi, *tax holiday,* kepastian hukum), ketersediaan sarana-prasarana umum, sentra ekonomi, serta kesiapan SDM setempat yang memadai.

Untuk itu, selain pembangunan sarana-prasarana umum yang telah diupayakan melalui pendekatan berbasis-kawasan, sejumlah penguatan lain juga telah didorongkan BRR dan Mitra Pemulihan. Advokasi untuk menarik minat investor telah dilapangkan jalannya melalui pembentukan IOO. Sentra-sentra ekonomi telah disiapkan dengan membentuk sentra nelayan, peternakan, pertanian, hasil kerajinan, serta dukungan kemasan melalui KKM. SDM setempat yang

Sedia payung sebelum hujan. Simulasi tsunami atau *tsunami drill* yang diikuti oleh para relawan dan masyarakat setempat, diselenggarakan di Banda Aceh, 1 November 2008. Latihan semacam ini merupakan bagian dari komitmen tanggap bencana atau mitigasi: sebuah upaya "sedia payung sebelum hujan". Foto: BRR/Arif Ariadi.

handal telah disiapkan melalui beragam pelatihan keterampilan dan lokakarya kewirausahaan. Tak lupa, pendanaan dengan mekanisme tertentu juga telah diberikan untuk memperkuat usaha kecil, mikro, dan menengah.

Tumbuh bersama dalam iklim perekonomian yang memadai, adalah harapan dari kerja keras Pemulihan yang dilakukan secara bersama-sama oleh BRR, mitra Pemulihan, serta Pemda dan masyarakat setempat. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kapasitas Pemda, sebagai pemangku kepentingan pokok dalam ujung Pemulihan, telah terlihat semakin menguat. Dengan demikian, penumbuhan perekonomian Aceh-Nias ke arah yang lebih baik semakin bukan lagi berada dalam status akan, melainkan sedang, terjadi.

Pengurangan Risiko Bencana

PDRR telah menjadi salah satu isu lintassektoral sejak CFAN kedua. Pada lingkup wilayah yang lebih spesifik, Nias, dalam perkembangan terakhir, isu DRR telah semakin dpertajam dalam forum NISM keempat *(baca kotak "Rekomendasi NISM Keempat").* Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa, bencana memang tidak sanggup dihindari, tapi tidak untuk mengurangi risiko dan jumlah korbannya.

Kelompok kerja DRR yang dibentuk pasca-CFAN kedua sangat aktif mendorong kesinambungan program Pemulihan yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek DRR. Beberapa pemangku kepentingan yang masuk dalam kelompok ini, selain BRR adalah Badan Pengawasan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), MDF, Dinas Kehutanan, Program Lingkungan PBB (United Nations Environmental Programme, UNEP), Fauna and Flora International,

Seminar persahabatan. Seminar "Promoting Initiatives on Disaster Risk Management" di Jakarta, 6 Agustus 2008, diadakan dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Selandia Baru. Foto: BRR/Arif Ariadi

Conservation International–Indonesia, World Wild Fund (WWF)-Indonesia, Badan Kerjasama Jerman *(Gesselschaft for Technische Zusammenarbeit, GTZ),* PanEco/Yayasan Ekosistem Leuser (YEL), Caritas Jerman, serta Leuser International Foundation.

Kesenjangan-kesenjangan proyek Pemulihan saling diisi oleh para mitra. Misalnya bahwa, Rencana Induk mengamanatkan aturan "sabuk hijau" yang mengharuskan pembangunan-kembali perumahan dan permukiman menyingkir sejauh tiga kilometer dari garis pantai terdekat. Ketika ini dilanggar bersama-sama oleh para penyedia bantuan, maka kesenjangan ini diisi dengan penyediaan bangunan penyelamatan *(baca juga akhir subbab "Implementasi").*

Pada 26 April 2007 telah lahir UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Terbitnya UU tersebut, tidak serta-merta secara cepat menurunkan risiko bencana di masa datang.

Bangunan penyelamatan, adalah salah satu prakarsa untuk itu. Bangunan yang dilengkapi dengan landasan pendaratan helikopter di bagian atasnya itu sehari-hari juga disiapkan sebagai gedung serbaguna. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pertemuan, rekreasi, maupun pembelajaran mitigasi bencana.

JICS telah membangun tiga unit bangunan penyelamatan di Kecamatan Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh. Adapun BRR, enam unit. Masing-masing terdapat di Desa Seukon (Kecamatan Simpang Tiga, Sigli), Desa Keude (Kecamatan Samalanga, Bireuen), Desa Jambo Timur (Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe), Desa Dayah Baro (Kecamatan Krueng Sabee, Calang), Desa Seuneubok (Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat), dan Desa Ulee Lheue (Banda Aceh). Bangunan yang disebut terakhir kini juga dimanfaatkan sebagai Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana atau TDMRC (Tsunami and Disaster Mitigation Research Center).

Bangunan multifungsi. Gedung TDMRC berdiri megah di Ulee Lheue, Banda Aceh, 1 Nopember 2008. Selain sebagai tempat untuk menyediakan data dan informasi terkait dampak bencana, TDMRC juga adalah merupakan tempat penyelamatan (escape building) jika sewaktu-waktu tsunami datang. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 23:

TDMRC

Peristiwa gempa bertsunami di Aceh telah mendorong inspirasi bagi Unsyiah untuk mendirikan TDMRC pada 30 Oktober 2006. Berbekal tekad untuk menuju pembangunan Aceh yang lebih baik, dengan dukungan para akademisi dan pakar dari berbagai disiplin ilmu, Unsyiah membentuk suatu lembaga riset. Lembaga bertaraf internasional itu pada dasarnya berawal dari dukungan terhadap program peringatan dini dan DRR dari BRR. Selain itu, TDRMC juga mengumpulkan dan menyediakan data terbaik dengan mempercepat proses pengumpulan data terkait dampak bencana secara tepat. TDMRC akan berkontribusi dalam pengondisian masyarakat yang tahan bencana, serta berkolaborasi dengan para peneliti dan lembaga riset lainnya dalam riset-riset kebencanaan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- Hyogo Prefecture, Jepang (pengembangan museum tsunami);
- Pemerintah Kotamadya Banda Aceh dan BRR (perencanaan kontijensi Banda Aceh);
- Sea Defence Consultant atau SDC (pemodelan tsunami dan pengembangan bangunan penyelamatan);
- Universitas Fuji Tokoha (kerjasama di bidang pendidikan kebencanaan); serta,
- PMI dan SDC (pelatihan evakuasi tsunami).

Aktifitas yang saat ini telah dan tengah diselenggarakan TDRMC antara lain:

- penyimpanan dan distribusi data mengenai tsunami dan pengurangan risiko bencana;
- peninjauan-ulang, analisis, dan konsultasi tentang kebijakan pengurangan risiko bencana;
- pendidikan dan kesiapsiagaan bencana;
- pengembangan kapasitas SDM; serta,
- peningkatan riset dan inovasi di bidang manajemen bencana.

Selain membangun sistem peringatan dini tsunami, diselenggarakan pula simulasi bencana dan latihan evakuasi tsunami *(tsunami drill)*. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang apa yang (tidak) seharusnya dilakukan saat bencana datang. Bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), prakarsa ini akan dilaksanakan BRR pada November 2008.

BRR, melalui Satker Pembinaan Keuangan dan Perencanaannya, serta Pemda Aceh-Nias, telah melakukan kajian mikrozonasi di, dan untuk, Banda Aceh. Kajian yang mengambil lokasi di barat (Ujong Pancu) dan timur (Ujong Batee) Banda Aceh ini adalah untuk mengidentifikasi zora rawan bahaya gempa dan kemungkinan munculnya bahaya tsunami. Bahaya-ikutannya *(collateral hazard)* pun tak lupa diidentifikasi.

Kelak, upaya preventif mitigasi bencana atau "sedia payung sebelum hujan" ini digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya, selain peta mikrozonasi potensi area rawan bencana, kriteria desain seismik dan tsunami serta masukan dalam peraturan dan petunjuk bangunan tahan gempa disediakan pula.

Peta tersebut sedianya akan menjadi rujukan dalam menyusun RTRW tiga dimensi, dengan mempertimbangkan kondisi geografis (dirgantara dan permukaan bumi) sekaligus geologis (kerak bumi). Dua kondisi ini dipertimbangkan demi mengantisipasi pengembangan wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada masa depan.

DAMPAK-IKUTAN

Jalan Amerika. Ruas Lhoong, Aceh Besar, yang sudah mulus ini (foto diambil pada 12 Juni 2008) adalah bagian dari jalan Banda Aceh-Calang yang didanai USAID dengan total sekitar AS$240 juta. Peletakan batu pertama, dilakukan pada 25 Agustus 2005. Jalan "berkualitas Amerika" itu diharapkan menjadi pemacu bagi kawasan Pantai Barat agar mengimbangi kemajuan Pantai Timur Aceh. Foto: BRR/Arif Ariadi

Dampak-Ikutan

Tengah dan telah tersedianya ribuan sarana-prasarana dan aset publik keluaran proyek Pemulihan—banyak di antaranya yang mengadopsi teknologi mutakhir—bisa atau tidak, telah menjadi stimulator bagi Pemda setempat. Pemda, selain bergegas merekrut calon PNS untuk mengisi posisi-posisi yang lowong setelah ditinggalkan oleh ribuan PNS-nya yang meninggal, juga dituntut untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitasnya. Kenyataan bahwa kapasitas aparatur kurang memadai oleh sebab faktor struktural maupun kultural yang membelit sebelumnya, itulah yang sekarang menjadi tantangan. Melalui sejumlah kebijakan dan pelatihan, Pemerintah telah menyiapkan fasilitasi untuk kepentingan terkait.

Pada sektor swasta atau privat, masyarakat semakin sadar bahwa suasana kedaruratan pascabencana sudah tak selayaknya dipertahankan terus. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang dulu susah didapat, kini sudah banyak tersedia. Masyarakat, terutama para penyintas, semakin tergugah setelah melihat bahwa sarana-prasarana publik untuk mencari nafkah sudah banyak terbangun, bahkan tak sedikit yang lebih bagus ketimbang semula. Para pelayan mereka, Pemda, pun semakin tersiapkan jumlah dan mutunya.

Terkhusus di Aceh, iklim perdamaian yang bisa dihirup hari ini tapi tidak pada selama 29 tahun lampau, telah kondusif, jauh dari yang diperkirakan. Berkatnya, meski di sana-sini masih saja terjadi tindak kriminal lingkup kecil bernuansa politis, akan tetapi secara umum, kondisi sosial-kemasyarakatan, perekonomian, politik, dan budaya, menjadi termungkinkan untuk bukan hanya hidup kembali, tapi berkembang pesat.

Tak bisa disangkal, tanpa adanya situasi *chaos* konflik yang terhenti setelah tsunami, yang ditandai oleh MoU Helsinki 15 Agustus 2005, mustahil pekerjaan Pemulihan dapat berlangsung lancar dan bergegas. Perdamaian dan Pemulihan, dengan demikian, saling menjadi dampak-ikutan yang memperkokoh keterwujudan satu sama lain: perdamaian menjamin perealisasian Pemulihan, dan Pemulihan memperkuat bangunan perdamaian.

Sektor Publik

Pemulihan memajukan pelayanan publik hingga ke arah yang memadai. Aceh-Nias, dalam pada itu, dibangun kembali tatanan wilayah dan kehidupannya agar sejalan dengan dinamika aspirasi dan dinamika masyarakat. Dalam lingkup sektor publik, dinamika tersebut cukup berdampak dalam menstimulasi para pemangku kepentingan terkait untuk menunjukkan kesiapan dan ketanggapannya.

Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, meresponsnya dengan menerbitkan sejumlah kebijakan. Trilyunan keluaran hasil Pemulihan, ditangkap sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas pengelolaan aset negara secara lebih profesional. Guna memastikan kesinambungan pembangunan kelak, Pemerintah telah menerbitkan payung hukumnya. Di dalamnya juga telah diatur mekanisme pembagian tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) dan anggarannya.

Kebijakan Pemerintah

Khusus untuk Aceh, setelah disahkannya UUPA, maka tujuan-tujuan Pemulihan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan Daerah yang ada. Masa peralihan di Aceh mencakup keseluruhan provinsi berstatus otsus itu. Patut dicatat, terkait desentralisasi—sekaligus konsekuensi amanat MoU Helsinki yang kemudian dituangkan dalam UUPA—untuk semua urusan publik Aceh, Pemerintah Pusat tidak berkewenangan mencampuri kecuali dalam enam hal. Keenamnya terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan tertentu dalam bidang keagamaan.

Upaya strategis. Supaya dampak-ikutan positif yang sebesar-besarnya bisa didapat dan dampak-ikutan negatif seminimal mungkin dikurangi, BRR telah menggulirkan beberapa kebijakan strategis. Salah satunya, adalah dengan membentuk kantor-kantor perwakilan seperti Kantor BRR Perwakilan Nias ini. Gambar diambil pada 16 Juli 2008. Foto: BRR/Bodi CH

> Ketentuan tentang pembagian kewenangan urusan pemerintahan dalam semua sektor publik di Aceh diatur dalam UUPA pasal 7 ayat 2. Daerah tidak memiliki kewenangan mencampuri enam urusan Pemerintah Pusat. Sekalipun demikian, ketentuan itu tidak lantas menutup rapat-rapat kemungkinan Daerah untuk menangani keenam urusan Pemerintah Pusat tersebut. Melalui mekanisme tertentu, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat dapat saja mempercayakannya kepada Pemerintah Aceh. Hal ini diatur dalam UUPA pasal 7 ayat 3.

Adapun Nias, yang dicakupi sebenarnya hanya dua dari 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara, atau hanya enam persen dari populasi provinsi tanpa status otsus. Atas dasar itu, Pemerintah lantas mendekati Aceh dan Nias atas dasar perbedaan karakteristiknya, baik dari konteks sosial, ekonomi, budaya, kapasitas Pemda, maupun anggaran yang tersedia untuk pembangunan Daerah.

Supaya dampak-ikutan positif yang sebesar-besarnya bisa terjaring dan dampak-ikutan negatif seminimal mungkin dikurangi, BRR sebagai perpanjangan tangan Pemerintah telah menggulirkan beberapa kebijakan strategis. Pembentukan kantor-kantor regional dan pelibatan fungsionaris Pemda dalam Satker dan Sekber, baru beberapa di antaranya. Kebijakan tersebut sebenarnya telah memberikan sinyal bahwa, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Pemerintah lebih memilih pendekatan kebijakan yang berorientasi kewilayahan ketimbang fungsional. Atau dengan kata lain, dalam menangani Pemulihan Aceh-Nias, Pemerintah lebih desentralisatif ketimbang sentralisatif.

Dalam sistem yang berorientasi fungsional (merasa paling memahami "apa yang terbaik" bagi Daerah), kental kecenderungan bahwa di Daerah, Pemerintah Pusat hanya menyokong dan peduli

Prasarana pemacu. Kepala BRR Perwakilan Nias, William Sahbandar (kedua dari kiri) menyampaikan penjelasan kepada anggota Tim Pengawas DPR-RI seputar pembangunan Pelabuhan Gunungsitoli dalam kesempatan kunjungan tim tersebut ke Nias, Maret 2008. Prasarana ini diharapkan akan membuka dan memacu pembangunan Nias. Foto: BRR/Bodi CH

pada instansi-instasi vertikalnya saja. Pemda setempat sekadar sebagai obyek program. Ia dilangkahi dan, oleh karenanya, minim pemerkayaan kemampuan manajerial maupun kepemimpinan. Sebaliknya, semakin suatu sistem atau kebijakan berorientasi pada kewilayahan, maka semakin besar kecenderungan Pemerintah untuk bekerja melalui dan, oleh karenanya, memampukan kapasitas Pemdanya.

Seiring berakhirnya masa Pemulihan, desentralisasi dilakukan melalui sejumlah langkah. Seperti di Nias, tekad transisi yang mulus dari tahap Pemulihan ke Pembangunan-kembali sesegera mungkin, dijaminkan dengan melibatkan Pemda dalam perencanaam evaluasi dan peralihan kegiatan Pemulihan. Terkait pemeliharaan dan pengoperasian sarana-prasarana yang telah terbangun selama Pemulihan, Pemda dan segenap mitra kerja ditingkatkan kapasitasnya. Mekanisme skema DRR pun telah dipersiapkan Pemerintah agar terinstitusionalisasi ke dalam kerangka pembangunan Daerah.

Pembagian kewenangan Pusat-Daerah, di sana-sini tentu saja pelaksanaannya ada saja yang belum mulus. Perbedaan persepsi antaraktor Pemulihan akibat masih kaburnya pembagian kewenangan, mengakibatkan praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terkendala. Kegiatan tertentu yang seharusnya sudah dilakukan Pemda, ada yang masih dilakukan Pemerintah Pusat. Jika terkait sumberdaya seperti pengelolaan pelabuhan, hutan, atau pertambangan, kerapkali terjadi tarik-menarik kewenangan yang alot. Namun jika bersentuhan dengan kegiatan seperti pengelolaan panti jompo, panti asuhan, atau rumah sakit jiwa, cenderung muncul keengganan untuk mengelola.

Sebagai akibatnya, timbul persepsi di Daerah bahwa sebagian anggaran K/L di Daerah, baik itu sebagai dana

Menyapa penghuni kantor baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS (menyalami para pegawai), didampingi Kepala Bapel BRR, Kuntoro Mangkusubroto (paling kiri), mengunjungi Kantor Bupati Nias, 18 Juli 2008. Kantor yang terletak di Desa Hononamolo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, itu baru selasai dibangun dan diresmikan pemakaiannya pada 15 Mei 2008 silam. Foto: BRR/Bodi CH

dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan, perlu dialokasikan untuk mendanai urusan yang sebenarnya sudah menjadi urusan Daerah. Kondisi tersebut, tentu saja berpotensi mereduksi pembagian tupoksi dan tanggung jawab menjelang akhir masa Pemulihan, khususnya di semua lini kerjasama antara BRR dengan Pemda.

Anggaran pembangunan melalui mekanisme *on-* maupun *off-budget* sudah pasti akan menurun. Oleh karena itu, kini sedang disusun suatu mekanisme penganggaran khusus yang memberikan jaminan akan ketersediaan dana bagi kesinambungan pembangunan-kembali.

Selain itu juga sedang disusun sebuah Tim Penuntasan. Atas pertimbangan menjaga momentum dan kontinuitas pelaksanaan program Pemulihan, Tim Penuntasan diberi waktu selambat-lambatnya hingga akhir TA 2009 untuk mengemban dua tugas. Tugas pertama adalah menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung pada 2008. Tugas berikutnya, mengoordinasi pelaksanaan pekerjaan Pemulihan oleh K/L dan Pemda terkait serta mengoordinasi relasi dengan lembaga bilateral, multilateral, dan Donor. Muncul pertanyaan, bagaimana bentuk tanggung jawab K/L dalam memfasilitasi dan mendukung Pemda pada pascarekonstruksi?

Presiden SBY, pada penghujung 2007, telah menegaskan dalam forum PBB bahwa pelaksanaan program BRR akan berakhir November 2008. Sedangkan enam bulan berikutnya BRR lebih berfokus pada penyelesaian administrasi pengalihan tugas kepada K/L dan Pemda. Selanjutnya, pada 28 Mei 2008, Presiden telah menerbitkan Perpres 38/2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Di dalamnya, dicantumkan pembagian wewenang kerja K/L dan Pemda.

Kotak 24:

Giliran Kementerian/Lembaga dan Pemda

Pada 2009, Presiden SBY telah memutuskan bahwa tongkat estafet Pemulihan Aceh-Nias giliran akan dimandatkan kepada enam K/L (Pusat, Pemda Aceh dan Pemda di kepulauan Nias, Sumatera Utara) Sementara peran BRR, yang akan sudah berakhir pada 16 April 2009, hanya dibatasi pada perampungan urusan administrasi kelembagaan dan penyiapan laporan akhir pelaksanaan Pemulihan sepanjang 2005-2008.

Enam K/L termaksud adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Pertanahan Nasional, dengan total alokasi anggaran Rp1,78 trilyun. (Untuk Pemerintah Aceh dan Pemda di Kepulauan Nias,) masing-masing dianggarkan sebesar Rp1,3 trilyun dan Rp277 milyar. Adapun untuk BRR, masih dialokasikan Rp222 milyar lagi dalam rangka penuntasan tanggung jawab administratif dan koordinasi pelaksanaan Pemulihan Aceh-Nias yang akan dilaksanakan oleh Pemda dan K/L bersangkutan.

Kepastian pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya merujuk pada Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Menteri Keuangan Nomor SE-357/MK/2008 (tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah 2009). Selain itu juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 852/MK.02/2008 (tentang Pagu Sementara 2009 K/L) dengan program keberlanjutan yang sudah dialokasikan kepada masing-masing K/L.

Atas pertimbangan itu, kini, masing-masing regional sedang memacu diri. Kantor BRR Perwakilan Nias, misalnya, telah menyosialisasikan rencana kerangka waktu untuk PMT-nya *(lihat Bagan 8)*. Pemda dan K/L akan mengambil-alih proyek Pemulihan sejak 31 Oktober 2008, bertepatan dengan penyelesaian administrasi proyek oleh Kantor BRR Perwakilan Nias.

Pelaksanaan sisa proyek 2009, nantinya akan menjadi program-program *on-budget* di bawah K/L. IREP/IRFF akan ditangani Departemen Pekerjaan Umum, Nias LEDP dan SPADA di bawah Kementerian Negara Daerah Tertinggal, RALAS di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan *Rehabilitation and Reconstruction Program* (KRRP) dan transisi Nias di bawah Departemen Dalam Negeri.

Untuk kepentingan sinkronisasi kegiatan antarjenjang pemerintahan, KRRP akan mengadopsi pola Sekber yang sudah berjalan bagus. Adapun untuk koordinasi anggaran *on-* dan *off-budget,* koordinasi pengawasan, serta monev kegiatan rekonstruksi, akan dibentuk Desk Nias di Bappenas, sebagaimana digambarkan dalam Bagan 9.

Jelaslah, bagi kalangan K/L, capaian Pemulihan oleh BRR dan Mitra, telah ditangkap sebagai momentum untuk memantapkan peran masing-masing. Departemen PU akan menyesuaikan program

Bagan 7: Rencana kerangka-waktu PMT Kantor BRR Perwakilan Nias

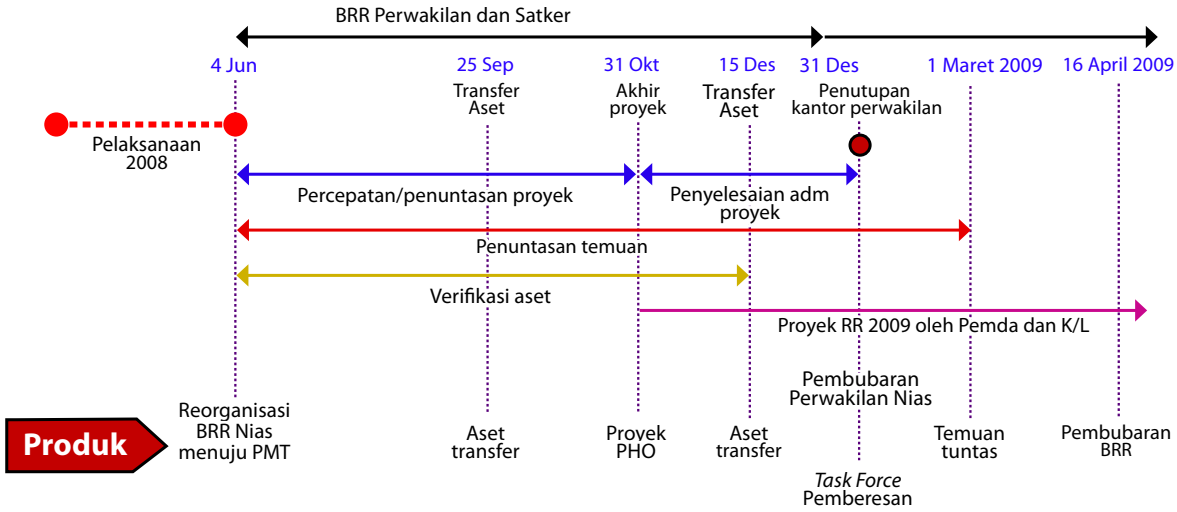

prasarana yang belum memenuhi target akibat kenaikan harga bahan/material sebagai imbas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Bersinergi dengan Departemen Perhubungan, hal tersebut dipandang penting dalam rangka pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat dan pengembangan investasi di daerah. Dampak-ikutan lebih lanjut yang diharapkan Departemen PU adalah tumbuhnya sentra-sentra produksi dan ketahanan pangan, dengan disertai sistem pengendalian efektif yang memperhatikan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini saja, Pemda diharapkan berperan dalam menyediakan pedoman/arahan yang jelas. Pedoman tersebut penting dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan yang berbasis penataan ruang, otonomi daerah, serta penerapan prinsip ketatapemerintahan yang baik dan bersih.

Bagan 8: Koordinasi anggaran penuntasan Pemulihan di Nias pada 2009

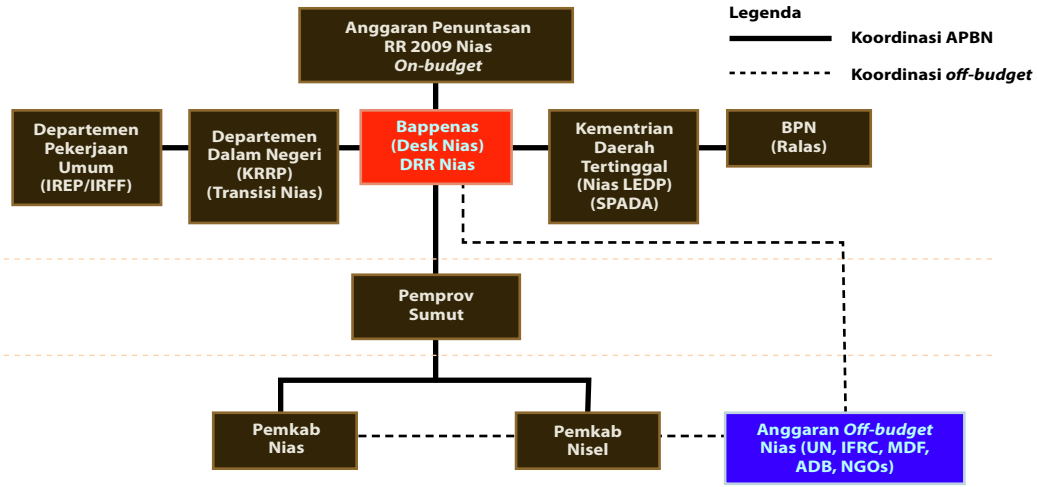

***Desk* Nias di tingkat Pemerintah Pusat diperlukan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan rekonstruksi 2009 di Kepulauan Nias**

(Sumber: Paparan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Tripartit. Februari 2008)

Demi pemerataan. Pengembangan prasarana di Aceh menyentuh pula kawasan-kawasan yang tak tersentuh tsunami. Hal tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan pemerataan dan upaya menutup kesenjangan pembangunan. Jalan kabupaten di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes ini (gambar diambil pada 28 Agustus 2008), adalah salah satunya. Foto: RANTF-BRR/Nazmiyah Sayuti

Pemda dituntut kapasitasnya sebagai fasilitator bagi terselenggaranya kembali interaksi kehidupan dalam seluruh aspek. Selain itu, Pemda juga harus mampu dalam menyiapkan kapasitas dan jaringan prasarana di semua tatanan dan tataran agar interaksi masyarakatnya, baik dalam lingkup sektoral maupun regional, terintegrasi secara baik.

Dalam pada itu, Pemda Aceh telah semakin solid dalam merencanakan koridor yang menghubungkan, dan membuka, kawasan-kawasan yang relatif masih terisolasi. Selain disparitas pertumbuhan regional antara kawasan Pantai Barat, Pantai Timur, dan Tengah Aceh semakin terkikis, upaya itu tentu juga akan menstimulasi aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan yang kelak dilalui. Aksesibilitas sosial-kemasyarakatan, ekonomi, pemerintahan, serta pertahanan-keamanan, bisa dipastikan akan turut terkatrol.

Segenap pihak semakin memahami bahwa, apabila aspek-aspek pemerintahan daerah, mulai dari SDM, kelembagaan, hingga sistemnya belum siap, kerja keras membangun Aceh-Nias secara lebih baik dan berkesinambungan akan tiada berarti. Di mata dunia, reputasi Pemulihan Aceh-Nias oleh Indonesia pun akan dipertaruhkan manakala Pemda setempat kurang dalam menjemput peran aktifnya.

Pengelolaan Aset

Hingga kini BRR telah melaksanakan 5.000-an program/proyek dan mengoordinasi 12.500-an lainnya. Hal tersebut, salah satunya berdampak pada diperlukannya sebuah pengendalian yang memadai dan pengelolaan hasil agar semua keluaran Pemulihan Aceh-Nias, khususnya aset, menjadi tertata. Lebih-lebih dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR, kebutuhan akan sebuah pengelolaan aset yang khusus dan cepat, kian mendesak. Penanganan

Indikator keberhasilan. Kendaraan-kendaraan operasional ini adalah bagian dari aset yang telah diserahterimakan BRR ke Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Banda Aceh 1 Februari 2008. Dengan banyaknya aset rekonstruksi yang telah dihasilkan, dampak pada Pemulihan yang menyeluruh merupakan indikator kunci bagi keberhasilan upaya Pemerintah, baik BRR maupun Pemda setempat. Foto: BRR/Usman

khusus dan cepat tersebut diiringi dengan pencatatan, pelaporan, serta pendokumentasian kepemilikan yang valid dan akurat.

Aset kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi berasal dari kegiatan yang didanai melalui skema *on-* maupun *off-budget*. Dari hasil identifikasi awal pada penghujung 2006 saja, berdasarkan realisasi anggaran/DIPA, telah terdata sejumlah aset tetap senilai Rp3 trilyun.

Awalnya, belum ada satu pihakpun yang secara khusus mengidentifikasi, mengelola, dan untuk kemudian menyiapkan penyerahterimaannya kepada pengguna akhir. Untuk itulah BRR membentuk Direktorat Manajemen Aset pada 10 November 2006 berdasarkan Peraturan Kabapel Nomor 30/PER/BP-BRR/XI/2006 (tentang SOTK BRR).

Diakui, BRR awalnya memang belum memiliki tolok-ukur *(benchmark)* maupun praktik yang baik *(best practise)* dalam hal pengelolaan aset sebanyak dan sekompleks itu. Terbentuknya direktorat terkait, oleh karenanya, telah menjadi inovasi sekaligus pembelajaran yang amat berharga dalam konteks Pemulihan pascabencana nasional maupun internasional.

Menurut UU Nomor 1/2004 (tentang Perbendaharaan Negara), oleh karena setiap pimpinan K/L adalah juga merupakan Pengguna Anggaran/Barang, maka masing-masing harus mempertanggungjawabkan capaian pekerjaanya dalam kaidah akuntansi dan pelaporan. Demi memenuhi standar kualitas pelaporan yang baik, diperlukan pengungkapan aset yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sebuah proses pengelolaan aset yang memadai. Pengelolaan aset oleh BRR dilakukan berlandaskan Perpu Nomor 2/2005 (tentang Pembentukan BRR), PP Nomor 6/2006 (tentang Pengelolaan BMN/D), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2008 (tentang Tata-cara Pelaksanaan Pengelolaan BMN pada BRR).

Pemeliharaan, penting. Ruas jalan di Kampung Jawa, Banda Aceh (gambar diambil pada 28 Maret 2008) ini di sana-sini telah rusak. Padahal, prasarana tersebut setiap hari dimanfaatkan, terutama dari dan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir sampah. Peran masayarakat, Pemda, dan K/L terkait, dalam aspek pemeliharaan, menjadi penting. Foto: BRR/Usman

Direktorat Manajemen Aset oleh Kabapel BRR, pada 29 April 2008, kemudian diubah namanya menjadi Pusat Akuntansi dan Manajemen Aset (di bawah Deputi Bidang Kedeputian dan Perencanaan) berdasarkan Peraturan Kabapel 13/PER/BP-BRR/IV/2008. Seusai meletakkan dasar identifikasi aset *on-budget,* Pusat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR mulai merambah aset *off-budget*. Informasi terkait aset *off-budget* dikelola oleh Pusdatin BRR melalui media RANdatabase yang menampung komitmen Donor/NGO dalam bentuk PCN dan pemutakhiran progres yang dapat diakses langsung oleh para Donor/NGO. Untuk memenuhi azas akuntabilitas dan validitas informasi, maka diperlukan sebuah dokumen deklarasi dari setiap Donor/NGO atas setiap aset yang dihasilkan dari kegiatannya. Dokumen inilah yang dijadikan dasar bagi pengungkapan dan pengakuan aset *off-budget*.

Pada dasarnya aset yang dikelola BRR adalah Barang Milik Negara (BMN). Sesuai tujuan pengadaannya, BRR mengelompokkan aset menjadi Aset Program dan Aset Operasional. Aset Program adalah BMN yang diperoleh melalui DIPA BRR sebagai hasil pelaksanaan tupoksi Satker BRR. Dalam perencanannya, aset ini diperuntukkan bagi penerima manfaat, seperti K/L, Pemda, dan masyarakat. Sedangkan Aset Operasional adalah alat bantu kerja dan ditatausahakan oleh BRR selaku pengguna barang. Lantaran masih dimanfaatkan untuk pelaksanaan tupoksi BRR, maka penyerahterimaan Aset Operasional menunggu implementasi tupoksinya berakhir.

Perbedaan jenjang antara BRR sebagai badan setingkat K/L dengan Pemda sebagai penerima aset pun diantisipasi. BRR menyadari kebutuhan untuk mempertimbangkan perbedaan tingkat kemandirian antardaerah, terutama antarkabupaten/kota, misalnya terkait perihal kapasitas SDM, kesiapan organisasi

Rawat dan manfaatkan. Sejumlah aset Pemulihan diserahterimakan dari BRR kepada Pemda Nias dan Nias Selatan, 16 Mei 2008, secara simbolis oleh Kabapel BRR, Kuntor Mangkusubroto. Terkait hal ini, dua Pemda kabupaten tersebut telah berkomitmen untuk semakin memacu diri memperkuat kapasitas dalam rangka merawat dan memanfaatkannya. Foto: BRR/Bodi CH

dan prasarana pemerintahan, serta sumberdaya keuangan. Proses transisi tugas dan aset Pemulihan secara fungsional kepada Pemda terkait (Pemprov dan Pemkab/kot) mencakup aspek aset, pembiayaan, program, personel, dokumen (AP3D).

Menjawab tantangan penyelesaian tugas yang begitu kompleks, Pusat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR telah menyiapkan sedemikian rupa agar proses pengelolaan aset terselenggara lancar dan sesuai aturan. Antara lain dengan membangun Prosedur Pengoperasian Standar *(Standard Operating Procedure,* SOP) dan mengembangkan sebuah sistem informasi aset yang dikenal dengan nama Simas. Simas pada prinsipnya menyempurnakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang sudah umum berlaku bagi K/L, maupun Sistem Manajemen Barang Daerah (Simbada) di tingkat Pemda.

Dalam Simas, data tekstual dari SABMN maupun SIMBADA diperkaya dengan gambaran visual (foto) dan GIS. GIS memungkinkan semua data visual dilengkapi dengan titik koordinat lokasi. Setelah proses PHO, informasi yang valid dan komprehensif ini akan menjadi penyedia input data bagi Simas. Dengan demikian, keluaran Simas dalam bentuk Katalog Aset menjadi lebih informatif dan mampu berbicara, serta telah disesuaikan dengan konsep tata kelola aset, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Penatausahaan BMN/D, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6/2006, meliputi tiga prosedur, yakni pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dalam pembukuan, BMN/D harus dibukukan melalui proses pencatatan *(registering)*. Adapun pelaporan, harus dilakukan oleh baik pengelola, pengguna, maupun kuasa pengguna barang melalui proses akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penatausahaan BMN/D tersebut penting dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah setiap tahun. Selain itu, penting juga untuk perencanaan

Halonen ke Aceh. Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin, menemani Presiden Finlandia, Tarja Halonen, saat berkunjung dan menyaksikan langsung hasil-hasil pembangunan-kembali Kota Banda Aceh tiga tahun pascatsunami, 19 Februari 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN/D, digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran tahunan.

Sebenarnya, inti dari pengelolaan aset terdapat pada kegiatan inventarisasi yang bertujuan memperoleh gambaran nyata tentang kondisi dan pemanfaatan aset. Hasil inventarisasi akhirnya menghasilkan sekitar sepuluh item identifikasi aset, antara lain: belum sempurna, rusak (ringan/berat), terbengkalai, atau belum dimanfaatkan.

Sebuah BMN/D dianggap "layak" sebagai aset jika ia memenuhi sejumlah kriteria informasi. Kriteria tersebut adalah keberadaan dan kelengkapan barang, nilai dan asal perolehannya, serta tujuan pengadaannya. Kriteria itu juga harus mempertimbangkan asas substansif *(substantive)*, kepatuhan pada ketentuan *(compliance)*, dan mutu *(quality)*.

Guna menuntaskan aset yang belum sempurna, BRR telah menyiapkan langkah operasionalnya. Pusat Akuntansi dan Manajemen Aset BRR di setiap rapim, bersama Wakil Deputi Operasi Bidang Pengendalian Pembangunan, mendorong Deputi Sektoral BRR agar menuntaskan hasil-hasil pembangunan *on-budget* yang masih bermasalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada kandidat penerima manfaat bahwa aset yang diserahterimakan dalam kondisi baik/sempurna dan fungsional.

Syukurlah kesadaran dan kerjasama dari mitra kerja, baik dari unsur Pemda maupun Donor/NGO, cukup tinggi. Sejumlah Pemda kini bahkan telah mempersiapkan pembentukan tim koordinasi serahterima, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sebagai informasi, penatakelolaan aset berada di bawah kewenangan Kanwil-I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai perpanjangan tangan Menteri Keuangan (Menkeu). Hal ini

Australia di Ulee Lheue. Salah satu dukungan langsung Pemerintah Australia bagi Pemulihan Aceh adalah pembangunan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Gambar diambil pada 2 November 2008. Pelabuhan yang kini telah bisa dimanfaatkan itu terutama melayani penyeberangan dari dan ke Sabang. Foto: BRR/Arif Ariadi

memungkinkan serah-terima aset tak perlu ke Jakarta, tapi cukup melalui Kanwil DJKN di Banda Aceh.

Tim tingkat provinsi Aceh, dalam hal ini Pemda Aceh, Kanwil DJKN dan BRR, telah berkomitmen untuk bekerja hingga selesainya serah-terima aset. Mereka telah dan tengah melakukan tinjauan terhadap hasil inventarisasi. Tim kabupaten yang terdiri dari Pemdakab bersama kantor perwakilan BRR terlibat dalam setiap inventarisasi aset di lapangan. Demikian pula NGO, mereka semakin responsif. Secara transparan, banyak yang telah menyerahkan dokumen deklarasi aset sebagai bukti kepemilikan dan pengakuan aset.

Hasil program/proyek yang telah sempurna *(well finished)* dan dikemas dengan baik inilah yang disebut aset. Pada akhir masa tugas, BRR akan mendeklarasi semua aktor Pemulihan bersama program/proyek yang telah diwujudkannya. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas BRR terhadap kepercayaan yang telah diamanahkan padanya, baik oleh masyarakat Indonesia, internasional, para penyintas di Aceh-Nias, maupun Pemda.

Dibandingkan Aceh, peralihan aset di Kepulauan Nias cenderung lebih maju. Regionalisasi dan pendirian Sekber sangat berperan dalam memuluskan proses tersebut. Melalui fungsionaris Sekber dan sejumlah fasilitator lokal di lapangan, masyarakat merasa terlibat sejak tahap perencanaan pembangunan aset hingga penyerahterimaannya. Pada saat serah-terima asetpun, Sekber berdiri di depan sebagai pemangku koordinasi.

Sekber di Nias berperan dalam koordinasi dengan manajer aset di BRR (Kantor BRR Perwakilan Nias dan Kantor BRR Distrik Nias) yang menyangkut daftar aset *on-* maupun *off-budget* yang akan diserahterimakan kepada Pemkab. Kandidat lain dari penerima dan

pengelola aset yang perlu dikoordinasikannya adalah Tim Pelaksana Persiapan Pengalihan Tugas BRR Distrik Nias bentukan Pemkab dan SKPD setempat. Dalam rangka menyiapkan rencana kelembagaan untuk pengelolaan aset pascatugas BRR, Sekber juga bekerja sama dengan BRR (Kantor BRR Perwakilan Nias dan Kantor BRR Distrik Nias) serta instansi terkait lain.

Pada Pebruari 2008, Kantor BRR Perwakilan Nias memfasilitasi pengalihan aset rekonstruksi berdana *on-* dan *off-budget* senilai lebih dari Rp416 milyar kepada K/L dan Pemda terkait. Untuk pihak yang sama, per Mei 2008, Kantor BRR Perwakilan Nias kembali mengalihkan 312 unit aset rekonstruksi berdana *on-* dan *off-budget* senilai lebih dari Rp500 milyar. Progres serah-terima aset Pemulihan di Nias per Mei 2008 dapat dilihat dalam Bagan 10.

Bagan 9:

Progres serah-terima aset Pemulihan di Nias (per Mei 2008)

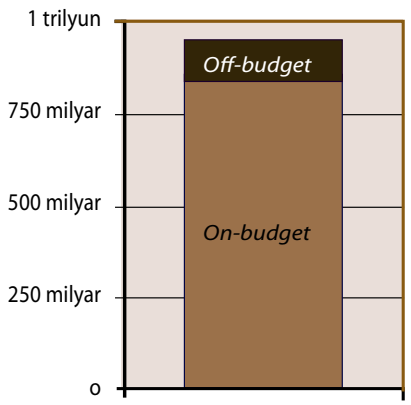

Secara umum, saat ini, total nilai aset hasil Pemulihan se-Aceh-Nias telah mencapai Rp14,49 trilyun atau 73 persen dari total realisasi anggaran sampai dengan semester pertama 2008, mencakup Rp4,56 trilyun aset masyarakat (rumah) dan Rp9,94 trilyun aset publik (gedung, jalan, peralatan mesin, dan lain-lain). Dari total aset publik ini, Rp5,73 trilyun merupakan aset tetap definitif. Dari aset yang definitif ini, Rp4,61 trilyun telah diinventarisasi. Dan dari yang telah diinventarisasi, Rp1,57 trilyun sudah diserahterimakan secara formal. Selebihnya, diserahterimakan operasinya dan telah dimanfaatkan oleh penerimanya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seiring dengan semakin tersinkronisasinya sistem dan kapasitas SDM pengelola aset yang ada, angka-angka ini tentu akan melonjak.

Kotak 25:

Menyelamatkan Arsip Pemulihan

Sebagai bentuk tanggung jawab pengembangan tugasnya, BRR membuat kesepakatan dengan Pemerintah Aceh untuk mendayakan dan menyelamatkan arsip kegiatan yang telah dilakukan selama masa Pemulihan. Pembenahan arsip ini dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) .

Oleh ANRI, seluruh dokumen yang pernah dibuat atau dikeluarkan oleh semua lembaga yang bekerja dalam proses Pemulihan, baik di Aceh maupun Nias, dikumpulkan. ANRI juga melakukan pembinaan kearsipan, penyelamatan, serta pelestarian arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan kebangsaan dan kenegaraan.

Arsip-arsip tersebut kelak akan disimpan di gedung Aceh Tsunami Archive Center (ATAC), Banda Aceh, yang akan dibangun di kompleks Badan Arsip NAD. Arsip kegiatan Pemulihan oleh BRR akan dijadikan sebagai memori kolektif bangsa dan pusat pembelajaran penanganan tsunami bagi masyarakat luas.

Binaka, siang. Tampak depan Bandara Binaka, Kabupaten Nias, 16 Mei 2008 siang. Untuk melayani kebutuhan transportasi Kepulauan Nias, selain Binaka, dibangun pula Bandara Lasondre di Kabupaten Nias Selatan. Foto: BRR/Bodi CH

Sebagai tambahan, arsip-arsip selama Pemulihan Aceh-Nias berlangsung, saat ini sedang dikelola oleh ANRI. Penyelamatan arsip-arsip merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BRR terhadap Mitra serta masyarakat nasional dan internasional yang telah membantu dalam proses pembangunan-kembali Aceh-Nias.

Penyiapan Payung Hukum

Menjelang semakin dekatnya penghujung fase Pemulihan, semakin banyak dampak dan dinamika yang telah dicermati dan ditindaklanjuti. Hal ini terutama mengingat peralihan dari tahap Pemulihan ke pembangunan semesta perlu diperkuat payung hukum yang kokoh agar meminimalisasi kekontraproduktifan multitafsir di kemudian hari. Bagi pihak penyinambung, landasan ini tentu krusial sebagai bekal yang memantapkan arah, sinkronisasi, kebutuhan nyata di lapangan, dan terutama, kewenangannya kelak.

Perpres Nomor 30/2005 tentang Rencana Induk telah menentukan kebijakan-kebijakan dasar yang berperan penting dalam menentukan arah pelaksanaan kegiatan Pemulihan. Namun perlu dipahami, proses penyusunan cetak-biru itu diselesaikan dalam durasi yang amat singkat di tengah derasnya tuntutan kehadiran suatu badan yang segera beroperasi mengelola seluruh kegiatan Pemulihan. Wajarlah jika kemampuannya dalam menyerap aspirasi pelbagai pihak cukup terbatas.

Dari waktu ke waktu, dinamika dan realita di lapangan juga berkembang. Asesmen mutakhir kerusakan wilayah landaan bencana dan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat mendesak maupun strategis, adalah salah satu contohnya. Pada kondisi tertentu, terdapat pula perbedaan penafsiran terhadap apa yang telah dituangkan pada Rencana Induk, sehingga

Merapatkan koordinasi. Institusi tripartit BRR (Bapel, Wanrah, Wanwas) menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam NAD-Nias di Bappenas, 26 Mei 2008. Forum semacam ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses Pemulihan Aceh-Nias berjalan secara amanah. Foto: BRR/Bodi CH

menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan dari Rencana Induk dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Lebih jauh, hal ini menimbulkan perbedaan persepsi di tingkat Pemerintah Pusat atau K/L, terutama terkait tugas yang diembannya selaku penyinambung Pemulihan di Aceh-Nias.

Rencana Induk memang telah mengatur pembagian peran antarpelaksana sektoral. Namun permasalahan muncul ketika keterpaduan program dan kegiatan sektoral belum sepenuhnya tercakupi. Akibatnya, efektifitas dan efisiensi menjadi rendah. Keterpaduan antarsektor yang belum memadai pada Rencana Induk, dan ditambah dengan belum mantapnya komitmen seluruh aktor Pemulihan, mengakibatkan lemahnya koordinasi.

Pembagian peran—BRR di satu sisi, K/L dan Pemda di sisi lain—yang belum tertuang secara tegas dalam Rencana Induk, tak sedikit menimbulkan kendala dalam koordinasi alih-alih peluang duplikasi proyek.

Atas pertimbangan dinamika lingkungan strategis yang ada dan evaluasi yang cermat, maka dinilai mendesak untuk melakukan pengubahsesuaian pada strategi, skala prioritas, sasaran, dan terutama menguatkan payung hukum pelaksanaannya. Pengubahsesuaian yang dimaksud bukan berarti hanya sinkronisasi, tapi juga mengurangi dan menambah, sejauh dinilai perlu dan memiliki daya dorong bagi efektifitas dan efisiensinya.

Upaya pengubahsesuaian Rencana Induk dipandang urgen untuk memastikan bahwa Pemulihan Aceh-Nias saat ini berada pada jalurnya yang tepat dan seluruh kegiatan difokuskan pada mandat yang telah digariskan. Lebih jauh, upaya tersebut penting untuk memperkokoh proses transisi dan penyinambungannya ke fase pembangunan semesta.

Tiga organ BRR (Wanrah, Bapel, dan Wanwas) telah mengadakan rapat tripartit pada Mei 2008 dalam rangka penerbitan payung hukum perubahan

Menyoal aset. Momentum rehat di tengah semiloka "Menyongsong Berakhirnya Masa Tugas BRR NAD-Nias" yang diadakan oleh BRR dan DPR-RI di Jakarta, 27 Agustus 2008. Acara ini membahas, antara lain keberlangsungan aset-aset yang telah dibangun dan diserahterimakan kepada Pemda Aceh dan Nias. Foto: BRR/Arif Ariadi

Rencana Induk dan penyinambungan pasca-BRR. Bappenas pun tengah menggodog dua rancangan Perpres, yakni tentang Tata-cara PMT BRR dan tentang Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sebagai payung hukum bagi PMT. Dalam waktu yang tidak terlampau lama, kedua rancangan tersebut telah siap ditetapkan sebagai Perpres.

Pembagian peran para pemangku kepentingan nasional non-BRR (K/L dan Pemda terkait) pun telah dipastikan. Perpres Nomor 38/2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009, Lampiran II. 33 telah memperkuat bahwa sejumlah proyek/kegiatan terkait Pemulihan Aceh-Nias yang akan dijalankan oleh enam K/L dan dua Pemda *(baca pula kotak "Giliran K/L dan Pemda")*. Pembagian peran masing-masing adalah:

1. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengelola prasarana jalan dan drainase;
2. Departemen Perhubungan akan menangani prasarana pelabuhan laut dan terminal;
3. Departemen Dalam Negeri akan membawahi program pengembangan wilayah tertinggal;
4. Departemen Agama akan membidangi program pendidikan tinggi;
5. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal akan mengerjakan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias;
6. Badan Pertanahan Nasional akan menangani program pengelolaan pertanahan;
7. Pemda Aceh (Pemprov beserta Pemkab/kot-nya) serta Pemda Kepulauan Nias (Pemkab Nias dan Nias Selatan) akan melaksanakan program peningkatan kehidupan masyarakat dan pembangunan wilayah Aceh dan Nias pascabencana.

Dengan demikian, status kepastian perihal payung hukum pembangunan-kembali beserta tupoksi para pemangku kepentingannnya saat ini relatif sudah

Prasarana penghubung. Jalan pemukiman seperti di Gampong Lam Gugop, Banda Aceh, 16 Maret 2008, yang lengkap dengan saluran drainasenya ini, pada dasarnya merupakan prasarana penghubung (feeder) bagi berputarnya aktivitas sosial-kemasyarakatan. Foto: BRR/Usman

beres. Tak ada lagi yang perlu disangsikan. Capaian pekerjaan Pemulihan Aceh-Nias tidak akan tutup-buku ketika BRR undur-tugas, melainkan akan terus berlanjut. Pihak Donor/NGO sendiri bahkan tak sedikit yang telah mengomitmenkan diri untuk tetap menuntaskan tanggung-jawab pekerjaannya hingga 2012.

Sektor Privat

Salah satu tantangan utama pembangunan-kembali adalah membenahi kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik mensyaratkan adanya pendapatan yang memadai. Namun, itu saja belum cukup.

Pendapatan yang memadai ternyata hanya merupakan salah satu dari sekian prasyarat yang harus diperjuangkan. Prasyarat lain yang tak kalah pentingnya adalah, pemberantasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan, serta stabilitas perdamaian dan keamanan.

Di Aceh dan Nias, setelah tiga tahun lebih Pemulihan dilalui, semakin banyak investasi yang terkucur dan dirupakan, khususnya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun untuk itu, diperlukan penopang berfondasi kuat. Fondasi itu berupa sendi-sendi mata pencaharian masyarakat dan stabilitas keamanan yang memadai.

Mata Pencaharian

Ditambah dampak konflik sejak 1976, kehilangan mata pencaharian sebagian besar masyarakat penyintas tsunami menjadi semakin tidak mudah dipulihkan secara cepat. Ironisnya, di Aceh, sekitar dua pertiga dari PDRB nonmigasnya justru berasal dari wilayah landaan bencana. Wajarlah jika tsunami telah

Menyamankan anak. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk anak-anak, di pemukiman baru disediakan taman bermain anak seperti di Kawasan Labuy Baru, Aceh Besar ini. Gambar diambil pada 11 Juni 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

mendongkrak persentase keluarga miskin menjadi sekitar 15 persen, serta menambah ratusan ribu penganggur. Seiring dengan surutnya fase tanggap darurat, pemulihan mata pencaharian menjadi tantangan langsung yang terpenting.

Sarana-prasarana ekonomi, seperti tempat usaha, alat produksi, dan lahan, rusak atau hilang. Dari total kerugian fisik senilai Rp40-an trilyun, 78 persennya adalah milik masyarakat yang sebagian besar terkait sektor perikanan, pertanian dan perkebunan, serta peternakan. Padahal, di luar migas, ekonomi rakyat amat bergantung pada sektor yang ketika pratsunami pun produktivitasnya sudah rendah itu. Perikanan, adalah yang paling terpukul. Sekitar 43 persen dari nilai kerusakan sektor produktif, dipikulnya.

Lenyapnya lapangan kerja sekitar 11,2 persen, ekuivalen dengan 220.000-an orang penganggur. Dan jika angka pada pratsunami dipertimbangkan, maka total persentase angka pengangguran di Aceh menjadi sekitar 48 persen. Proyek Pemulihan masyarakat Aceh, dan juga Nias, oleh karenanya, bukan semata-mata untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat ke keadaan seperti pratsunami. Alih-alih, proyek tersebut secara simultan juga membantu dalam memecahkan persoalan fundamental yang ada.

Perikanan

Pada sektor perikanan, Pemulihan aset-aset produktif telah mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan bagi ribuan masyarakat (terutama warga pesisir), dan berkontribusi terhadap PDRB. Terutama perikanan laut, Aceh, sebagai salah satu produsen penting di Indonesia, memiliki potensi besar untuk mengisi peluang pasar.

Akhir-akhir ini terjadi penurunan yang bahkan lebih cepat ketimbang kecenderungan penurunan hasil produksi nasional. Ada dugaan kuat hal itu terkait maraknya praktik penjualan ikan di tengah laut, sehingga tak tercatat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat. Faktor-faktor seperti *over-fishing* dan kondisi alam yang kurang mendukung selama kurun tertentu, juga tak bisa dikesampingkan. Kurang memadainya prasarana-sarana perikanan beserta SDM yang ada, tak luput sebagai salah satu faktornya.

Pemulihan perikanan laut selama tiga tahun terakhir telah menempatkan kondisi-kondisi di atas sebagai bahan pertimbangan penting bagi diberikannya dukungan. Pada Mei 2008, tiga unit TPI di Bireuen telah diserahterimakan. Sejumlah *boat* dan kapal besar berbobot 30 gross-ton (GT) senilai sekitar Rp1 milyar telah juga dialihkelolakan kepada para nelayan Lhokseumawe.

Adapun untuk perikanan tangkap yang sebagian besar didominasi kaum nelayan kecil, kapal atau perahu mereka yang raib/rusak, telah diganti. Meski demikian, telah pula disadari bahwa, kapal motor yang disiapkan BRR dan Mitra memang telah melebihi angka kebutuhan 4.121 unit (per Juni 2008 tercatat sudah 6.300-an unit), namun tak sedikit nelayan yang masih belum terjangkaui. Selain karena terdapat penerima manfaat yang kurang tepat sasaran dan harga BBM yang melonjak, kurangnya modal produksi juga menjadi kendala utama. Tak sedikit pula kapal

Eungkot Keumamah. Deretan keranjang penuh *eungkot keumamah* (ikan tongkol) ukuran sedang dari nelayan yang baru saja mendarat dipasarkan di Pasar Ikan Lampulo, Banda Aceh, 2 November 2008. Potensi kan jenis pelagis besar ini sangat melimpah di Laut Aceh. Foto: BRR/Arif Ariadi

yang 'kandas sebelum dilayarkan' karena buruknya kualitas atau kurang cocok dengan karakter medan Samudera Hindia.

Pelabuhan perikanan, dermaga, pelabuhan, dan prasarana perikanan lainnya yang rusak, telah banyak yang dibenahi. Kerusakan muara sungai sebagai tempat keluar-masuknya kapal, telah ditangani dengan mengeruk pendangkalan, menata tanggul-tanggul sempadan sungai, serta menyiapkan titik-titik berlabuhnya kapal. Sebanyak 30-an unit pangkalan pendaratan ikan, 70-an dermaga kapal, 200-an sentra pengolahan ikan, kini telah direhab atau direkonstruksi.

Kemampuan aparatur Pemda dan kelembagaan tradisional nelayan penting artinya bagi kesinambungan pengelolaan dan pengembangan. Banyak kritik dilayangkan bahwa dalam membangun sektor terkait, Pemda kurang berkoordinasi dengan kelembagaan tradisional atau masyarakat setempat alih-alih belum terjadi. Kritik pun segera surut setelah diketahui bahwa bahkan sejak 1960-an, koordinasi yang harmonis telah berlangsung, bahkan ada yang akhirnya mengukir prestasi *(baca kotak "Keterlibatan* Panglima La'ot Lhok").

Menyangkut besarnya potensi perikanan, bila potensi ekspor masih juga belum efektif, pasar domestik masih terbuka lebar. Apalagi kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan kian meningkat. Menurut Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organisation, FAO), pada 2030, konsumsi ikan di dunia diprediksi meningkat pesat. Dibandingkan sekarang, saat itu dunia akan menghadapi "kesenjangan ikan" *(fish gap)*. Apabila dikaitkan dengan upaya mempertahankan konsumsi ikan per kapita, maka konsumsi ikan pada 2030 diperkirakan mengalami kesenjangan sekitar 85 juta ton/tahun. Untuk menutupnya, budidaya ikan menjadi pilihan utama.

Lampulo ramai kembali. Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, 10 Januari 2008, telah normal dan ramai kembali sebagai tempat berlabuhnya kapal nelayan. Sebanyak 70-an dermaga kapal dan 200-an sentra pengolahan ikan se-Aceh-Nias, kini telah dapat difungsikan kembali. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 26:

Potensi Perikanan Laut Aceh

Produksi ikan di Aceh didominasi perikanan laut. Lokasi Aceh dikelilingi Selat Malaka, Samudera Hindia, dan Selat Benggala. Panjang garis pantai Aceh mencapai 1.660 kilometer. Luas wilayah perairan lautnya 295.370 km^2, terdiri dari 56.563 km^2 laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) serta 238.807 km^2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kabupaten Bireuen menempati peringkat pertama (sekitar 16 persen) se-Aceh sebagai penghasil ikan; disusul oleh Aceh Selatan, Pidie, dan Aceh Utara dengan masing-masing sekitar 11 persen.

Lebih dari 45 jenis ikan laut ditangkap dalam jumlah besar. Enam besarnya, berturut-turut adalah tongkol *(euthynnus sp.)*, cakalang *(katasuwonus pelamis)*, teri *(stolephorus sp.)*, biji nangka *(parapeneus indicus)*, selar *(allepes djeddaba)*, dan kembung *(rastrelliger sp.)*. Total potensinya diprediksi 173.000 ton/tahun. Dalam rangka peluang ekspor Aceh, potensi perikanan laut menjadi isu penting. Ikan dari Aceh banyak yang diekspor ke luar wilayah bahkan ke negara lain, seperti Jepang, Malaysia, dan Singapura.

Senyum pedagang. Seorang pedagang ikan akan membawa ikan yang dibelinya dari Tempat Pelelangan Ikan Lampulo, 2 November 2008. Sebanyak 30-an unit pangkalan pendaratan ikan kini telah direhabilitasi atau direkonstruksi. Foto: BRR/Arif Ariadi

Dibandingkan negara sekitar seperti Thailand, peluang investasi perikanan tangkap Aceh jauh lebih potensial untuk dikembangkan. Potensi di kawasan Samudera Hindia dan ZEE mencapai sekitar 366.260 ton/tahun, tapi yang baru dimanfaatkan belum ada separuhnya. Besaran pemanfaatan tersebut tak jauh berbeda dengan tangkapan di Selat Malaka yang memiliki potensi sekitar 27.670 ton/tahun.

Kurang optimalnya pemanfaatan serta kurang kompetitifnya nelayan lokal, ditengarai kuat sebagai pemicu pemanfaatan dan pencurian ikan oleh nelayan negara lain yang berteknologi lebih modern. Oleh karenanya, modernisasi armada tangkap yang diikuti dengan reorganisasi kelompok-kelompok nelayan, adalah solusinya.

Banyak kawasan-kawasan pantai Aceh dan Nias yang cocok untuk pertumbuhan budidaya air laut dan payau. Di sana telah dikembangkan untuk budidaya udang, ikan laut, dan rumput laut. Kawasan-kawasan pedalaman pun, tak kalah potensialnya untuk budidaya ikan air tawar. Keluaran penting dalam sektor budidaya ikan tampak dalam rehabilitasi 53 unit pembenihan skala rumah tangga, 17.000-an hektar tambak, serta 190-an bagan apung dan 80-an keramba jaring apung.

Ditambah dengan semakin pesatnya penanaman investasi yang membangkitkan animo berusaha bagi para petani budidaya, akses mereka ke pangsa pasar yang lebih luas dan beragam, semakin tertingkatkan. Dampaknya, bukan saja mata pencaharian masyarakat—terutama pedesaan—saja yang terdukung, pertumbuhan perekonomian Aceh-Nias pun turut terdongkrak.

Bibit kerapu super. Beberapa warga Seuneudon, Lhokseumawe, sedang memilih bibit ikan kerapu jenis super yang akan dipijahkan, 26 Oktober 2008. Bibit ikan jenis ini laris manis di pasaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor di Medan, Sumatera Utara. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 27:

KETERLIBATAN *PANGLIMA LA'OT LHOK*

Eksistensi *Panglima La'ot Lhok* (lembaga tradisional nelayan) dipandang sebagai unsur penting bagi pengembangan perikanan laut di Aceh. Oleh karena itu ia hampir selalu terlibat dan berkoordinasi dengan Pemda. Eksistensinya semakin diakui terutama setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO (CCRF) 1995 diratifikasi.

Pada 1963-64, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) NAD pernah menyusun program modifikasi "Pukat Banting Aceh" *(pukat payang)* yang saat itu terbuat dari rajutan benang dan nilon. Tak banyak *Panglima La'ot Lhok* atau nelayan yang tahu persis alih-alih ahli tentang struktur/konstruksi pukat *payang*. Pawang Sapek (almarhum), *Panglima La'ot Lhok* Lam Teungoh (Peukan Bada, Aceh Besar), adalah salah satunya. Oleh karena itu, fungsionaris DKP NAD hampir setiap hari berkoordinasi dengan Pawang Sapek untuk mendesain-ulang pukat payang di rumahnya.

Pada 1964, ketika membangun TPI Idi Rayeuk, DKP NAD berkoordinasi dengan *Panglima La'ot Lhok* Idi Rayeuk pimpinan Abu La'ot Usman Gam Ubit (almarhum). Hal serupa, bahkan dengan melibatkan *Panglima La'ot Lhok* se-Aceh Selatan, dilakukan ketika membangun PPI Lhok Bangkuan, Aceh Selatan.

Siap panen. Sebentang areal persawahan di Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias, 26 Oktober 2008, tampak sudah siap panen. Komoditas padi sawah atau padi ladang menjadi subsektor utama pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja. Foto: BRR/Bodi CH

Dalam rangka menyosialisasikan modernisasi/ motorisasi perikanan, DKP NAD merangkul *Panglima La'ot Lhok* Idi Rayeuk untuk melakukan kunjungan muhibah *boat-boat,* mulai dari Idi, Lhokseumawe, hingga Banda Aceh.

Pada 1968, DKP NAD kembali melibatkan *Panglima La'ot Lhok* ketika merealisasikan program *purse seine* (pukat langgar). Dengan menggunakan *boat* "Camar Laut", Kepala DKP Aceh melakukan uji-coba pukat yang dikhususkan untuk menangkap jenis ikan pelagis besar (tuna, tongkol, cakalang) itu. Program tersebut akhirnya menjadi proyek percontohan dan model pertama di Indonesia yang ternyata berkembang pesat hingga hari ini.

(Disadur dari T. Abdullah Ben Pekan. "Memajukan Perikanan Aceh" dalam *Serambi Online,* 16 Juli 2007)

Pertanian dan Perkebunan

Apabila terdapat permintaan akhir pada masing-masing sektor mata pencaharian, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, atau ekspor, maka pertanian lah sektor yang memiliki peluang kerja tertinggi, yakni sekitar 58 persen. Artinya, peningkatan pada sektor pertanian, adalah yang terbanyak membuka peluang kerja. Efeknya, pengangguran semakin terkurangi dan kesejahteraan masyarakat tertingkatkan.

Presiden SBY pun menekankan perlunya revitalisasi pertanian. Alasannya, selain bersifat padat karya, sektor ini memiliki *Capital-Output-Ratio* (COR) rendah, sehingga penanaman modal yang relatif sedikit saja, sanggup membuka kesempatan kerja yang cukup besar. Lebih-lebih dengan semakin banyaknya PSD seperti irigasi, jalan desa, atau listrik, yang dibenahi Pemda setempat, kondisi yang memadai bagi tumbuhnya produktivitas di sektor tersebut, semakin tersiapkan.

Bibit baru kakao. Seorang petani di Bireuen, 25 Oktober 2007, merawat tanaman kakao yang bibitnya diterima langsung dari BRR. Proporsi sektor pertanian Aceh terhadap nasional cenderung stagnan, hanya subsektor perkebunan yang mengalami pertumbuhan tinggi. Foto:BRR/Arif Ariadi

Baik di Aceh maupun Nias, pertanian menjadi sektor tumpuan hidup bagi banyak keluarga, karena secara umum, perekonomian kedua daerah itu berstruktur agraris. Di Aceh, dominasi sektor pertanian rata-rata mencapai 43 persen. Sekitar 50 persennya dihasilkan oleh lima daerah, yakni Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireueun, dan Aceh Besar. Sektor ini juga berkontribusi banyak dalam memperkokoh relasi antara sektor industri, konsumsi, dan investasi.

Penguatan pada komoditas tanaman pangan, seperti padi dan palawija, yang telah ditempuh saat ini merupakan langkah stratejik, baik secara politis atau sosial. Jika sewaktu-waktu gejolak perubahan produksi pada komoditas bersangkutan terjadi, maka stabilitas sosial-politik pun turut terusik. Sebaliknya, dengan semakin terantisipasinya pengamanan terhadap jumlah produksi pangan, maka sumberdaya yang dialokasikan, akan lebih efektif dan berefek akseleratif.

Belajar dari pengalaman, secara sederhana telah dirumuskan skema fokus komoditas pertanian. Jika fokusnya ditekankan pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani, maka komoditas yang dipacu adalah ubi kayu dan ubi jalar. Apabila fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan domestik, seperti gejolak harga dan sebagainya, maka komoditas kedelai, padi sawah, atau padi ladang lah yang dipacu. Jika ingin berfokus pada perdagangan, maka komoditas ubi jalar dan kedelai yang ditekankan. Adapun jika serapan tenaga kerja yang dikejar, maka fokus harus digeser ke pengembangan padi sawah.

Terkait penggunaan lahan tanaman pangan, muncul sejumlah keprihatinan sebagai konsekuensi negatif pembangunan. Alih-fungsi lahan pertanian secara tak terkendali, terutama tanaman pangan dan holtikultura, berdampak mengurangi luasan lahan pertanian dan menurunkan produksi usaha tani. Penggunaan lahan yang kurang mengindahkan

Tanaman yang tepat di tanah yang tepat. Komoditas kelapa sawit memiliki catatan produksi yang baik di Aceh, karena didukung oleh kondisi alam dan lahan yang memadai, seperti di kawasan perkebunan kelapa sawit Blang Pidie, 7 Maret 2008, ini.

daya dukung wilayah, telah memicu turunnya mutu lingkungan. Munculnya benturan kepentingan di pelbagai sektor pembangunan, telah menimbulkan tumpang-tindih peruntukan lahan. Dampak-dampak tersebut, baik oleh Pemda maupun BRR, telah disiapkan solusinya secara seksama.

Rendahnya produktivitas dan kualitas petani, terbatasnya akses petani terhadap kredit, serta rendahnya mutu prasarana pertanian di pedesaan, telah dicermati sebagai pemicu kesenjangan pembangunan antardaerah. Di kawasan-kawawan antara (pinggiran atau perbatasan), kesenjangan jauh lebih kental. Di kawasan tersebut, dapat dirasakan bahwa investasi ekonomi cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sementara di kawasan pedesaan, relatif tertinggal.

Guna menutup kesenjangan tersebut, sektor pertanian menawarkan terobosan yang cukup bisa diandalkan potensinya. Membuka kesempatan bagi para petani, baik perempuan maupun laki-laki, untuk bersentuhan langsung dengan informasi dan orang luar, secara serempak merupakan pengurangan ketertinggalan dan kemiskinan. Ke depan, sejalan dengan semakin meluasnya desakan akan pentingnya hak domestik dan publik perempuan, upaya tersebut telah menyediakan diri bagi lahirnya prakarsa-prakarsa yang lebih menjanjikan dan berkesinambungan.

Dampak-ikutan positif terlihat dengan semakin terciptanya lapangan kerja, terkuranginya kemiskinan, serta terdukungnya peningkatan sumber pendapatan, devisa (terkait letak Aceh di tiga gugus negara yang dapat melakukan perdagangan regional), maupun PDRB. Dibandingkan Aceh, kontribusi pertanian terhadap PDRB Nias, karena tidak memiliki deposit migas, lebih tinggi lagi.

Proporsi sektor pertanian Aceh terhadap nasional cenderung stagnan, hanya subsektor perkebunan yang mengalami pertumbuhan tinggi. Mengingat,

Aceh, identitas kopi. Kedai Kopi "Chek Yuke", termasuk kedai terpopuler di Banda Aceh (gambar diambil pada 25 Oktober 2008). Saat ini, diseminasi dan pertumbuhan kedai kopi di Aceh banyak didukung oleh citra yang dibangun tentang identitas Aceh pada masakini. Foto: BRR/Arif Ariadi

pada umumnya, komoditas yang menjadi lahan investasi adalah perkebunan yang bernilai tinggi. Sektor-sektor agribisnis seperti komoditas pangan, relatif kurang dilirik karena nilai tukar atau potensi bisnisnya lebih rendah—meski setelah masa otda, muncul sejumlah daerah yang mengedepankan komoditas agribisnis tanaman pangan.

Kenyataan bahwa sebagian besar tanaman perkebunan di Aceh dan Nias ditanam oleh rakyat, telah membuktikan potensi kontribusinya bagi mata pencaharian keluarga maupun PDRB. Artinya, perkebunan berperan penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Terutama pada pascagempa dan tsunami, sebaran pertumbuhan itu terlihat merata di hampir semua komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, karet, cengkeh, coklat, kelapa, nilam, pala, dan pinang, memiliki catatan produksi yang baik di Aceh. Hal ini didukung oleh kondisi alam dan lahan yang memadai. Mengenai kesiapan masyarakat terkait usaha pengembangan tanaman perkebunan, tak perlu diragukan, karena sejarah perdagangan sejumlah komoditasnya telah berakar kuat. Kopi, adalah salah satunya.

Marak diberitakan bahwa kopi Aceh, kini telah menjadi komoditas yang mendunia. Sistem produksi ke hilirnya memiliki integrasi yang baik dan kompetitif di pangsa internasional. Tren investasi dunia pun kebetulan mendukung karena kecenderungan komoditas perkebunannya ke arah yang berprospek nilai ekonomi tinggi.

Terhadap pasar nasional sendiri, kontribusi produksi kopi Aceh sepanjang 2000-05 rata-rata 13,5 persen. Meski fluktuatif, akhir-akhir ini produksinya meningkat. Padahal daerah-daerah lain di Indonesia produksi kopinya menurun, bahkan pada tingkat yang lebih rendah ketimbang Aceh. Daerah pemasok kopi utama di Aceh adalah Aceh Tengah, yakni sekitar 61

Kopi Takengon. Seorang warga menjemur biji kopi di Takengon, Aceh Tengah, 25 Maret 2006. Tren peningkatan permintaan dunia yang sejalan dengan tren kenaikan harga kopi, menjadi insentif menarik bagi pengembangannya. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 28:

Prospek Kopi Aceh di Pasar Dunia

Diprediksi pada 2010, permintaan kopi dunia akan mencapai 6.947 ton, atau cenderung meningkat bila dibandingkan konsumsi pada saat ini. Proporsi permintaan terbesar datang dari negara maju, yaitu sekitar 75 persen, atau 4.997 ton. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Jepang, adalah pasar terbesarnya. China, tak lama lagi segera menyusul.

Struktur pasar kopi dunia cenderung oligopolis karena hanya didominasi empat perusahaan multinasional. Keempatnya adalah Kraft General Foods (pemilik merk Maxwell House dan merk lainnya), Nestle, Proctor & Gamble (pemilik Folgers dan merk lainnya), serta Sara Lee (pemilik Chock Full O'Nuts and Hills Brothers). Struktur seperti ini cenderung menciptakan ketergantungan terhadap pemasaran kopi di dunia.

Namun demikian, kendati pasarnya belum terlampau luas, Aceh tetap berpeluang untuk menyabet pangsa karena kekhasan kopinya. Pasar yang relatif lebih terjangkau adalah China dan Rusia. Peningkatan konsumsi di China dan Rusia telah meningkatkan harga kopi dua kali lipat di masing-masing negara tersebut. Mengingat besarnya jumlah penduduk, potensi pasar kopi di kedua negara tersebut diperkirakan akan tetap besar.

persen. Ditambah Bener Meriah (sekitar 22 persen) dan Pidie (sekitar 6 persen), maka pasokan kopi dari ketiga daerah itu mencapai sekitar 89 persen dari total produksi di Aceh. Potensi lahan di Aceh yang dapat dibudidayakan untuk kopi mencapai lebih dari 280.000 hektare.

Komoditas lain yang prospeknya bersinar adalah kelapa sawit. Tren peningkatan permintaan dunia yang sejalan dengan tren kenaikan harga, menjadi insentif menarik bagi pengembangannya. Limbah sawit *(sludge)* pun potensial untuk diolah menjadi bahan baku biodiesel.

Bila produk-produk turunan semacam ini turut dikembangkan, maka pastilah potensi pasar jauh lebih luas dan beragam. Lebih-lebih bila diolah di Aceh, pasti *multiplier* ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan PDRB-nya menjadi lebih tinggi.

Di berbagai daerah, telah pula diupayakan pengembangan kelapa sawit yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan (kambing atau sapi). Selain untuk mendorong kemungkinan keterkaitannya dengan kegiatan (sub)sektor lain, inisiatif tersebut telah menjadi alternatif yang baik dalam rangka menggairahkan kembali iklim investasi.

Peternakan

Pengembangan agribisnis berbasis peternakan kini semakin marak. Keseluruhan subsistem agribisnis terbangun secara simultan dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Ini memang bukan perkara mudah, karena paradigma lama, yakni pembangunan ekonomi berbasis peternakan yang terbatas hanya pada pengembangan subsistem usaha ternak/budidaya peternakan, harus dibongkar.

Peranan sektor peternakan pada pascatsunami terus meningkat. Hal ini diindasikan oleh meningkatnya jumlah produksi dan populasi hewan ternak dari tahun ke tahun. Indikasi lainnya, pola pengelolaan usaha peternakan bergeser; dari semula bersifat sampingan, menjadi usaha utama yang dikelola secara intensif, terutama usaha ruminansia (seperti penggemukan sapi potong) dan nonruminansia (seperti pemeliharaan ayam ras pedaging dan petelur).

> “Basis area komoditas peternakan di Aceh dan Nias dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok ruminansia, mencakup sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, dan kambing. Yang kedua, mencakup ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, dan itik, atau yang biasa disebut kelompok nonruminansia (unggas).”

Sekitar 75 persen produksi peternakan Aceh dihasilkan di tujuh daerah, yakni Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Lhokseumawe. Pidie berkontribusi sekitar 26,5 persen—jauh di atas kontribusi daerah-daerah lain. Bireuen sekitar 10,5 persen. Sedangkan lainnya, rata-rata kurang dari 10 persen.

Terkait kewilayahan, peternakan merupakan salah satu sektor yang amat strategis dalam mendukung stabilitas pertumbuhannya. Hal ini mengingat sumberdaya peternakan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui *(renewable),* sehingga sisi kesinambungannya terjamin. Dalam sejumlah pengalaman, ternak telah terbukti berperan sebagai instrumen penting peningkatan pendapatan masyarakat kecil dan penutup kesenjangan pendapatan.

Kontribusinya kepada PDRB di Aceh, misalnya, mencapai lebih dari 5,5 persen, atau setara dengan kontribusi perikanan. Namun demikian, hingga saat ini Aceh masih relatif rendah tingkat kemampuan pasokan produksi ternaknya ketimbang pertumbuhan permintaan yang terus membengkak. Hal ini menyebabkan Aceh menjadi salah satu pasar hasil ternak yang terus berkembang dan sangat terbuka bagi wilayah lain.

Tak ayal, bisnis komoditas ternak selalu prospektif. Pengembangan usaha peternakan daerah akan mengurangi ketergantungan dari wilayah lain,

Sapi Tiji. Sapi-sapi ini adalah ternak siap-jual di pasar hewan Padang Tiji, Pidie, 21 Oktober 2008. Pola pengelolaan usaha peternakan, saat ini semakin bergeser; dari semula bersifat sampingan, menjadi usaha utama yang dikelola secara intensif. Foto: BRR/Arif Ariadi

terutama impor. Untuk memenuhi permintaan pasar lokal, saat ini Aceh masih mendatangkan daging, karena itu, harganya termasuk tertinggi di Indonesia. Apalagi dalam sosial-kemasyarakatan Aceh, seperti masih eksisnya tradisi *meugang,* peluang pasar daging (sapi) sangat besar, namun belum optimal dikembangkan.

Potensi lahan yang memadai, memungkinkan bagi dilakukannya massalisasi pengembangan ternak di Aceh dan Nias. Untuk Aceh, pada Mei 2008, sebuah kawasan peternakan berlahan seluas 550 hektare di Blang Ubo-Ubo (Kabupaten Pidie) dengan insentif 500 ekor sapi pada tahap pertama, diresmikan. Aceh Besar, ditetapkan sebagai sentra peternakan se-Aceh yang memiliki 2.000-an penerima manfaat. Di Cot Seuribe, Jantho (Kabupaten Aceh Besa), telah pula disiapkan sebagai kawasan peternakan sapi. Adapun untuk ternak kambing, di Panca, kini telah diinsentifkan 1.000-an ekor.

BRR juga telah menyelenggarakan pola plasma dan berbagai jenis kerjasama masyarakat seperti Bantuan Peternakan Langsung Masyarakat (BPLM). Melalui BLPM, masyarakat sendiri lah yang menjadi pengelola dananya secara bergulir di antara sesama kelompok mereka.

Satu nilai tambah dari subsektor peternakan adalah sifat elastisitasnya. Permintaan produk peternakan (seperti daging, telor, susu, dan produk olahan) elastis terhadap pendapatan masyarakat. Artinya, jika terjadi kenaikan pendapatan pada masyarakat, maka permintaan terhadap komoditas peternakan akan meningkat, bahkan kerap lebih besar ketimbang persentase kenaikan pendapatan itu sendiri. Elastisitas ini, dalam sistem agribinis, berdampak pada penciptaan kesempatan kerja dan usaha, serta peningkatan pendapatan. Kesempatan yang terbuka mencakup agribisnis hulu dan hilir, budidaya, serta kegiatan jasa terkait, seperti transportasi, perbankan, dan informasi.

Tas Samahani. Para perajin di Samahani ini, pada 30 Oktober 2008, sedang berpacu menyelesaikan ribuan unit tas bordir khas Aceh, salah satunya untuk ekspor ke Alabama, Amerika Serikat. Sentra industri kecil yang berlokasi di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, ini melibatkan sedikitnya 700 orang dari lima kecamatan di sekitarnya. Foto: BRR/Arif Ariad

Kotak 29:

Tas Ekspor *Made In* Samahani

Sentra Kerajinan Usaha Kecil Samahani berhasil mengekspor 3.500 unit tas bordir khas Aceh yang didesain dan dibuat oleh 200 pengrajin ke Alabama, Amerika Serikat. Ekspor tersebut merupakan pesanan John Jack, seorang anggota jaringan pemasar produk kerajinan tangan dari seluruh dunia. Kegiatan sentra industri kecil yang berlokasi di Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, ini melibatkan 700-an orang dari lima kecamatan di sekitarnya.

BRR mendirikan Gedung Workshop dan segala perlengkapannya sebagai bengkel kerja senilai Rp2,83 milyar melalui dana APBN. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan hasil kerjasama antara Kedeputian Bidang Ekonomi dan Usaha BRR, Pemda Aceh Besar, Dekranas Aceh Besar, pengelola, dan masyarakat penerima manfaat.

Sifat elastis dari sektor ini menyangkut pula aspek bisnis dan teknologinya. Bisnis ternak dipandang elastis karena ternak yang dipelihara dapat dijual pada umur berapapun dengan pasar yang telah tersedia. Teknologinya juga elastis karena kegiatan peternakan dapat diintegrasikan dengan kegiatan tanaman pangan atau perkebunan, seperti sistem karet-sapi *(rubber-beef system)* dan kelapa-sapi *(coco beef system)*. Terutama di bagian selatan Aceh, teknologi dan jenis ternak yang dipelihara, disesuaikan dengan kegiatan perhutanan (silvipakan atau silvipastura) serta konservasi tanah dan air.

Dengan semakin berkembang dan beragamnya sektor peternakan, berarti, pemampuan kapasitas SDM Pemda beserta pemangku sektor peternakan setempat mendapatkan momentumnya yang tepat. Hal ini telah pula disadari. Melaluinya, koordinasi antarunit-kerja secara saling terkait demi menciptakan agribisnis peternakan yang maju, lebih mudah diwujudkan.

Selain itu, Pemulihan Aceh-Nias telah menyediakan diri sebagai pendorong bagi tumbuhnya iklim berwirausaha. Kegiatan wirausaha telah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat luas, terutama warga pedesaan, sebagai pekerjaan paruh-waktu (sambilan) dari profesi utama sebagai petani, nelayan, atau pekebun. Potensinya juga dipandang sebagai isu yang strategis karena keterlibatan kaum perempuan cukup terwadahi.

Setelah program-program pemberdayaan ekonomi atau mata pencaharian berskala besar (seperti rehabilitasi tambak, ladang, dan persawahan) dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, BRR mengarahkan fokusnya pada pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan skala kecil. Wirausaha kerajinan, adalah salah satunya.

Kebutuhan Dasar

Pemulihan pada sektor publik menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan derajat kualitas pembangunan manusia. Kualitas pembangunan manusia antara lain tercermin dalam peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat dan terkuranginya angka kemiskinan.

Indikasi lain yang tak kalah penting adalah, semakin terurusnya layanan kebutuhan dasar sektor privat, antara lain pendidikan dan kesehatan. Dua sektor inilah yang senyatanya merupakan variabel utama dari Indeks Pembangunan Manusia.

Kotak 30:

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat capaian kesejahteraan penduduk atas dua bidang layanan dasar publik, yakni pendidikan dan kesehatan. Bersama-sama dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, IPM menjadi variabel penentu besaran kebutuhan fiskal *(fiscal need)* Daerah.

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar publik yang dihitung berdasarkan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional. Adapun kapasitas fiskal *(fiscal capacity)* Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal disebut celah fiskal. Bersama-sama dengan alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah, besaran celah fiskal Daerah menentukan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Lab yang menggugah. Salah satu aktivitas belajar-mengajar di laboratorium SMU Fatih Bilingual, diambil gambarnya pada 29 Oktober 2008, tampak menggugah minat para anak didik karena disajikan secara interaktif dan menarik. Foto: BRR/Arif Ariadi

Pendidikan

Terkait mutu SDM, Indonesia menempati urutan ke-112 di antara 177 negara. Tantangan dalam hal ini lebih besar lagi di Aceh dan Nias sehubungan dengan mundurnya mutu SDM pascabencana. Di Aceh, masih diperberat lagi dengan dampak konflik.

Rendahnya mutu SDM adalah kendala serius untuk berkompetisi, baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Kelemahan dalam menciptakan pendidikan yang bermutu adalah ancaman paling nyata terhadap eksistensi kemanusiaan di Aceh maupun Nias.

Bukan hanya sosial-budaya yang disentuh oleh sektor pendidikan, namun juga sosial-ekonomi. Hal ini mengingat, tak sedikit masyarakat yang sumber nafkahnya terkait secara langsung maupun tidak di dalamnya, seperti tenaga pendidik, percetakan, kontraktor, dan lain-lain. Apabila dilihat dari perspektif yang lebih luas lagi, maka semakin mantapnya indeks kualitas pendidikan masyarakat, berandil besar terhadap kemajuan sosial-ekonomi suatu Daerah atau negara. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, kualitas SDM-nya cenderung semakin baik.

> Angka Indeks Kualitas Pendidikan Masyarakat dihitung berdasarkan:
>
> a. Angka Melek Huruf,
> b. Angka Partisipasi Sekolah (APS),
> c. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan,
> d. Angka Partisipasi Murni (APM),
> e. tingkat pendidikan yang ditamatkan,
> f. rata-rata lama pendidikan.

Disadari, kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketersediaan tenaga pendidik yang belum memadai,

"Monumen hidup" Turki. SMU Fatih Bilingual, Banda Aceh, dibangun dari bantuan langsung masyarakat Turki. Sekolah unggulan ini siap mencetak pelajar berprestasi di Banda Aceh. Gambar diambil pada 29 Oktober 2008. Foto: BRR/Arif Ariadi

baik secara jumlah maupun mutu; kesejahteraan tenaga pengajar yang masih rendah; sarana belajar-mengajar yang belum memadai; serta biaya operasional yang belum cukup tersedia.

Kesenjangan pada tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, masih terjadi, misalnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, di perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah. Faktor ekonomi masih menjadi alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja.

Akan tetapi secara umum, kondisi pendidikan di Aceh dan Nias berubah total sejak pascabencana. Seiring dengan momentum Pemulihan pendidikan, Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk memperhatikan sektor tersebut lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Komitmen itu secara tegas telah dimaktubkan di dalam, dan oleh karenanya menjadi amanah, klausul khusus pendidikan di UUPA, yakni semua enam pasal di Bab XIII. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat dilihat dalam pasal 217.

Komitmen tersebut didukung pula dengan alokasi anggaran yang mekanismenya telah ditetapkan dalam UUPA. Sejak dilaksanakannya desentralisasi pada 2001, biaya operasional sekolah, terutama sekolah negeri, yang semula dialokasikan melalui belanja rutin Pemerintah Pusat, kini telah dialokasikan langsung ke Daerah sebagai bagian dari DAU. Selain itu, Aceh memiliki peluang lebih besar ketimbang provinsi lain di Indonesia karena memiliki alokasi tambahan khusus yang besarnya cukup signifikan. Anggaran itu dikucurkan melalui kran Dana Otsus serta Dana Bagi Hasil Pertambangan (DBH) Migas.

Yang menggembirakan, angka melek huruf di Aceh sudah berada di atas rata-rata nasional, tinggal empat kabupaten lagi yang belum. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Aceh pun sudah berada di atas rata-

Sekolah baru. Beberapa siswa sekolah dasar Kota Calang, Aceh Jaya, sedang bermain di luar kelas sekolah mereka yang sudah selesai dibangun, 5 Maret 2008. Kota di Pantai Barat Aceh yang terparah dihantam tsunami itu kini sedang gencar dibangun, termasuk sektor pendidikannya. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 31:

Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Pendidikan

Tentang kewajiban Pemerintah Aceh dalam hal pendidikan, pasal 217 UUPA menyatakan:

1. Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
2. Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
3. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang.
4. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/ kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi penduduk Aceh yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Hasil kerjasama. Para calon mahasiswa Politeknik Aceh, Banda Aceh, ini usai mengikuti masa orientasi, 22 Agustus 2008. Bangunan dan sarana pendidikan kampus ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Aceh, BRR, dan sejumlah Donor Internasional. Foto: BRR/Arif Ariadi

Kotak 32:

Anggaran Aceh untuk Pendidikan

Dana Otsus, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membeayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan prasarana, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus berlaku khusus untuk Aceh selama 20 tahun. Rinciannya, untuk tahun ke 1-15, besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional; untuk tahun ke 16-20, besarnya setara dengan 1 persen plafon DAU Nasional.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasar angka persentase tertentu. Tujuannya untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Paling sedikit 30 persen dari DBH Migas khusus Aceh dialokasikan untuk membeayai pendidikan di Aceh. Program tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. DBH Minyak besarnya 0,5 persen, yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. DBH Minyak dibagi dengan rincian: 0,1 persen untuk provinsi, 0,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2 persen untuk kabupaten/kota lainnya di Aceh secara sama besar porsinya. Hal serupa, berlaku pula untuk DBH Gas.

rata nasional, tinggal dua kabupaten yang belum. Namun demikian, masih ada sejumlah kelemahan, termasuk dalam hal kurikulum dan penetapan kuota perimbangan kesempatan pendidikan.

Indikator-indikator yang menjadi tolok-ukur tingkat keberhasilan pendidikan di Aceh dan Nias secara umum masih di bawah harapan yang diinginkan. Indikator itu dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tenaga dan prasarana pendidikan, kualitas proses pendidikan, serta pertumbuhan PDRB per kapita yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Guna mengatasi hal itu, telah dirintis upaya koordinasi dan sinkronisasi program di antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Praktik-praktik terbaik pun semakin banyak yang diidentifikasi dan kemudian diadaptasikan untuk menuai keluaran peserta didik dan kinerja birokrasi pendidikan yang terbaik pula. Hal ini terlihat dengan dibangunnya sejumlah sekolah unggulan.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan, terutama mengingat perannya sebagai penopang tak langsung, merupakan satu kesatuan dengan pembangunan sektor-sektor lain. Perannya semakin diperhitungkan setelah semakin banyak dukungan yang diberikan, baik melalui keluaran Pemulihan pascabencana maupun pembangunan semesta.

Komitmen masing-masing Pemda dalam menata pembangunan sektor kesehatan semakin meningkat. Seiring era desentralisasi, sektor kesehatan pun tak luput dari pola penanganan yang desentralisatif. Terutama di Aceh, berkat otonomi daerah, damai pascakonflik, serta meningkatnya besaran anggaran, sektor kesehatan semakin mendapat perhatian. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli pelayanan kesehatan semakin membaik. Sarana kesehatan di tiap kabupaten/kota sudah tersedia. Dan yang lebih menggembirakan, rasio puskesmas terhadap penduduk, banyak yang sudah di atas standar nasional.

Dukungan maupun peluang tak serta-merta membuat semua problem kesehatan mudah diatasi, terutama karena dampak pascabencana belum sepenuhnya tereliminasi sebagai hambatan. Beban ganda penyakit, dari infeksi menular hingga penyakit degeneratif dan noninfeksi, makin melebar.

Hal ini diperparah dengan masih rendahnya perilaku masyarakat terhadap pola hidup sehat. Sumberdaya tenaga kesehatan belum terdistribusi secara proporsional sesuai kebutuhan. Rumah sakit daerah belum memadai alih-alih merata. Cakupan pelayanan, terutama di daerah terpencil dan kepulauan, belum optimal. Sistem informasi belum berjalan cepat dan akurat. Pembangunan kewilayahan belum berjalan semestinya, sehingga koordinasi antarpara pemangku kesehatan terkait masih renggang.

Kendala-kendala tersebut akhirnya menciptakan disparitas status kesehatan masyarakat perkotaan dan pedesaan. *Trust* masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lokal yang cenderung rendah pun telah memicu tren berobat ke luar daerah/negeri. Penang (Malaysia), adalah salah satu destinasi favoritnya.

Untuk mengimbangi kendala tersebut, serta mengombinasikannya dengan dukungan dan peluang yang ada, berbagai upaya telah dilakukan. Indikasi perkembangan masyarakat itu antara lain tampak pada meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Pertimbangannya, apabila dari tahun ke tahun AHH meningkat, berarti mutu kesehatan masyarakat meningkat. Sebaliknya jika AHH menurun, berarti menurun pula mutu kesehatan masyarakat.

Secara umum, tingkat AHH di Aceh dan Nias terus meningkat, meski belum signifikan. Peningkatan ini telah menjadi kebanggaan bersama, mengingat, sarana-prasarana kesehatan di Aceh dan Nias saat ini sudah semakin membaik dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Tingkat ketersediaannya terus dipacu agar terimbangi dengan pelayanan kesehatan yang prima, sejalan dengan semakin meningkatnya

Semakin terlayani. Didampingi suami, seorang ibu menggendong anaknya ke luar salah satu ruangan RSUD Sigli, Pidie, 21 Oktober 2008. Dengan akan dibangunnya tiga unit RS sakit baru pada 2008, masyarakat akan semakin memperoleh pelayanan kesehatan. Foto: BRR/Arif Ariadi

Layanan RSUD Nagan Raya. Aktivitas pelayanan kesehatan yang prima seperti terlihat di RSUD Nagan Raya, 7 Maret 2008, ini terus dipacu. Hal ini sejalan dengan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan. Foto: BRR/Arif Ariadi

pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dari berbagai laporan terungkap bahwa, problem kesehatan masyarakat di Aceh dan Nias saat ini berhubungan dengan tingginya angka infeksi (seperti malaria, tubercolosis [TB], diare, infeksi saluran pernafasan akut [ISPA], pneumonia, demam berdarah), serta penyakit kejiwaan (psikososial) dan noninfeksi (seperti jantung koroner). Selain itu, banyak pula terungkap problem penyakit atau kesehatan pada ibu dan anak yang ditandai oleh tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), serta status gizi yang relatif masih belum memuaskan.

> “AKB dapat dijadikan indikator mutu kesehatan masyarakat sekaligus keberhasilan pembangunan kesehatan. Dibandingkan dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara, AKB di Indonesia tergolong tinggi. Seperti ynag sudah diperkirakan, presentase AKB, AKI, dan balita kurang gizi yang lebih tinggi terjadi di daerah perdesaan serta pada penduduk berpendidikan rendah.”

Akhir-akhir ini semakin terlihat langkah positif untuk menguatkan komitmen peningkatan mutu kesehatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, dari tingkat provinsi hingga tingkat terbawah. Hal tersebut direalisasikan dengan mengelaborasi potensi elemen-elemennya, seperti tenaga medis, prasarana, serta kualitas proses pelayanan kesehatan. Komitmen untuk menurunkan tingkat AKI dan AKB, serta meningkatkan tingkat AHH, merupakan harapan yang tidak tanpa dasar. Ini terkait dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh membaiknya angka pertumbuhan PDRB per kapita.

Bagaimanapun statusnya, harus diakui, pembangunan sektor kesehatan di Aceh-Nias sudah mengarah untuk mendukung komitmen Pemerintah mencapai MDG melalui sasaran program “Indonesia Sehat 2010”. Upaya kesehatan berbasis masyarakat yang belum merata dan berkesinambungan, terus diimbangi

dengan meningkatkan peran komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Khususnya, dalam hal perbaikan lingkungan dan mengubah perilaku sehat yang masih menuai kendala terkait sektor lain maupun budaya masyarakat setempat.

Perdamaian dan Rekonstruksi

Aceh pascatsunami memiliki keunikan tersendiri. Luar biasanya dampak tsunami, itu baru satu hal. Luar biasanya status Aceh yang saat tsunami masih dirundung perseteruan berdurasi lima kali ganti presiden antara GAM dan RI, itu lain hal. Dua keluarbiasaan itulah yang menempatkan Pemulihan di Aceh menjadi cukup khas jika dibandingkan negara Asia-Afrika landaan tsunami 2004, dan sedikit serupa dengan Sri Lanka.

Patut diingat, fase tanggap-darurat dan awal fase rehabilitasi pascatsunami di Aceh terselenggara dalam status "darurat sipil" (berdasarkan Perpres Nomor 2/2004). Tepat 32 hari setelah BRR didirikan, status itu baru dicabut Presiden SBY, menjadi "tertib sipil" (berdasarkan Perpres Nomor 38/2005). Saat itu, simpati warga dunia berdatangan. Para pekerja kemanusian berduyun-duyun, bukan saja dari Indonesia, namun juga dari luar negeri. Dapat dibayangkan, betapa kondisi Aceh yang semula relatif terisolasi dari dunia luar, oleh tsunami, sontak laksana rumah yang pintunya dijebol paksa hingga terbuka selebar-lebarnya untuk siapapun.

Yang menarik, terutama semasa tanggap darurat, sejumlah narasumber menyaksikan, banyak militer RI dan paramiliter GAM yang turun gunung, bahu-membahu menjadi sesama pekerja kemanusiaan. Wajarlah, karena hari itu yang dibutuhkan rakyat Aceh bukan semangat mengangkat senjata seperti yang terukir dalam sejarah pergolakan bangsanya sejak abad XVI. Yang mereka butuhkan, pertolongan. Dari siapapun, tak peduli itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau GAM.

Betapa bencana telah memutar arah kompas permusuhan menjadi persaudaraan. Desing peluru dibungkam desing pacul dan alat berat. Rentetan senjata dilibas oleh tempik gotong-royong (*meuseuraya,* Aceh) pekerja kemanusiaan. Namun, apakah tsunami yang terjadi kurang dari 29 menit itu serta-merta telah mampu melebur dampak konflik 29 tahun, dan kemudian bertransformasi menjadi semangat bersama membangun-kembali?

Dampak itu, terkait relevansinya dengan tantangan mutakhir, telah ditempatkan sebagai bahan pertimbangan penting sekaligus tantangan bagi koordinasi dan implementasi Pemulihan pascatsunami yang, menurut pasal 17 Perpu Nomor 2/2005, dikelola oleh BRR. Arsiran relevansinya adalah, bukan lantaran BRR merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat semata, melainkan lebih pada aspek pelibatan dan kerjasama segenap unsur masyarakat setempat beserta aspek penyinambungannya kelak.

Terdapat pembagian tugas antara pemulihan pascatsunami (rekonstruksi oleh BRR dan Mitra) pada satu sisi, dan pemulihan pascakonflik (reintegrasi oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh [BRA] dan Mitra) pada sisi lain. Di lapangan, bukan pendekatan khusus saja yang dibutuhkan, namun juga langkah nyata yang sanggup mendamaikan gesekan kepentingan di antara dua ragam pemulihan itu. Segenap capaian, tantangan, dan kesulitan yang dialami BRR beserta Mitra ketika bekerja di, dan untuk, Aceh-Nias telah semakin dipahami dalam kerangka-pikir semacam ini.

Bertolak dari hal itu, proses rekonstruksi dan reintegrasi dicoba untuk diimplementasikan dalam satu sapuan. Keadilan dan perdamaian sendiri sebagai sebuah proses tidak dapat ditargetkan waktu berakhirnya. Rekonstruksi, yang diyakini dan berdampak memberikan harapan positif bagi perbaikan taraf hidup masyarakat Aceh, adalah bagian dari proses reintegrasi itu sendiri. Reintegrasi akan lebih mudah tercapai jika masyarakat merasakan adanya urusan publik yang semakin terlayani dan urusan privat yang semakin terjamin.

Selain dengan membentuk BRR, Pemerintah juga melakukan sejumlah langkah nyata; salah satunya, mengucurkan dana reintegrasi dari APBN—kepada BRA.

Program-program reintegrasi oleh badan yang terbentuk pada 13 April 2006 melalui Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/106/2006 itu meliputi bantuan ekonomi dan sosial. Instrumen tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan tahanan politik, serta masyarakat penyintas konflik. Bantuan yang ada masih terasa dipahami sebagai instrumen kompensasi alih-alih pemberdayaan ekonomi yang efektif. Oleh karena itu, pemulihan mata pencaharian merupakan tantangan utama.

Sejumlah isu yang muncul sebagai dampak dari persinggunggan antara pascakonflik dan pascatsunami, telah dicermati. Konflik menyisakan trauma kekerasan, curiga dan dendam, serta keroposnya rasa saling-percaya *(trust)*. Pada sisi lain, konflik juga telah merusak/musnahkan (pra)sarana ekonomi dasar sehingga menyumbat kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintahan dan tata-nilai adat yang lumpuh telah mengacaukan pranata kemasyarakatan. Kuatnya tegangan dalam masyarakat Aceh, dengan demikian, amat membutuhkan sebuah keseimbangan baru.

Pada saat itulah kegiatan rekonstruksi menempati posisi sebagai instrumen peredam ketegangan. Rekonstruksi menjadi "bantalan" dan "penyangga" bagi pelaksanaan upaya-upaya yang lebih substanstif terkait reintegrasi. Dengan lain kata, rekonstruksi Aceh, secara tak langsung telah menyediakan diri guna memungkinkan masyarakat bisa melihat masalah yang mereka hadapi bukan semata-mata politis, tapi juga ekonomi dan sosial.

Adalah penting bahwa BRR dan Mitra secara simultan mengombinasikan upaya menjaga perdamaian *(peace keeping)* dan membangun perdamaian *(peace building)* dalam kegiatan dan kebijakannya. Menyinergikan kegiatan Pemulihan pascatsunami dengan "pembangunan berbasis reintegrasi dan perdamaian", menyediakan dukungan yang lebih bermakna. Ujung-ujungnya, upaya ini akan membuka kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan *peace building* terkait, terutama Pemda, untuk lebih leluasa mewujudkan agendanya. Agenda itu termasuk menyusun qanun, melaksanakan pilkada, memperkuat tata-kepemerintahan, membangun kapasitas, dan lain-lain.

> Salah satu langkah nyata dari upaya menyinergikan kegiatan Pemulihan dengan "pembangunan berbasis reintegrasi dan perdamaian" terjadi pada 14 November 2005. Saat itu Presiden SBY, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15/2005 (diktum kedua poin ke-19), telah menginstruksikan kepada Kepala Bapel BRR untuk "menyiapkan rencana dan kebijakan untuk menempatkan calon wakil-wakil mantan GAM guna ikut berpartisipasi secara penuh dalam BRR sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang disyaratkan." Melalui Inpres itu pula, SBY juga mengistruksikan para menteri terkait, jaksa agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Kepala BPN, dan Gubernur Aceh, untuk mengambil langkah-langkah nyata sesuai kapasitasnya masing-masing.

Semua telah sama menyadari, bahwa perdamaian, bukan hanya berarti absennya konflik, namun juga tegaknya keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses hukum yang adil dan transparan melalui pengadilan hak asasi manusia dan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagaimana amanah MoU Helsinki, ditengarai akan menjadi isu yang menonjol dalam waktu dekat.

> Dalam MoU Helsinki butir 2.2 dan 2.3 ditegaskan bahwa,"(2.1) Sebuah Pengadilan Hak Asasi manusia akan dibentuk untuk Aceh. (2.3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi." Terkait pengadilan HAM di Aceh, telah jelas disebutkan dalam MoU Helsinki butir 2.1, namun UUPA kemudian menjelaskan bahwa pengadilan HAM di Aceh tidak berlaku retroaktif.

Rekonstruksi dan reintegrasi. Deputi Bidang Infrastruktur BRR, Bastian Sihombing (paling kiri) didampingi Kabapel BRR, Kuntoro Mangkusubroto (dua dari kanan) dan Direktur Hubungan Donor dan Hubungan Internasional, Heru Prasetyo (paling kanan) menjelaskan kepada eks-petinggi GAM, Malik Mahmud, tentang kemajuan proses Pemulihan pascatsunami di Banda Aceh, 25 Februari 2007. Upaya membangun perdamaian, telah menjadi pertimbangan penting bagi BRR dalam pemulihan Aceh. Foto : BRR/Ricky Sugiarto

Memang terlihat ada dorongan dan semangat yang tinggi dalam menjunjung perdamaian. Namun upaya itu masih membutuhkan waktu sampai masyarakat Aceh bisa menerima kondisi ini dengan sepenuh hati, meski masih banyak persoalan yang belum kunjung tertuntasi. Misalnya, *judicial review* terhadap UUPA yang belum sesuai dengan MoU Helsinki maupun aspirasi rakyat Aceh, diperkirakan akan mewarnai isu-isu seputar Aceh pada masa-masa mendatang.

> “Banyak kritik dilayangkan kepada UUPA karena tidak mencantumkan MoU Helsinki dalam klausul konsiderannya, padahal UUPA lahir dari proses kesepakatan damai di Helsinki. Pun, butir-butir kesepakatan di MoU Helsinki tidak terakomodasi seluruhnya ke dalam UUPA. Misalnya saja tentang kewenangan Pemerintah Pusat (MoU Helsinki, 1.1.2.a) dan pembatasan jumlah anggota TNI/Polri (MoU Helsinki, 4.7).”

Telah disinggung sebelumnya, realisasi program-program mata pencaharian atau pemberdayaan ekonomi dengan suatu mekanisme yang jelas, menjadi tantangan. Salah satu bentuk tantangannya adalah, bagaimana praktik program tersebut dapat dirasakan pula oleh seluruh penyintas bencana yang terjadi di Aceh. Setidaknya kini ada tiga jenis penyintas di Aceh, yakni penyintas bencana alam (tsunami), penyintas “bencana sosial” (konflik), dan penyintas “bencana akibat timpangnya kebijakan struktural” (masyarakat rentan atau miskin). Banyak harapan, bahwa proses pemulihan pascabencana yang tengah berlangsung, kelak menjadi berkah bagi kesemua penyintas, tanpa pandang bulu.

Kesenjangan dan kecemburuan sosial menjadi isu penting yang direspon dengan program-program penutup kesenjangan *(filling the gap)*. Selain melibatkan eks-kombatan GAM dalam proses

rekonstruksi, dilakukan pula pemerataan kegiatan rekonstruksi pada daerah-daerah yang relatif bukan landaan tsunami (akan dikupas pada Laporan Tahunan 2008 BRR). Digulirkannya pendekatan berbasis-wilayah (regionalisasi) serta dibangunnya jejaring komunikasi semacam Sekber sebagai kanal informasi antara aktor pemulihan dan masyarakat, merupakan satu kontribusi dari BRR.

Telah disadari pula bahwa konflik tidaklah selesai ketika kekerasan dan perang berakhir. Konflik horizontal hingga isu pemekaran wilayah seperti kasus Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat-Selatan, adalah contohnya. Patut disayangkan jika akhirnya sensitivitas konflik justru lemah pada level penentu kebijakan. Maka, sudah saatnya Pemda harus siap menjadi masinis bagi keberlanjutan *peace building* di daerahnya.

Peran Pemda bagi keberhasilan pengombinasian kedua program tersebut, oleh karenanya menjadi sentral. Pemampuan dan sinkronisasi program, adalah penting untuk meletakkan landasan yang mantap bagi tumbuhnya rasa memiliki *(ownership)* dan kesinambungan. Lebih jauh, pada tupoksinya sendiri sebenarnya sudah ditandaskan bahwa tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki Pemda masih lebih luas ketimbang BRR. Permda berkesanggupan dalam mengombinasi, baik upaya rekonstruksi maupun reintegrasi.

Kesiapan Pemda dipastikan akan menumbuhkan keyakinan masyarakatnya terhadap kesinambungan pembangunan. Dalam konteks itu, maka proses transisi yang elegan menjadi strategis. Kekurangmampuan menangkap momentum pascatsunami dan pasca-MoU Helsinki, tentu memengaruhi citra Pemda sendiri, paling tidak di mata masyarakatnya, sebagai agen penyinambung pembangunan-kembali.

Ujung-ujungnya, reputasi Indonesia di mata dunia menjadi barang pertaruhannya. Keadilan dan perdamaian di medan (bekas) bencana—alih-alih rekonstruksi di medan (bekas) konflik—bukan sekadar ajang memfasilitasi simpati dan dukungan warga dunia untuk kemanusiaan dan perdamaian. Kesinergisan upaya perdamaian dan rekonstruksi, oleh karenanya, juga akan dipandang sebagai ukuran bagi berhasil-tidaknya kinerja Pemerintah dalam mengawal transisi demokrasi ke arah yang lebih bermartabat.

LAMPIRAN 1 :

LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2008

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun Anggaran 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal.

Laporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Semester I Tahun Anggaran 2008 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berdasarkan laporan keuangan seluruh Satker yang berada di bawah BRR NAD-Nias dan melalui proses konsolidasi secara berjenjang.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2008 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2008 semester I terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.049.553.873 yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2008.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2008 semester I adalah sebesar Rp3.011.623.937.308 atau mencapai 27,65 persen dari anggarannya.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2008.

Jumlah Aset per 30 Juni 2008 sebesar Rp10.710.160.205.190 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.267.219.310.584, Aset Tetap sebesar Rp8.929.091.938.500 dan Aset Lainnya sebesar Rp513.848.956.106.

Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2008 sebesar Rp90.660.541.892 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana per 30 Juni 2008 sebesar Rp10.619.499.663.298, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.176.558.768.692 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp9.442.940.894.606.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban,dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima oleh atau dikeluarkan dari KUN.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2008
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (094) BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

NO.	URAIAN	CAT	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI		0	17.049.553.873	17.049.553.873	0,00
	a. Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0,00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	17.049.553.873	17.049.553.873	0,00
	2. HIBAH		0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		**0**	**17.049.553.873**	**17.049.553.873**	**0,00**
B	BELANJA	B.1.2				
	Belanja Pegawai		455.713.300.000	158.901.519.696	(296.811.780.304)	34,87
	Belanja Barang		1.612.897.240.000	358.921.334.181	(1.253.975.905.819)	22,25
	Belanja Modal		5.755.079.907.000	1.587.701.474.613	(4.167.378.432.387)	27,59
	Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	0,00
	Subsidi		0	0	0	0,00
	Hibah		0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial		3.064.632.317.000	906.099.608.818	(2.158.532.708.182)	29,57
	Belanja Lain-lain		0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA		**10.888.322.764.000**	**3.011.623.937.308**	**(7.876.698.826.692)**	**27,66**
C	PEMBIAYAAN					
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETTO)		0	0	0	0,00
	a. Perbankan Dalam Negeri		0	0	0	0,00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)		0	0	0	0,00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETTO)		0	0	0	0,00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri		0	0	0	0,00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		**0**	**0**	**0**	**0,00**

III. N E R A C A

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 30 JUNI 2008 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (094) BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

NAMA PERKIRAAN	CAT	JUMLAH
1		2
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	9.000.835.429
Kas PMU ReKOMPAK	C.2.1.2	45.065.085.781
Kas Komite Beasiswa	C.2.1.3	36.594.620.682
Uang Muka Belanja	C.2.1.4	1.135.758.257.497
Persediaan	C.2.1.5	40.800.511.195
JUMLAH ASET LANCAR		1.267.219.310.584
ASET TETAP		
Tanah	C.2.2.1	725.737.101.908
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	1.314.070.471.140
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	1.552.784.791.260
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4	2.373.033.026.180
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	25.889.861.660
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6	2.937.576.686.352
JUMLAH ASET TETAP		8.929.091.938.500
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	C.2.3	513.848.956.106
JUMLAH ASET LAINNYA		513.848.956.106
JUMLAH ASET		10.710.160.205.190
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Muka dari KPPN	C.2.4.1	9.000.835.429
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.4.2	81.659.706.463
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		90.660.541.892
JUMLAH KEWAJIBAN		90.660.541.892
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Cadangan Piutang	C.2.5.1	1.135.758.257.497
Cadangan Persediaan	C.2.5.2	40.800.511.195
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		1.176.558.768.692
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.6.1	8.929.091.938.500
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.6.2	513.848.956.106
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		9.442.940.894.606
JUMLAH EKUITAS DANA		10.619.499.663.298
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		10.710.160.205.190

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 (tertanggal 16 April 2005) tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 pada tanggal 25 Oktober 2005.

BRR NAD-Nias bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam tsunami dan gempa bumi di wilayah-wilayah pascabencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Kantor BRR NAD-Nias terdiri dari:

1. Kantor Pusat : Jl. Ir. M. Thaher No. 20 Lueng Bata – Banda Aceh
2. Kantor Perwakilan Nias : Jl. Pelud Binaka KM. 6,6 Ds. Fodo Kec. Gunungsitoli Sumatera Utara
3. Sebanyak 4 Kantor Perwakilan di Provinsi dan 1 Kantor Perwakilan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2005, BRR NAD-Nias terdiri dari 3 organ sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah
2. Dewan Pengawas
3. Badan Pelaksana

Kepengurusan organ BRR NAD-Nias adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah:

1)	Ketua Merangkap Anggota	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2)	Sekretaris Merangkap Anggota	:	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
3)	Anggota	:	1. Menteri Koordinator Bidang Kesra 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Keuangan 4. Menteri Pekerjaan Umum 5. Ketua DPRD Provinsi NAD 6. Gubernur Provinsi Sumatera Utara 7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NAD 8. Rektor Universitas Syiah Kuala 9. Rektor IAIN Ar-Raniry

10. Surya Paloh
11. Prof. Dr. Muslim Ibrahim
12. Ir. Usman Hasan, Msi.

2. Dewan Pengawas:

1) Ketua : Prof. Dr. Abdullah Ali *)
Merangkap Anggota

2) Sekretaris : Prof. Dr. Djunaedi Hadisumarto
Merangkap Anggota

3) Anggota :
1. Prof. Dr. Emil Salim
2. Drs. Mari'e Muhammad
3. Letjen (Purn.) Dr. TB Silalahi
4. Kanaka Puradiredja, SE, Ak.
5. Mayjen (Purn.) Djali Yusuf
6. Naimah Hasan
7. Kemal Stamboel

*) *Berhubung Prof. Dr. Abdullah Ali telah meninggal dunia, saat ini posisi Ketua Dewan Pengawas untuk sementara dijabat oleh Naimah Hasan.*

3. Badan Pelaksana:

1) Kepala : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto

2) Sekretaris : T. Kamaruzzaman, SH.

3) Deputi :

(1)	Bidang Pengawasan	: Ramli Ibrahim, SE, MMA.
(2)	Bidang Keuangan dan Perencanaan	: Amin Subekti, Ak, MBA.
(3)	Bidang Operasi	: Drs. Edy Purwanto, MPA.
(4)	Bidang Agama, Sosial, dan Budaya	: Dr. T. Saafir Iskandar Wijaya, MA.
(5)	Bidang Ekonomi dan Usaha	: Said Faisal, SE, M.Si.
(6)	Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan	: Dra. Hj. Cut Cayarani Bitai, M.Si.
(7)	Bidang Perumahan dan Permukiman	: Ir. Bambang Sudiatmo
(8)	Bidang Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan	: Ir. Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng.
(9)	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	: Iqbal Farabi, SH.

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaaan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-64/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. Rencana Strategis BRR NAD-Nias

Perencanaan Strategis BRR NAD-Nias terdiri dari:

1. Pernyataan Visi

Mewujudkan masyarakat Aceh dan Nias yang amanah, bermartabat, sejahtera dan demokratis. Dengan visi tersebut, BRR NAD-Nias telah menempatkan dirinya sebagai motor penggerak untuk mewujudkan masyarakat Aceh dan Nias yang amanah, bermartabat, sejahtera dan demokratis.

2. Pernyataan Misi

a. melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan (khusus untuk Aceh);

b. meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta iman dan taqwa (IMTAQ);

c. mengembangkan dan mengelola sumberdaya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya;

d. membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul, kompetitif, serta adil, berlandaskan ekonomi kerakyatan;

e. membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien;

f. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Aceh yang menunjang pembangunan berkelanjutan;

g. meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintah daerah yang profesional, berwibawa, dan amanah;

h. memperkuat pemahaman masyarakat tentang wawasan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI serta masyarakat dunia;

i. memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Otonomi Khusus Aceh sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Untuk merealisasikan sembilan misi yang telah ditetapkan di atas, BRR NAD-Nias menetapkan sembilan tujuan sebagai berikut:

a. terlaksananya pembangunan kembali kehidupan masyarakat Aceh dan Nias dalam bidang agama, sosial, dan budaya;

b. membangun sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif sehingga mampu meraih kesempatan pekerjaan, tidak saja di Aceh dan Nias, tapi juga di Indonesia dan dunia internasional;

c. memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya;

d. membangun ekonomi wilayah yang unggul, kompetitif, dan adil, dengan memberi perhatian besar pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

e. membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien;

f. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang menunjang pembangunan berkelanjutan;

g. meningkatkan kemampuan dan kualitas birokrasi pemerintah daerah agar lebih profesional, berwibawa, dan amanah;

h. membangun rekonsiliasi serta memperkuat solidaritas dan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI serta pergaulan masyarakat dunia;

i. memperkuat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan luas yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

A.3. Program BRR NAD-Nias

Program yang dilaksanakan dalam TA 2008 adalah Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintah, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Capaian program tahun 2008 semester I adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	350.019.996.000	135.399.137.042	38,68
2	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintah	50.011.751.000	14.452.442.530	28,90
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	10.488.291.017.000	2.861.772.357.736	27,29
Jumlah		**10.888.322.764.000**	**3.011.623.937.308**	**27,66**

Untuk melaksanakan program TA 2008, terdapat 119 Satker yang berada dalam 10 eselon-I atau bidang sebagai berikut:

No.	Bidang	Satker
1	Bidang Pengawasan	2
2	Bidang Keuangan dan Perencanaan	1
3	Bidang Agama, Sosial, dan Budaya	8
4	Bidang Ekonomi dan Usaha	11
5	Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan	22
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	28
7	Bidang Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan	28
8	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	18
9	Sekretariat, Komunikasi, dan Informasi	7
10	Bidang Operasi	5
Jumlah		**130**

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun 2008 semester I merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BRR NAD-Nias, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BRR NAD-Nias, seperti kedeputian serta Satker yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BRR NAD-Nias disusun berdasarkan kompilasi laporan keuangan Satker BRR NAD-Nias.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Satker membukukan transaksi keuangan melalui SAI, baik untuk transaksi anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, maupun belanja.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BRR NAD-Nias. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja.

2. Neraca

   Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BRR NAD-Nias dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI 2008 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2008, seluruh Satker melakukan validasi aset dengan Pusat Akuntansi, Pelaporan, dan Manajemen Aset berdasarkan realisasi belanjanya sebelum rekonsiliasi dengan KPPN, sehingga data neraca yang disajikan dalam laporan keuangan dan berasal dari SIMAKBMN dapat terjaga akurasinya. Seluruh satuan kerja yang ada di bawah BRR NAD-Nias sudah melaksanakan SAK dan SIMAKBMN secara penuh.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP, telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRR NAD-Nias adalah :

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BRR NAD-Nias sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial pada masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BRR NAD-Nias maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumberdaya, alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas, uang muka belanja, belanja dibayar dimuka, dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Uang Muka Belanja adalah jumlah uang muka dan atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor/pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka menyediakan/mengadakan barang persediaan.

Belanja Dibayar Di muka menyajikan jumlah belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang manfaatnya masih akan diterima pada periode berikutnya.

Persediaan terdiri dari barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BRR NAD-Nias, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

b. Aset Tetap

Aset tetap merupakan pengeluaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi aset tetap milik pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap

dicatat berdasarkan harga perolehan dengan pengakuan didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, tidak dikapitalisasi kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya, berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap terdiri atas :

1) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan Tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai Tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada Tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. Demikian juga dengan perolehan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/rekonstruksi aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi atau rekonstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak, meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, serta pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun secara swakelola mencakup biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan pembangunan/rekonstruksi/pengadaan aset tetap atau perbaikan dan/atau penggantian yang dilakukan terhadap aset tetap yang rusak dengan maksud mengembalikannya ke kondisi semula, meningkatkan kualitas atau kapasitas yang pada tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya. KDP dicatat sebesar biaya perolehannya, sesuai dengan termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat digolongkan sebagai aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise;* hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset yang belum bisa atau tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai perolehannya.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban BRR NAD-Nias timbul akibat adanya dana kas yang secara definitif sudah keluar dari kas negara namun masih ditempatkan dalam rekening penampung dan belum dibayarkan kepada pihak lain, serta kewajiban kepada KPPN; berupa keterlambatan penyetoran sisa uang persediaan kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/KPPN.

5. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih BRR NAD-Nias, yaitu selisih antara aset dan utang BRR NAD-Nias. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset idak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja TA 2008 BRR NAD-Nias adalah sebesar Rp10.888.322.764.000, terealisasi sebesar Rp3.011.623.937.308, atau 27,66 persen dari anggaran. Dari sisi Pendapatan terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp17.049.553.873.

B.1. Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1.1. Pendapatan

Pendapatan selama TA 2008 semester I mencapai Rp17.049.553.873. Pendapatan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:

Pendapatan 2008 semester I Rp17,049 Miliar

Uraian	Realisasi TA 2008 s.d. 30 Juni 2008 (Rp)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.180.202.243
Pendapatan Bea Lelang	159.000.000
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	11.718.705.799
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	89.218.000
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	879.214.816
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	182.694.820
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara	70.000.000
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.770.518.195
Jumlah	**17.049.553.873**

Rincian Pendapatan dapat dilihat pada Lampiran : 1

B.1.2. Belanja

Realisasi Belanja TA 2008 semester I mencapai Rp3.011.623.937.308. Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja 2008 semester I Rp3,012 triliun

Uraian	TA 2008 s.d. 30 Juni 2008	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Rupiah Murni	6.570.070.362.000	2.531.774.815.185
Pinjaman Luar Negeri	482.162.668.000	270.833.250
Hibah	3.202.318.588.000	449.314.206.746
RM Pendamping	633.771.146.000	30.264.082.127
Jumlah	**10.888.322.764.000**	**3.011.623.937.308**

Anggaran Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2008 s.d. 30 Juni 2008	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	455.713.300.000	158.901.519.696
Belanja Barang	1.612.897.240.000	358.921.334.181
Belanja Modal	5.755.079.907.000	1.587.701.474.613
Bantuan Sosial	3.064.632.317.000	906.099.608.818
Jumlah	**10.888.322.764.000**	**3.011.623.937.308**

B.1.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2008 semester I sebesar Rp158.901.519.696. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai 2008 semester I Rp158,901 miliar

Uraian	TA 2008 s.d. 30 Juni 2008 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	9.935.640.791
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non-PNS	0
Belanja Honorarium	145.923.930.431
Belanja Lembur	3.041.948.474
Jumlah	**158.901.519.696**

B.1.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2008 semester I sebesar Rp358.921.334.18. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Belanja Barang 2008 semester I Rp358,921 miliar

Uraian	TA 2008 s.d. 30 Juni 2008 (Rp)
Belanja Barang Operasional	29.728.767.390
Belanja Barang Non-Operasional	28.963.220.439
Belanja Jasa	260.906.954.593
Belanja Pemeliharaan	5.385.678.006
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33.348.477.918
Belanja Perjalanan Luar Negeri	588.235.835
Jumlah	**358.921.334.181**

B.1.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2008 semester I sebesar Rp1.587.701.474.613. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal 2008 semester I Rp1,587 triliun

Uraian	TA 2008 s.d. 30 Juni 2008 (Rp)
Belanja Modal Tanah	73.415.904.889
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.687.956.617
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	705.808.722.792
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	693.074.780.055
Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi	512.245.000
Belanja Modal Fisik Lainnya	9.201.865.260
Jumlah	**1.587.701.474.613**

B.1.2.4. Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial TA 2008 semester I sebesar Rp906.099.608.818. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial 2008 semester I Rp906,099 miliar

Uraian	TA 2008 s.d. 30 Juni 2008 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan	23.342.925.412
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	56.731.388.393
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	826.025.295.013
Jumlah	**906.099.608.818**

B.2. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk BRR NAD-Nias. Hambatan dan kendala yang dihadapi sehubungan dengan realisasi belanja di antaranya karena beberapa Satker pengguna DIPA TA 2008 mempunyai sisa dana luncuran dari TA 2007 yang semula harus diselesaikan pada 30 April 2008, namun dengan ijin dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2008, sehingga fokus pelaksanaan anggaran terbagi menjadi dua yakni, DIPA Murni TA 2008 dengan Luncuran TA 2008.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca pada 30 Juni 2008 adalah Aset sebesar Rp10.710.160.205.190, Kewajiban sebesar Rp90.660.541.892, dan Ekuitas Dana sebesar Rp10.619.499.663.298.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendaharawan Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2008 sebesar Rp9.000.835.429, merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendaharawan Pengeluaran 30 Juni 2008 Rp9.000.835.429

No.	Uraian Eselon I	30 Juni 2008 (Rp)
1	Bidang Pengawasan	600.000.000
2	Bidang Keuangan dan Perencanaan	400.000.000
3	Bidang Agama, Sosial, dan Budaya	217.030.881
4	Bidang Ekonomi dan Usaha	675.000.000
5	Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan	2.042.657.700
6	Bidang Perumahan dan Permukiman	565.000.000
7	Bidang Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan	1.300.490.000
8	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM	1.144.880.000
9	Sekretariat, Komunikasi, dan Informasi	1.287.776.848
10	Bidang Operasi	768.000.000
Jumlah		**9.000.835.429**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, BRR NAD-Nias telah melakukan inventarisasi dan penertiban rekening Satker TA 2008 dan telah melakukan pembahasan dengan Departemen Keuangan RI.

C.2.1.2 Kas PMU ReKOMPAK

Kas PMU ReKOMPAK
30 Juni 2008
Rp45.065.085.781

Saldo Kas PMU ReKOMPAK per 30 Juni 2008 sebesar Rp45.065.085.781 merupakan nilai uang kas rekening PMU ReKOMPAK pada Bank BRI bernomor rekening 0037-01-001498.30.6 yang belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim) per 30 Juni 2008.

C.2.1.3 Kas Komite Beasiswa

Kas Komite Beasiswa
30 Juni 2008
Rp36.594.620.682

Saldo Kas Komite Beasiswa yang belum disalurkan kepada penerima beasiswa per 30 Juni 2008 sebesar Rp36.594.620.682 tersimpan di rekening Komite Beasiswa pada Bank BRI bernomor rekening 0037- 01.001972.30.0.

C.2.1.4 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka belanja per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.135.758.257.497, merupakan uang muka dan atau pembayaran termin atas:

Uang Muka Belanja
30 Juni 2008
Rp1.135.758.257.497

Uraian	30 Juni 2008 (Rp)
Pembangunan rumah dan prasarana yang belum selesai	1.134.127.724.097
Uang muka pembelian peralatan dan mesin	188.520.200
Uang Muka pekerjaan irigasi	1.442.013.200
Jumlah	**1.135.758.257.497**

C.2.1.5 Persediaan

Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang ada pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional BRR NAD-Nias dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan pada 30 Juni 2008 terdiri atas:

Persediaan 30 Juni 2008
Rp40.800.511.195

Uraian	30 Juni 2008 (Rp)
Persediaan rumah dan bangunan	21.026.906.680
Bibit ternak dan kelapa sawit	6.210.931.195
Peralatan dan mesin yang belum diserahkan kepada masyarakat	13.452.370.357
Barang habis pakai	110.303.675
Jumlah	**40.800.511.195**

C.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp8.928.991.938.500, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap 30 Juni 2008 Rp8.928.991.938.500

Uraian	Saldo Awal 2008	Mutasi/Koreksi		Saldo 30 Juni 2008
		Tambah	Kurang	
Tanah	661.558.584.250	64.178.517.658	0	725.737.101.908
Peralatan dan Mesin	1.263.987.673.283	50.082.797.857	0	1.314.070.471.140
Gedung dan Bangunan	962.184.487.864	590.500.303.396	0	1.552.684.791.260
Jalan,Irigasi dan Jaringan	1.943.615.382.745	429.417.643.435	0	2.373.033.026.180
Aset Tetap Lainnya	17.892.662.959	7.997.198.701	0	25.889.861.660
KDP	2.570.963.455.535	1.466.123.486.565	1.121.382.978.285	2.937.576.686.352
Jumlah	**7.420.202.246.636**	**2.608.299.947.612**	**1.121.382.978.285**	**8.928.991.938.500**

C.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp725.737.101.908.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.314.070.471.140.

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.552.684.791.260.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp2.373.033.026.180.

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp25.889.861.660.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp2.937.576.686.352.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp2.937.576.686.352.

Seluruh Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada BRR NAD-Nias merupakan Barang Milik Negara dan dicatat serta dikelola oleh BRR NAD-Nias, baik yang berasal dari dana APBN maupun non-APBN (hibah). Pada saat BRR NAD-Nias berakhir pada 2009, seluruh aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahterimakan kepada Pemda atau pihak lain melalui mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menatausahakan aset hasil pengadaan dan pembangunan, dibentuk Direktorat Manajemen Aset pada Deputi Keuangan dan Perencanaan sesuai Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor 30/PER/BPBRR/ XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Manajemen Aset melakukan kegiatan inventarisasi terhadap seluruh aset hasil pengadaan dan pembangunan dengan tujuan:

1. menjamin keberadaan dan kelengkapan aset;
2. optimalisasi pemanfaatan;
3. menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi aset.

Dalam rangka memudahkan koordinasi, serta menjamin validitas dan keakuratan Barang Milik Negara dilakukan penggabungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan dengan Direktorat Manajemen Aset menjadi Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Manajemen Aset sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor 30/PER/BPBRR/ XI/2006.

Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan inventarisasi atas Barang Milik Negara untuk periode 2005 dan 2006, sehingga Barang Milik Negara BRR NAD-Nias telah terdukung seluruhnya oleh hasil inventarisasi. Adapun untuk perolehan Barang Milik Negara tahun 2007, dilakukan inventarisasi seluruhnya pada Februari 2008.

C.2.3. Aset Lainya

Aset Lainnya 30 Juni 2008 Rp513.848.956.106

Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp513.848.956.106. Nilai ini antara lain berupa jasa pemetaan, biaya perencanaan fisik dan non fisik serta biaya pengawasan pembangunan yang belum dapat dialokasikan ke dalam nilai aset tetap yang bersangkutan.

C.2.4. Kewajiban Jangka Panjang

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Kewajiban 30 Juni 2008 Rp9.000.835.429

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp9.000.835.429. Nilai pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif pada tanggal neraca.

C.2.4.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp81.659.706.463, merupakan dana yang masih harus dibayarkan kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

Uraian	30 Juni 2008 (Rp)
ReKOMPAK	45.065.085.781
Komite Beasiswa	36.594.620.682
Jumlah	**81.659.706.463**

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

C.2.5.1 Cadangan Piutang

Ekuitas Dana Lancar 30 Juni 2008 Rp1.176.558.768.692

Nilai Cadangan Piutang per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.135.758.257.497.

C.2.5.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp40.800.511.195.

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi

C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Ekuitas Dana Investasi 30 Juni 2008 Rp9.442.840.894.606

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp8.928.991.938.500.

C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp513.848.956.106.

D. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

Selain menerima alokasi dana APBN, BRR NAD-Nias juga menerima hibah yang dikumpulkan dari mancanegara, perusahaan, organisasi masyarakat, dan perseorangan. Untuk menampung hibah ini BRR NAD-Nias membentuk Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF) melalui Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor 1/PER/BP-BRR/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pembentukan Recovery Aceh Nias Trust Fund.

Kebutuhan RANTF ini muncul karena sebagian donatur tidak menyalurkan dana hibah mereka melalui APBN, MDTF, atau Badan-Badan Multilateral, seperti PBB, World Bank, Asian Development Bank dan NGO. Sehingga, dengan adanya RANTF ini, dana hibah yang masuk dapat dikelola secara langsung, profesional, bertanggung jawab, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

RANTF merupakan entitas tersendiri yang wajib menyusun laporan keuangan dari aktivitasnya. Laporan keuangan RANTF diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

RECOVERY ACEH-NIAS TRUST FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2008

	Catatan	Rp
AKTIVA		
Kas dan setara kas		34.098.901.569
Piutang lain-lain		1.130.627.160
Proyek yang sedang dikerjakan		37.566.518.576
Jumlah aktiva		**72.796.047.305**
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH		
AKTIVA BERSIH		
Tidak terikat		72.796.047.305
Jumlah aktiva bersih		**72.796.047.305**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH		**72.796.047.305**

catatan: Kurs BI per 30 Juni 2008 AS$1= Rp9.225

RECOVERY ACEH-NIAS TRUST FUND
LAPORAN AKTIVITAS
1 JANUARI 2008 - 30 JUNI 2008

	Catatan	Rp
Perubahan aktiva bersih tidak terikat:		
Penerimaan donasi		570.666.500
Penerimaan bunga deposito		732.621.380
Penerimaan bunga SBI		134.315.489
Penerimaan jasa giro		49.254.206
Penerimaan lain-lain		56.652.000
Pengembalian dana kepada donor (Venezuela)		(18.468.000.000)
Jumlah aktiva bersih tidak terikat		**(16.924.490.425)**
Beban dan kerugian:		
Beban program nonfisik		
Biaya topografi dan informasi pemetaan		499.211.895
Biaya penyusunan sistem pelelangan secara *online*		148.231.500
Program penggemukan kambing		198.145.870
		845.589.265
Beban operasional manajemen RANTF		
Biaya publikasi dan komunikasi		44.445.500
Biaya gaji		104.150.000

Biaya operasional manajemen nonbiaya gaji		78.263.000
Biaya administrasi bank dan lain-lain		20.165.198
Profesional fee		311.704.908
Rugi selisih kurs		529.751.973
Biaya lain-lain		2.973.562
		1.091.454.141
Jumlah beban dan kerugian		**1.937.043.406**
Kenaikan aktiva bersih		**(18.861.533.831)**
Aktiva bersih pada awal tahun		**91.657.581.137**
Aktiva bersih pada akhir tahun		**72.796.047.305**

Catatan: Kurs per 30 Juni 2008 AS$1= Rp9.225

RECOVERY ACEH-NIAS TRUST FUND
LAPORAN ARUS KAS
1 JANUARI 2008 - 30 JUNI 2008

		Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan donasi		570.666.500
Penerimaan bunga deposito		732.621.380
Penerimaan bunga SBI		134.315.489
Penerimaan jasa giro		49.254.206
Penerimaan pelunasan piutang		140.000.000
Penerimaan lain-lain		56.652.000
Pengembalian dana donor (Venezuela)		(18.468.000.000)
Kerugian selisih kurs valuta asing		(529.751.973)
Kas yang dibayarkan kepada pemasok, dan lain-lain sebagai beban program non-fisik		(845.589.265)
Kas yang dibayarkan kepada pemasok, konsultan, dan lain-lain, sebagai beban operasional manajemen		(559.391.603)
Kas yang dibayarkan kepada pemborong, pemasok, rekanan, dan lain-lain, sebagai uang muka proyek untuk proyek yang sedang dikerjakan		(18.740.789.609)
Biaya lain-lain		(2.310.566)
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi		**(37.462.323.440)**
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas		**(37.462.323.440)**
Kas dan setara kas pada awal periode		**71.561.225.010**
Kas dan setara kas pada akhir periode		**34.098.901.569**

Catatan: Kurs BI per 30 Juni 2008 AS$1= Rp9.225

LAMPIRAN 2 :

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Daftar Akronim dan Singkatan

Kebanyakan akronim atau singkatan yang tercantum dalam buku ini berasal dari Bahasa Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, kedua bahasa tersebut disediakan dalam kolom yang berbeda. Tanda "(...)" dimaksudkan, kata-kata yang ada di dalamnya bukan merupakan kepanjangan asli akronim atau singkatan bersangkutan, melainkan terjemahannya. Adapun kata yang ditulis miring (*italic*) dalam kolom *Inggris*, berarti menunjuk pada kata atau sekelompok kata bukan nama diri/lembaga.

	Indonesia	Inggris
AGDC	(Pusat Data Geospasial Aceh)	Aceh Geospatial Data Center
AGTP	(Program Transformasi Pemerintahan Aceh)	Aceh Government Transformation Programme
AHH	Angka Harapan Hidup	(*Life Hope Figure*)
AKB	Angka Kematian Bayi	(*Infant Mortality Figure*)
AKI	Angka Kematian Ibu	(*Maternal Mortality Figure*)
AKLI	Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia	(Associaton of Indonesia Electricity Contractor)
AMF	(Keuangan-Mikro Aceh)	Aceh Micro-Finance
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	(*Government of Indonesia's National Annual Budget*)
AS	Amerika Serikat	(United States of Amerika)
bandara	bandar udara	(*airport*)
Bapel	Badan Pelaksana BRR	(Executing Agency BRR)
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	(National Development Planning Agency)
BI	Bank Indonesia	(Bank of Indonesia)
BKKRR	Badan Koordinasi Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	(Coordination for the Continuity of Rehabilitation and Reconstruction Agency)
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat	(*Direct Community Assistance*)
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	(Audit Financial Agency)
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	(Financial and Development Supervisory Agency)
BPLM	Bantuan Peternakan Langsung Masyarakat	(Direct Farm Aid Community)
BPN	Badan Pertanahan Nasional	(National Land Agency)
BPS	Badan Pusat Statistik	(Statistic Center Agency)
BRA	Badan Reintegrasi-Damai Aceh	(Aceh Peace-Reintegration Agency)
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggröe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara	(Rehabilitation and Reconstruction of the Regions and Community of Nanggröe Aceh Darussalam and Nias Island North Sumatera Province Agency)
BSBT	Bantuan Sosial Bertempat Tinggal	(*Social Assistance for Settlement*)
BSPR	Bantuan Sosial Perbaikan Rumah	(*Social Assistance for House Repairment*)
CDD	(pembangunan yang dikemudikan masyarakat)	*community-driven development*
CFAN	(Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias)	Coordination Forum for Aceh and Nias
CGI	(Grup Konsultatif mengenai Indonesia)	Consultative Group on Indonesia
CoP	(Masyarakat Praktisi)	Communities of Practice
Dati	Daerah Tingkat	(*Regional Level*)
DAU	Dana Alokasi Umum	(*Special Allocation Fund*)
DBH	Dana Bagi Hasil	(*Share Fund*)
Depkominfo	Departemen Komunikasi dan Informasi	(Departement of Communication and Information)

	Indonesia	Inggris
Deplu	Departemen Luar Negeri	(Departement of Foreign Country)
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	(*Issuance of Spending Authority*)
DKP	Dinas Perikanan dan Kelautan	(Office of Fisheries and Maritime Affairs)
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	(House of Representative Aceh)
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	(House of Representative District Level)
DRR	(pengurangan risiko bencana)	disaster risk reduction
EDC	(Pusat Pengembangan Ekspor)	Export Development Center
FAO	(Organisasi Pangan Dunia)	Food and Agriculture Organisation
GAM	Gerakan Aceh Merdeka	(Free Aceh Movement)
GIS	(Sistem Informasi Geospasial)	Geospatial Information System
GKN	Gedung Keuangan Negara	(Financial State Building)
GTZ	(Badan Kerjasama Jerman)	Gesselschaft for Technische Zusammenarbeit
HIC	(Pusat Informasi Kemanusiaan)	Humanitarian Information Center
IDSN	Infrastruktur Data Spasial Nasional	(*National Spatial Data Infrastructure*)
IHK	Indeks Harga Konsumen	(*Consument Prize Index*)
Inpres	Instruksi Presiden	(*Presidential Instruction*)
INTOSAI	(Organisasi Tertinggi BPK-BPK se-Dunia)	International Organisation of Supreme Audit Institutions
IOO	(KPPI)	Investor Outreach Office
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	(*Human Development Index*)
IREP	(Program Pemampuan Rekonstruksi Prasarana)	*Infrastructure Reconstruction Enabling Program*
JBIC	(Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional)	Japan Bank for International Cooperation
K/L	Kementerian Negara/Lembaga	(Ministry/Agency)
Kabapel	Kepala Badan Pelaksana BRR	(Head of Implementing Agency of BRR)
KK	Kepala Keluarga	(*head of family*)
KKM	Klinik Kemasan dan Merk	(Branding and Packaging Clinic)
Kotatif	kota administratif	(administrative district)
KPK	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	(Corruption Eradication Commission)
KPPI	Kantor Penunjang Pelaku Investasi	(IOO)
KPPN-K	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara-Khusus	(Special Office for State Treasury Services)
KRF	(Forum Pemulihan Kecamatan)	Kecamatan Recovery Forum
LK	laporan keuangan	(*finance report*)
LKM	Lembaga Keuangan Mikro	(Micro-Finance Institution)
MDF	(Dana Multi-Donor)	Multi-Donor Fund
MDG	(Tujuan Pembangunan Milenium)	*Millenium Development Goals*
migas	minyak dan gas bumi	(*oil and gas*)
monev	monitoring dan evaluasi	(*monitoring and evaluation*)
MoU	(Nota Kesepahaman)	*Master of Understanding*
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat	(People's Consultative Assembly)
MTR	(Tinjauan Paruh-Waktu)	*Mid-Term Review*
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam	(Nanggroe Aceh Darussalam)
NGO	(organisasi nonpemerintah, LSM)	*non-governmental organization*
Nisel	Kabupaten Nias Selatan	(District of South Nias)
NISM	(Pertemuan Pemangku-kepentingan Kepulauan Nias)	Nias Islands Stakeholder Meeting

	Indonesia	Inggris
otda	otonomi daerah	(*regional auotonomy*)
otsus	otonomi khusus	(*special autonomy*)
P2TP2	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	(Center of Integration Service for Women Empowerment)
P4S	Pusat Pengendalian dan Pelaksanaan Proyek Sektoral	(Center of Sectoral Project Controlling and Implementing)
P4W	Pusat Pengendalian Program dan Proyek Wilayah	(Center of Regional Program and Project Controlling)
PAD	Pendapatan Asli Daerah	(*Regional Income*)
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa	(UN)
PCN	Nota-Konsep Proyek	*(Project Concept-Note)*
PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto	(*Gross Domestic Regioanal Income*)
Pemda	Pemerintah Daerah	(Regional Government)
Pemkab	Pemerintah Kabupaten	(District Government)
Pemprov	Pemerintah Provinsi	(Province Government)
Perpres	Peraturan Presiden	(*Presidential Regulation*)
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	(*Regulation in the Lieu of Law*)
PHLN	pinjaman dan hibah luar negeri	(*foreign loan and grant*)
PLN	Perusahaan Listrik Negara	(State Electricity Company)
PMI	Palang Merah Indonesia	(Indonesian Redcross)
PMT	Pengakhiran Masa Tugas	(*Mandate Completion*)
PNS	pegawai negeri sipil	(*civil servant*)
Polri	Polisi Republik Indonesia	(Police of Indonesia)
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen	(Commitment of Program Preparatory Officer)
PPMK	Pusat Pengendalian Mutu Konstruksi – Kedeputian Operasi BRR	(Center of Construction Quality Controlling – Deputy of Operation BRR)
Prolega	Program Legislasi Aceh	(Aceh Legislation Program)
PSD	prasarana dan sarana dasar	(*basic infrastructure and facility*)
Pusdatin	Pusat Data dan Informasi BRR	(Center of Data and Information BRR)
puskesmas	pusat kesehatan masyarakat	(community health posts)
pustu	puskesmas pembantu	(auxiliary community health posts)
RANdatabase	(Pangkalan-data Pemulihan Aceh-Nias)	*Recovery Aceh-Nias Database*
RANTF	(Dana Perwalian Pemulihan Aceh-Nias)	*Recovery Aceh-Nias Trust Fund*
raqan	rancangan qanun	(*draft of implementation regulation in Aceh Province*)
RDI	(Indeks Pembangunan dan Pemulihan)	Recovery and Development Index
RI	Republik Indonesia	(Republic of Indonesia)
RKP	Rencana Kerja Pemerintah	(*Government Work Plan*)
RS	Rumah Sakit	(*hospital*)
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah	(*Regional and Spatial Plan*)
SAK	Satuan Anti-Korupsi	(Anti-Corruption Unit)
Satker	satuan kerja	(*work units*)
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam RI	(Susilo Bambang Yudhoyono, the 6th president of Indonesia)
SDM	sumberdaya manusia	(*human resources*)
SEAN	(Pertukaran Solusi Aceh dan Nias)	Solution Exchange Aceh and Nias

	Indonesia	Inggris
Sekber	Sekretariat Bersama	(Joint Secretary)
Setda	sekretariat daerah	(provincial/distric secretariat)
Setwan	sekretariat dewan	(secretary of house of representatives)
Simas	Sistem Informasi Manajemen Aset	(*Aset Management Information System*)
SIM-C	(Pusat Informasi Keruangan dan Pemetaan)	Spatial Information and Mapping-Centre
Sirenda	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Aceh	(*Information System of Aceh Development Planning*)
SKB	surat keputusan bersama	(*joint decree*)
SMU	Sekolah Menengah Umum	(Senior High School)
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja	(*Organizational and Governance Structure*)
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana	(*fund disbursement order letter*)
SPADA	(Dukungan untuk Kawasan Miskin dan Tertinggal)	Support for Poor and Disadvantage Areas
SPM	Surat Perintah Membayar	(*Payment Order Letter*)
TA	Tahun Anggaran	(*Fiscal Year*)
TDMRC	(Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana)	Tsunami and Disaster Mitigation Research Center
TNI	Tentara Nasional Indonesia	(Indonesian National Army)
TPI	Tempat Pelelangan Ikan	(Fish auction Market)
tupoksi	tugas pokok dan fungsi	(*main job and function*)
UN	(PBB)	United Nations
UNDP	(Program Pembangunan PBB)	United Nations Development Program
UNEP	(Program Lingkungan PBB)	United Nations Environmental Program
UNIMS	(Sistem Pengelolaan Informasi PBB)	United Nations Information Management Systems
UNORC	(Badan PBB mengenai Koordinasi Pemulihan)	United Nations Office of the Recovery Coordinator
Unsyiah	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	(Syiah Kuala University, Banda Aceh)
UU	Undang-Undang	(*Law*)
UUPA	Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh	(*Aceh Government Law*)
Wagub	wakil gubernur	(vice governoor)
WB	(Bank Dunia)	World Bank
WC	(kakus, toilet)	water closet
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif	(*Exclusive Economic Zone*)

Isi CD

Versi *softcopy* laporan ini tersedia pula di dalam keping *compact disc* (CD) terlampir. Bukan hanya itu, untuk keperluan pendokumentasian dan rekam-jejak, CD itu pun memuat 18 *file* laporan lain. Kesemuanya dikemas dalam format ".pdf". Berikut daftar *file-file* tersebut; urutannya sudah sesuai, sebagaimana yang termuat di dalam CD.

01. Laporan Semesteran Tahun-I BRR (2005)
- Meletakkan Fondasi Membangun Harapan.pdf (14.356 KB)
- Laying Down the Foundation for a Better Tomorrow.pdf (12.956 KB)

02. Laporan Tahunan-I BRR (2006)
- Membangun Tanah Harapan.pdf (20.981 KB)
- Building a Land of Hope.pdf (21.042 KB)

03. Laporan Tahunan-II BRR (2007)
- Memperkokoh Hikayat Kehidupan.pdf (122.201 KB)
- Strengthening the Narrative of Community Life (100.437 KB)

04. Laporan Tahunan-III BRR (2008)
- Mengisi Bangunan Pemulihan.pdf (14.000 KB
- Enriching the Construction of the Recovery.pdf (14,400 KB)

05. Laporan Semesteran Tahun-III BRR (2008)
- Laporan Semesteran Tahun-III BRR.pdf (7.100 KB)

06. Laporan Satu Tahun Tsunami (2005)
- Aceh dan Nias Setahun setelah Tsunami.pdf (13.715 KB)
- Aceh and Nias One Year after the Tsunami.pdf (12.948 KB)

07. Laporan Dua Tahun Tsunami (2006)
- Aceh dan Nias Dua Tahun setelah Tsunami.pdf (7.227 KB)
- Aceh and Nias Two Years after the Tsunami.pdf (90.735 KB)

08. LAKIP-I BRR (2006)
- LAKIP2006.pdf (1.700 KB)

09. LAKIP-II BRR (2007)
- LAKIP2007.pdf (3.300 KB)

10. Laporan-I TRIP (Mei 2007)
- Tsunami Recovery Indicators Package (TRIP).pdf (16.954 KB)

11. Laporan-II TRIP (Mei 2008)
- Tsunami Recovery Indicators (TRIP).pdf (6.100 KB)

12. Infomemo-I RANTF (Desember 2006)
- Infomemo-I RANTF.pdf (156 KB)

13. Infomemo-II RANTF (Juni 2007) (new)
- Infomemo-II RANTF.pdf (4.292 KB)

14. Infomemo-III RANTF (Desember 2007)
- Infomemo-III RANTF.pdf (1.900 KB)

15. Infomemo-IV RANTF (Mei 2008)
- Infomemo-IV RANTF - INA.pdf (1.799 KB)
- Infomemo-IV RANTF - ENG.pdf (1.333 KB)

16. Serah Terima-I dan II Aset RR Nias (Februari 2008)
- Serah Terima-I dan II Aset RR Nias.pdf (3.100 KB)

17. Serah Terima-III Aset RR Nias (Mei 2008)
- Serah Terima-III Aset RR Nias.pdf (15.400 KB)

18. Katalog Perumahan & Permukiman NAD-Nias (April 2008)
- Buku #1.pdf (15,2 Mb)
- Buku #2.pdf (12,9 Mb)
- Buku #3.pdf (8,2 Mb)
- Buku #4.pdf (6,6 Mb)

19. Proyek Mitra Pemulihan (Mei 2007)
- Partner Projects as of May 2007.pdf (839 KB)